



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI PENANGANAN PERMASALAHAN
UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT)
TERTINGGAL: STUDI KASUS UPT GAJAH MATI SP.6
KECAMATAN SUNGAI MENANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

TESIS

HENRIKO TOBING

0806430084

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI PENANGANAN PERMASALAHAN
UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT)
TERTINGGAL: STUDI KASUS UPT GAJAH MATI SP.6
KECAMATAN SUNGAI MENANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**

HENRIKO TOBING

0806430084

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2012



(_____)



HALAMAN PENGESAHAN

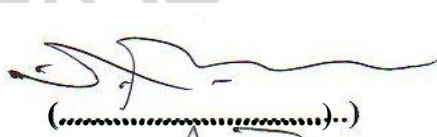
Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Henriko Tobing
NPM : 0806430084
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Penanganan Permasalahan Unit Permukiman Transmigrasi Tertinggal (Studi Kasus UPT Gajah Mati SP.6, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Nurkholis, SE, MSE



(.....)

Penguji : Dr. Aris Yunanto



(.....)

Penguji : Arindra A. Zainal, Ph.D



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 27 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis ini pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sulit untuk dapat menyelesaikan tulisan ini, karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Arindra A. Zainal, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- (2) Dr. Andi Fahmi Lubis, selaku Sekretaris Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- (3) Nurkholis, SE, MSE. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Dr. Aris Yunanto, selaku dosen penguji atas pemberian saran, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya penulisan tesis ini;
- (5) Pimpinan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya pada Bagian Perencanaan Umum, Biro Perencanaan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menempuh pendidikan strata-2 di Universitas Indonesia.
- (6) Pimpinan dan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat membantu penyelesaian penulisan tesis ini.
- (7) Pimpinan dan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang juga telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini;
- (8) Para dosen pengajar pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan pengetahuan yang mendasar selama studi.

- (9) Para staf Tata Usaha Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia yang dengan sabar dan penuh pengertian di dalam memberikan pelayanan administrasi selama studi
- (10) Herwini Wahyu Susanti yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dukungan semangat dalam penyelesaian tesis ini..
- (11) Teman-teman Angkatan XIX-A yang telah kompak dari awal perkuliahan sampai akhir dan saling mendukung untuk penyelesaian pendidikan.
- (12) Keluarga Besar Ifrul Z. Tobing dan Zuher Gani yang telah memberikan dukungan moril bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini.
- (13) Mas Moko untuk dukungannya dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan
- (14) Rinawati Lestari, istriku tercinta untuk dukungan yang tiada hentinya dalam membantu penyelesaian tesis ini dari awal hingga akhir.
- (15) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dan dalam bentuk apapun juga dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berdoa kepada Allah SWT agar berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 27 Januari 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henriko Tobing
NPM : 0806430084
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Strategi Penanganan Permasalahan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tertinggal : Studi kasus UPT Gajah Mati SP.6, Kecamatan Sunagai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Henriko Tobing)

ABSTRAK

Nama : Henriko Tobing
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Strategi Penanganan Permasalahan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tertinggal : Studi Kasus UPT Gajah Mati SP.6, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Transmigrasi adalah program pembangunan yang memiliki beberapa dimensi baik dimensi demografi, sosial ekonomi dan politik sekaligus. Program ini diharapkan tidak hanya mampu mengatasi permasalahan distribusi penduduk namun juga mampu mengatasi permasalahan kesejahteraan, ketimpangan pembangunan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Namun hingga kini program transmigrasi masih menuai perdebatan apakah program ini dapat dikategorikan berhasil atau malah sebaliknya.

Ukuran yang paling sederhana dalam melihat keberhasilan atau ketidakberhasilan program ini adalah dengan melihat keberadaan unit-unit permukiman transmigrasi yang ada apakah mereka mampu mencapai target dan sasarannya atau malah menjadi beban pembangunan itu sendiri.

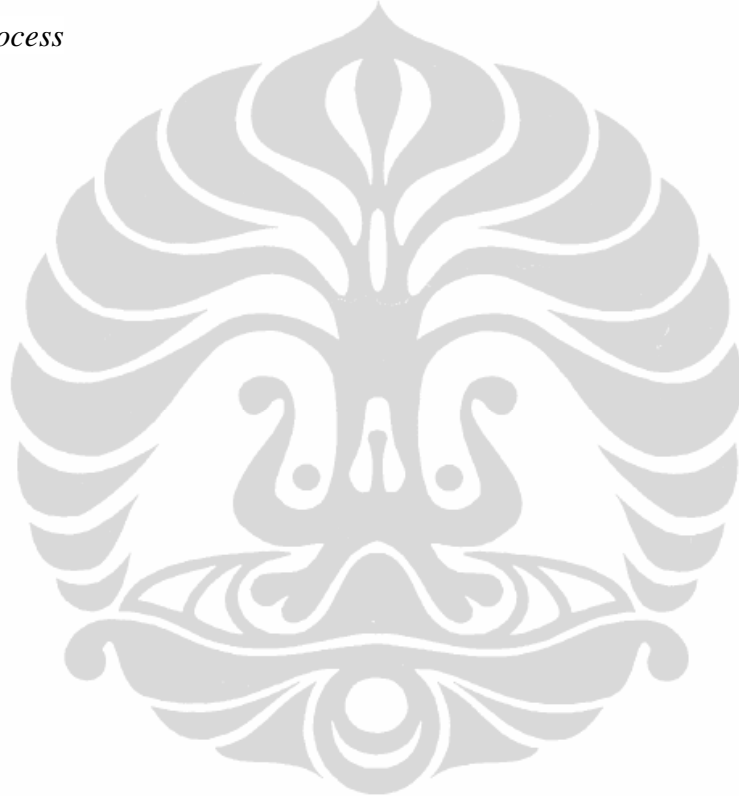
Berdasarkan data terdapat lebih kurang 383 UPT yang masih harus dibina dimana 60 persen diantaranya masa pembinaannya sudah lebih dari lima tahun. Pembinaan diatas lima tahun mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan yang belum terselesaikan sehingga UPT tersebut masih belum bisa mandiri atau dapat dikategorikan sebagai UPT tertinggal. Salah satunya dan juga menjadi objek penelitian ini adalah UPT Gajah Mati SP.6. UPT ini berlokasi di Kec. Pematang Panggang, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan dengan masa pembinaan lebih dari lima tahun.

Tujuan dari penulisan ini adalah mencoba menghadirkan solusi bagi penanganan permasalahan UPT tersebut melalui pencarian akar masalah sebagai dasar dalam penentuan skala prioritas penyelesaian masalah dengan menggunakan alat bantu Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode AHP ini dipergunakan

karena kemampuan metode ini dalam hal pemilihan prioritas dan pemilihan kebijakan khususnya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur.

Berdasarkan hasil penelitian upaya penanganan permasalahan air bersih menjadi prioritas utama dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lokasi ini.

Kata Kunci: Transmigrasi, Unit Permukiman Transmigrasi Tertinggal, *Analytical Hierarchy Process*



ABSTRACT

Name : Henriko Tobing
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Titel : Strategy in handling problems in the under developed transmigration settlement unit : Case Study, UPT Gajah Mati SP.6, District of Sungai Menang, Ogan Komering Ilir Regency.

Transmigration is a development program that has several dimensions such us demographic, socioeconomic and political as well. This program is expected, not only be able to overcome the problems of population distribution, but also the problems of welfare, inequality of development and national unity. However, the transmigration program is still reaping the debate until now whether the program can be categorized as successful or even vice versa.

The simplest measure in view of the success or lack of success of this program is to see the existing condition of the unit of transmigration settlements (UPT), whether they are able to reach the target or even become a burden of development itself.

Based on the data, approximately 383 UPT remains to be fostered, where 60 percent of the time built it was more than five years. Fostered by over five years indicates that there are unresolved issues that UPT is still not able to be independent or may be categorized as under developed UPT.

One of them, and also becomes the object of this study is the UPT Gajah Mati SP.6. Unit is located in the district of Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir regency in South Sumatra Province with the guidance of more than five years.

The purpose of this paper is trying to present a solution for handling problems of UPT through searching the root problem as the basis for determining priorities in solving the problem using the tools Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP method was used because of the ability of this method in the selection of priorities and policies, especially in solving a complex and unstructured problems.

Based on this research, efforts to address clean water issues become a top priority in handling problems that occur at this location.

Keywords: Transmigration, Under-developed UPT (Unit Permukiman Transmigrasi Tertinggal), Analytical Hierarchy Process



DAFTAR ISI

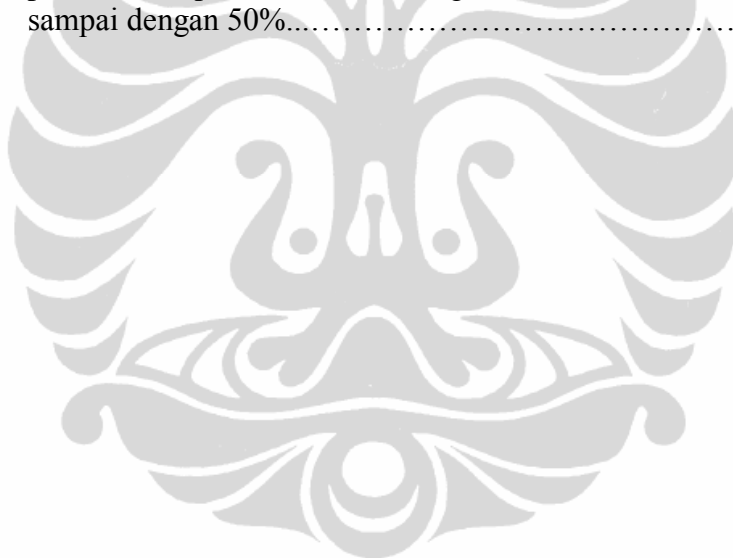
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Ruang Lingkup/Batasan Masalah	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Konsep Pembangunan Transmigrasi.....	8
2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Transmigrasi.....	9
2.3. Proses Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Paradigma Baru	10
2.4. Tahapan Penyelenggaraan Transmigrasi.....	12
2.5. Unit Permukiman Transmigrasi Tertinggal	13
2.6. Teori <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).....	17
2.6.1. Prinsip-Prinsip Pokok AHP	18
2.6.2. Tahapan Penggunaan AHP	20
2.6.3. Aksioma-aksioma AHP	28
2.6.4. Kelebihan dan Kelemahan AHP	29
2.7. Pemilihan Metode AHP	31
2.8. Studi Terkait.....	32
3. METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Kerangka Pikir Konseptual	38
3.2. Penyusunan Hirarki.....	40
3.2.1 Penjelasan elemen-elemen dalam level-level pada hirarki.	40
3.3. Hirarki strategi penanganan permasalahan UPT.....	44
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	50
3.4.1. Kuesioner.....	50
3.4.2. Identifikasi Stake Holder/Informan.....	50
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	51

4.	GAMBARAN UMUM LOKASI UPT GAJAH MATI SP.6	52
4.1.	Letak Geografis	52
4.2.	Iklim.....	55
4.3.	Aksesabilitas.....	56
4.4.	Kondisi Lahan.....	58
4.5.	Kondisi Tata Air	59
4.6.	Ekonomi.....	60
4.7.	Aspek Sosial	61
4.8.	Kependudukan	62
5.	HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1.	Hasil pembobotan untuk setiap level.....	65
5.1.1.	Hasil pembobotan untuk level kedua.....	65
5.1.2.	Hasil pembobotan untuk level ketiga dan keempat	66
5.2.	Prioritas penanganan permasalahan untuk setiap kriteria	72
5.3.	Prioritas global penanganan permasalahan	76
5.4.	Analisis sensitivitas	78
6.	PENUTUP	83
6.1	Kesimpulan	83
6.2	Saran/Rekomendasi Kebijakan	85
6.3.	Keterbatasan Studi	85
	DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR GAMBAR

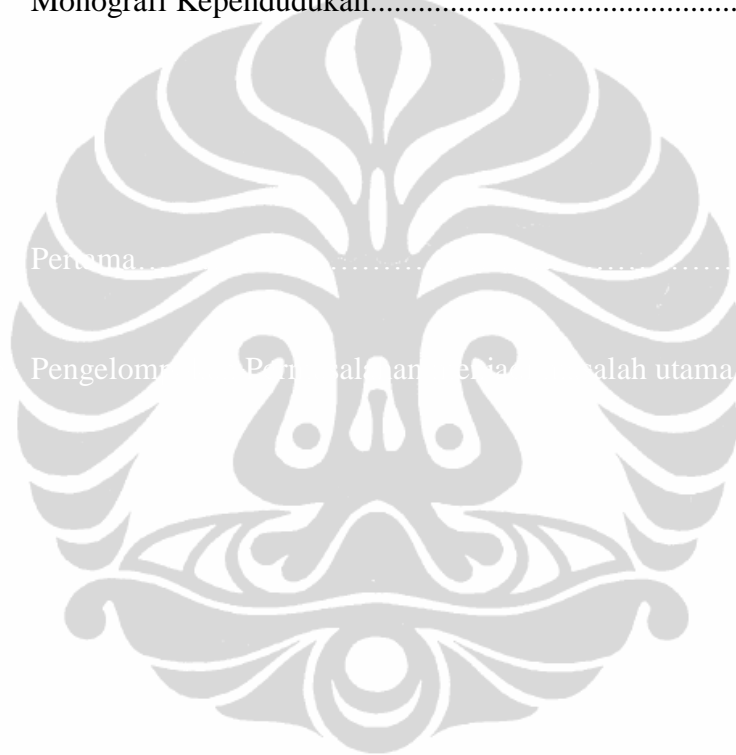
Gambar 2.1.	Struktur Hirarki AHP.....	20
Gambar 3.1.	Alur Pikir Penelitian.....	40
Gambar 3.2.	Struktur Hirarki Kriteria Biaya.....	45
Gambar 3.3.	Struktur Hirarki Kriteria SDM.....	46
Gambar 3.4.	Struktur Hirarki Kriteria Regulasi.....	47
Gambar 3.5.	Struktur Hirarki Kriteria Kepentingan.....	48
Gambar 3.6.	Struktur Hirarki Kriteria Dukungan Pemda.....	49
Gambar 4.1.	Peta Wilayah.....	53
Gambar 4.2.	Peta Lokasi.....	54
Gambar 5.1.	Hasil pengolahan data pada level kedua: kriteria.....	65
Gambar 5.2.	Hasil pengolahan data untuk kriteria biaya sub kriteria fisik dan non fisik.....	66
Gambar 5.3.	Hasil Pengolahan data sub kriteria fisik sub-sub kriteria prasarana dan sarana.....	66
Gambar 5.4.	Hasil pengolahan data sub kriteria non fisik sub-sub kriteria sosial dan ekonomi.....	67
Gambar 5.5.	Hasil pengolahan data untuk kriteria SDM sub kriteria fisik dan non fisik.....	67
Gambar 5.6.	Hasil pengolahan data sub kriteria fisik terkait dengan SDM sub-sub kriteria prasarana dan sarana.....	68
Gambar 5.7.	Hasil pengolahan data sub kriteria non fisik terkait SDM sub-sub kriteria sosial dan ekonomi.....	68
Gambar 5.8.	Hasil pengolahan data untuk kriteria Regulasi sub kriteria fisik dan non fisik.....	69
Gambar 5.9.	Hasil pengolahan data sub kriteria fisik terkait regulasi sub-sub kriteria prasarana dan sarana.....	69
Gambar 5.10.	Hasil pengolahan data sub kriteria non fisik terkait regulasi sub-sub kriteria sosial dan ekonomi.....	69
Gambar 5.11.	Hasil pengolahan data untuk kriteria kepentingan sub kriteria fisik dan non fisik.....	70
Gambar 5.12.	Hasil pengolahan data sub kriteria fisik terkait kepentingan sub-sub kriteria prasarana dan sarana.....	70
Gambar 5.13.	Hasil pengolahan data sub kriteria non fisik terkait kepentingan sub-sub kriteria sosial dan ekonomi.....	70
Gambar 5.14.	Hasil pengolahan data untuk kriteria dukungan pemda sub-sub kriteria fisik dan non fisik.....	71
Gambar 5.15.	Hasil pengolahan data sub kriteria fisik terkait dukungan pemda sub-sub kriteria prasarana dan sarana.....	71
Gambar 5.16.	Hasil pengolahan data sub kriteria non fisik terkait dukungan pemda sub-sub kriteria sosial dan ekonomi.....	71
Gambar 5.17.	Prioritas penanganan menurut kriteria biaya.....	72
Gambar 5.18.	Prioritas penanganan menurut kriteria SDM.....	73
Gambar 5.19.	Prioritas penanganan menurut Kriteria Regulasi.....	74
Gambar 5.20.	Prioritas penanganan menurut kriteria Kepentingan.....	75
Gambar 5.21.	Prioritas penanganan menurut kriteria dukungan Pemda.....	76

Gambar 5.22.	Prioritas penanganan menurut kriteria penanganan global..	77
Gambar 5.23.	Analisis sensitifitas penanganan permasalahan.....	79
Gambar 5.24.	Analisis sensitifitas penanganan permasalahan bila Tidak terjadi perubahan pembobotan pada kriteria.....	79
Gambar 5.25.	Analisis sensitifitas penanganan permasalahan bila pembobotan pada kriteria biaya dinaikkan sampai dengan 50%.....	80
Gambar 5.26.	Analisis sensitifitas penanganan permasalahan bila pembobotan pada kriteria SDM dinaikkan sampai dengan 50%.....	80
Gambar 5.27.	Analisis sensitifitas penanganan permasalahan bila pembobotan pada kriteria Regulasi dinaikkan sampai dengan 50%.....	81
Gambar 5.28.	Analisis sensitifitas penanganan permasalahan bila pembobotan pada kriteria Kepentingan dinaikkan sampai dengan 50%.....	81
Gambar 5.29.	Analisis sensitifitas penanganan permasalahan bila pembobotan pada kriteria Dukungan Pemda dinaikkan sampai dengan 50%.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kriteria pengakhiran status UPT Bina.....	14
Tabel 2.2.	Matriks perbandingan berpasangan.....	22
Tabel 2.3.	Skala penilaian perbandingan.....	23
Tabel 4.1.	Kondisi iklim.....	55
Tabel 4.2.	Aksesibilitas menuju lokasi.....	57
Tabel 4.3.	Aksesibilitas menuju lokasi pemerintahan dan sarana sosial	58
Tabel 4.4.	Kondisi pH tanah dan kejenuhan aluminium.....	58
Tabel 4.5.	Perkiraan tingkat pendapatan keluarga/tahun.....	60
Tabel 4.6.	Monografi Kependudukan.....	62



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa permasalahan pembangunan yang dialami Indonesia hingga saat ini diantaranya adalah kemiskinan, distribusi penduduk dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Permasalahan distribusi penduduk yang tidak seimbang dimana lebih kurang 60 persen penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa dengan luas wilayah yang hanya lebih kurang 6.3 persen dari total luas wilayah Indonesia mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan seperti daya dukung lingkungan yang tidak memadai, kemiskinan yang semakin meningkat, layanan kesehatan yang tidak mencukupi, tingginya tingkat kriminalitas dan permasalahan sosial lainnya.

Selanjutnya ialah permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah dimana masih banyak wilayah di Indonesia yang masih tertinggal karena belum disentuh oleh pembangunan. Program transmigrasi sebagai bagian dari tugas-tugas pemerintahan hadir menjadi salah satu program untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut. Sebagaimana diketahui program transmigrasi adalah bentuk migrasi di Indonesia yang pelaksanaannya diperkirakan sudah lebih dari 100 tahun dimana awalnya dimulai pada jaman kolonial Belanda. Namun hingga kini isu transmigrasi masih menjadi kontroversi terkait dengan keberhasilan atau ketidakberhasilan program ini dalam membantu menyelesaikan permasalahan di atas.

Pada awalnya program transmigrasi diakui sebagai program yang sangat penting khususnya dalam mengatasi permasalahan kependudukan dan kesejahteraan. Seperti dikutip dari pernyataan wakil presiden pertama RI DR. Mohammad Hatta *“Transmigrasi merupakan kewajiban kita dalam pembangunan Indonesia. Pandangan negatif harus disingkirkan, dengan konsepsi penyelenggaraan transmigrasi yang tepat dan fakta yang benar. Transmigrasi adalah masalah dalam negeri Indonesia. Transmigrasi adalah bagian dari hak membangun bangsa Indonesia”*.

Namun pada era belakangan ini program transmigrasi sepertinya banyak meninggalkan permasalahan dan seakan kehilangan peran dalam pembangunan nasional. Hal ini mungkin sebagai akibat dari tata kelola pembangunan transmigrasi yang kurang profesional dan akuntabel.

Ukuran yang paling nyata dan sederhana dalam menentukan keberhasilan program pembangunan transmigrasi adalah dengan melihat keadaan beberapa Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang telah dibangun selama ini, apakah dia mampu memenuhi sasarnya yaitu peningkatan kesejahteraan transmigran atau malah menjadi beban pembangunan itu sendiri. Tidak tersedianya data yang akurat terkait seberapa banyak UPT-UPT yang dikategorikan berhasil atau tidak berhasil juga menjadi penghambat dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan UPT.

Pembangunan UPT merupakan suatu proses kegiatan lima tahun yang dimulai dari tahap pembukaan dan penyiapan lahan, pembangunan sarana prasarana fisik permukiman, penyiapan lahan usaha, pembinaan usaha produksi hingga pengembangan kelembagaan masyarakat.

Untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan UPT dibutuhkan waktu paling sedikit 20 tahun (Jacquelin Desbarats, 1998). Namun sebenarnya indikasi keberhasilannya sudah dapat terlihat pasca pembinaan lima tahun apakah UPT ini termasuk UPT bermasalah/tidak berkembang atau UPT yang sudah bisa mandiri dalam arti mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan. Kriteria mandiri ini diantaranya adalah setiap kepala keluarga transmigran telah mempunyai pendapatan sekurang-kurangnya setara dengan 3.000 kg beras atau minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan di dalam lokasi tersebut telah mempunyai lembaga ekonomi/koperasi atau sejenisnya yang berbadan hukum dan berjalan dengan baik.

Pada umumnya UPT yang masih dalam masa pembinaan Pemerintah masih mampu terus memproduksi karena didukung input berupa bantuan seperti jaminan hidup (jadup), bibit, dan sarana produksi pertanian namun setelah pasca pembinaan atau setelah diserahkan kepada pemerintah daerah banyak UPT yang gagal dan bahkan menjadi desa tertinggal yang kemudian ditinggal oleh para

transmigran. Jumlah UPT yang masih dibina ini cukup banyak. Kata “dibina” dalam hal ini bermakna bahwa UPT tersebut belum mampu mandiri sesuai dengan target yang direncanakan).

Berdasarkan data jumlah UPT Bina menurut status umur per April 2007 yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terdapat 383 UPT yang masih dibina dimana 231 UPT (60 persen) diantaranya status pembinaannya sudah lebih dari batas masa pembinaan yaitu lebih dari lima tahun $> T + 5$. Pembinaan di atas lima tahun mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan yang belum bisa terselesaikan dalam kurun waktu tersebut. Terjadinya permasalahan yang belum terselesaikan tersebut-lah yang menjadikan status UPT Bina menjadi status UPT Tertinggal.

Masalah-masalah yang dimaksudkan sebagai kriteria dalam penentuan sebagai UPT Tertinggal antara lain: i) tidak memiliki batas-batas fisik wilayah yang jelas; ii) legalitas lahan tidak jelas, lahan diokupasi, dan atau tumpang tindih dengan kawasan hutan/peruntukan lain; iii) sarana, prasarana, atau fasilitas umum tidak lengkap atau mengalami kerusakan, iv) perangkat pemerintahan desa belum definitif sesuai ketentuan yang berlaku; v) seluruh atau sebagian Kepala Keluarga transmigran belum memiliki lahan pekarangan dan lahan usaha dengan sertifikat hak milik; dan lain-lain (Kemenakertrans, 2007).

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam kegiatan sebuah UPT mengakibatkan dibutuhkan sebuah rumusan yang tepat terhadap akar permasalahan yang sebenarnya terjadi. Salah satu contoh dari sekian banyak permasalahan UPT adalah kegagalan kegiatan usaha ekonominya.

Kegagalan usaha ekonomi ini adalah merupakan akibat dari permasalahan-permasalahan baik terkait dari lahan produksi pertaniannya itu sendiri, ketersediaan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, legalitas lahan, keberadaan kelembagaan ekonomi atau bahkan pasar bagi pemasaran hasil produksi pertanian itu sendiri.

Sebagai contoh dalam beberapa kasus berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketramigrasian dengan mengambil objek penelitian di lokasi UPT lahan gambut di Kawasan Palingkau dan Dadahup Basah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan

beberapa kondisi seperti kondisi fisik UPT dimana jalan, jembatan dan gorong-gorongnya rusak bahkan di UPT Palingkau SP. 1 dan Dadahup B2 hampir seluruh jembatan dan gorong-gorong menuju lahan usaha tidak ada, kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam membawa sarana produksi atau hasil panen baik dari lahan menuju rumah ataupun sebaliknya. Permasalahan lainnya terkait kondisi tata air di lokasi tersebut, banjir yang secara rutin terjadi di kawasan dadahup rutin terjadi setiap tahun. Lama banjir bervariasi antara satu sampai empat bulan/tahun secara terus menerus dengan kedalaman bervariasi antara 0.75 meter hingga 1.5 meter. Tingkat kemasaman tanah juga menjadi pemicu kegagalan usaha produksi di kawasan ini dimana sebagian lokasi tingkat kemasaman lahannya tinggi yang membuat lahan menjadi tidak subur.¹

Seperti telah digambarkan di atas. apa yang menjadi penyebab dari ketertinggalan sebuah UPT kemungkinan faktornya cukup banyak sehingga dibutuhkan suatu penanganan yang cepat dengan merumuskan secara tepat akar permasalahan yang sebenarnya sebagai dasar dalam penentuan skala prioritas kebijakan penyelesaian permasalahan pada UPT-UPT tersebut. Salah satu dari sekian banyak UPT tertinggal/bermasalah adalah UPT Gajah Mati SP.6 di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Perumusan Masalah

UPT Lokasi Gajah Mati SP. 6 secara administratif terletak di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penempatan awal transmigran di lokasi ini dimulai pada tahun 2006 dengan jumlah awal 118 KK selanjutnya 113 KK, dan pada tahun 2007 sebanyak 90 KK total keseluruhan penempatan transmigran di lokasi ini berjumlah 325 KK. Apabila dihitung sampai dengan saat ini berarti status umur pembinaan UPT tersebut sudah lebih dari 5 tahun atau tepatnya sudah masuk dalam tahun ke 6. Jenis dari UPT ini adalah transmigrasi umum (TU) dengan pola Tanaman Pertanian Lahan Basah (TPLB). Hingga saat ini UPT tersebut masih belum bisa diserahkan kepada Pemerintah Daerah diakibatkan UPT ini masih belum bisa

¹ Studi penanganan permasalahan UPT di kawasan PLG Provinsi Kalimantan Tengah, Danarti dkk., Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Badan Litbang dan Informasi, Depnakertrans, 2006.

mandiri (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi Pasal 56 disebutkan bahwa UPT yang siap diserahkan harus memenuhi kriteria layak serah dimana salah satunya ialah pola usaha yang ditetapkan telah berkembang).

Berdasarkan hasil laporan inventarisasi permasalahan permukiman tahun 2011 pada Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat beberapa permasalahan khususnya terkait ketersediaan sarana prasarana dalam lokasi ini. Beberapa sarana prasarana yang ada seperti jalan poros, gudang, jembatan dan gorong-gorong kesemuanya dalam kondisi rusak dengan skala kerusakan yang berbeda-beda. Sementara aspek legalitas lahannya belum bisa diselesaikan sehingga transmigran belum memiliki sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha yang mengganggu kepastian usahanya.

Untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan yang terjadi pada lokasi tersebut serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya maka perlu diketahui dan diteliti sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini, ialah:

1. Apakah yang menjadi permasalahan utama penyebab ketertinggalan pembangunan UPT Gajah Mati SP. 6 di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan?; dan
2. Langkah apa saja yang dapat diambil guna menyelesaikan permasalahan yang ada di UPT tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada UPT Gajah Mati SP.6 di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan melalui proses penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penyebab ketertinggalan UPT tersebut; dan
2. Merumuskan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan berdasarkan prioritas permasalahan.

1.4. Ruang Lingkup/Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam lokasi ini serta upaya penyelesaiannya berdasarkan skala prioritas permasalahan. Wilayah penelitian yaitu Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Gajah Mati SP. 6 Kecamatan Sunagai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi khususnya bagi para penyelenggara pembangunan ketransmigrasian, pemangku kepentingan terkait dan bagi manfaat keilmuan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil studi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup kegiatan, dan sistematika penulisan;

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang konsep pembangunan transmigrasi, penyelenggaraan transmigrasi, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), Penanganan UPT tertinggal, studi-studi terkait, dan penggunaan model AHP.

Bab III Metodologi

Bab ini memuat tentang kerangka pikir konseptual, model AHP, strategi penanganan UPT tertinggal, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data.

Bab IV Gambaran Umum Wilayah

Bab ini berisi mengenai gambaran wilayah lokasi penelitian dari berbagai aspek dan permasalahan, antara lain mencakup kondisi geografi, kondisi perekonomian, aspek demografi, dan lain-lain..

Bab V Analisa Data Dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang proses dan hasil analisa data dengan menggunakan Model AHP.

Bab V Penutup

Bab ini tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi dan keterbatasan studi



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pembangunan Transmigrasi

Transmigrasi (dalam kamus Webster dan Oxford) diartikan sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga mempunyai pengertian yang hampir sama dengan migrasi namun pengertian transmigrasi terkait pembangunan bangsa Indonesia disamping pengertian tersebut diatas juga memiliki pengertian yang khas sebagai berikut : Transmigrasi adalah pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.¹

Terkait dengan alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah atau yang melatar belakangnya bisa dari berbagai macam kondisi seperti penyelenggaraan transmigrasi yang diakibatkan oleh konflik horizontal seperti konflik antar suku atau bencana alam.

Pada masa sekarang ini pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian didasarkan pada beberapa tujuan (*multi purpose*), yaitu: 1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitarnya, 2) mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan 3) memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga tujuan ini memiliki sasarannya masing-masing yang apabila diuraikan program ini memiliki sasaran baik dari peningkatan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran, kemandirian, dan integrasi yang berjalan dengan baik antara transmigran dan masyarakat sekitar permukiman sehingga diharapkan faktor ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara seimbang dan berkelanjutan. Dengan ketiga tujuan tersebut jelas bahwa konsep pembangunan transmigrasi memiliki nuansa demografi, sosial ekonomi, serta politik sekaligus.

¹ Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER. 115/MEN/1992 tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan Transmigrasi, Departemen Transmigrasi RI Hal 2. B. Pengertian dasar transmigrasi

Nugraha Setiawan (2011), peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Padjadjaran (UNPAD) menyatakan bahwa walaupun secara demografis pengertian umum dari transmigrasi ini tetap sama dari masa ke masa, yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang kurang atau jarang penduduknya tetapi dalam pelaksanaan dewasa ini, pelaksanaan program transmigrasi lebih didasarkan pada latar belakang yang mendasari, tujuan, dan kebijakan yang berbeda-beda.

2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Transmigrasi

Arah kebijakan pembangunan bidang ketransmigrasian seperti yang tertuang dalam kebijakan dan strategi Kemenakertrans tahun 2010 adalah terdiri dari 4 (empat) kebijakan yaitu:

- a) Kebijakan penyiapan permukiman yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah tertinggal, wilayah strategis dan cepat tumbuh. Strategi yang ditempuh dalam kebijakan ini ialah peningkatan kualitas pembangunan permukiman, pengintegrasian pembangunan transmigrasi baru melalui pemugaran permukiman penduduk setempat, meningkatkan pelayanan investasi di kawasan tersebut dan kebijakan permukiman yang diprioritaskan kepada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pola Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB).
- b) Kebijakan fasilitasi perpindahan transmigrasi yang diarahkan untuk menyediakan sumberdaya manusia berkualitas yang terintegrasi dengan penataan persebaran penduduk di permukiman transmigrasi dalam artian sumber daya transmigran yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam wilayah permukiman yang sudah terintegrasi. Strategi yang ditempuh adalah penyempurnaan perencanaan satuan permukiman sebagai dasar dari kerjasama antar daerah (KSAD), serta peningkatan kualitas transmigran itu sendiri.
- c) Kebijakan pengembangan masyarakat transmigrasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas serta membangun kemandirian masyarakat. Strategi yang ditempuh untuk mendukung

kebijakan tersebut adalah peningkatan bantuan pangan, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan spiritual dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat sekitar.

- d) Kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi yang diarahkan untuk terbentuknya pusat pertumbuhan/perkotaan baru melalui revitalisasi kawasan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Strategi yang ditempuh dalam mendukung kebijakan adalah mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi perkotaan, peningkatan kapasitas masyarakat dan sumber daya manusia (SDM) pengelola di kawasan transmigrasi, pengembangan komoditas unggulan berbasis agribisnis dan agro industri.

Apabila disimpulkan secara sederhana arah kebijakan pembangunan transmigrasi saat ini adalah upaya penataan kawasan transmigrasi dan wilayah sekitarnya secara lebih luas melalui pengembangan pola layanan sosial dan produksi yang lebih terintegrasi serta peningkatan kapasitas masyarakat secara keseluruhan baik transmigran maupun masyarakat sekitar lokasi permukiman transmigrasi.

2.3. Proses Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Paradigma Baru

Proses penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya adalah upaya pembangunan manusia secara menyeluruh dalam rangka pembentukan tata susunan masyarakat baru yang dilakukan melalui pelaksanaan program perpindahan penduduk dan menetap secara sukarela. Pada masa sekarang ini proses penyelenggaraan transmigrasi mengalami perubahan paradigma sebagai akibat perubahan situasi politik yang terjadi yaitu pelaksanaan otonomi daerah.

Pada era sebelumnya perencanaan pembangunan transmigrasi bersifat *top down* dimana pusat memiliki peran yang dominan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Hal itu mengakibatkan sistem perencanaannya bersifat sentralistik dengan menggunakan pendekatan dari sisi suplai dimana programnya adalah ditentukan (*given*). Namun di era otonomi daerah sekarang ini peran daerah menjadi lebih dikedepankan dengan cirinya adalah terjadinya proses Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dalam penyelenggaraan transmigrasi.

KSAD ini menjadi tahapan awal dalam proses penyelenggaraan transmigrasi dimana kerjasama dilakukan oleh dua pihak yakni daerah asal/pengirim dengan daerah tujuan/penerima. Kerjasama dilakukan oleh para Gubernur diwilayah masing-masing dimana kesepakatan Gubernur tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah Kabupaten untuk melakukan kerjasama dengan Kabupaten lainnya. Kerjasama antar daerah ini sebagai media yang mempertemukan sisi penawaran dan permintaan dalam proses penyelenggaraan transmigrasi. Bentuk kerjasama antar daerah ini diantaranya adalah *cost sharing* pembiayaan beberapa kegiatan pembangunan di lokasi permukiman dengan menggunakan dana anggaran daerah yang mereka miliki.

Dalam penyelenggaraannya sesuai pasal 6 UU 15/1997 tentang ketransmigrasian jenis transmigrasi dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB). Penyelenggaraan transmigrasi yang sepenuhnya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah disebut sebagai transmigrasi umum sedangkan penyelenggaraan transmigrasi yang timbul sebagai akibat dari daya tarik yang diciptakan oleh jenis transmigrasi sebelumnya atau transmigrasi umum disebut sebagai transmigrasi swakarsa mandiri. Transmigrasi Swakarsa Mandiri peranan aktifnya dilakukan oleh penduduk yang bertansmigrasi atau pihak swasta/lembaga non pemerintah. Sedangkan transmigrasi swakarsa berbantuan adalah penyelenggaraan transmigrasi yang dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta dimana bantuan pemerintah hanya sebatas agar kemitraannya menjadi layak.

Di dalam kegiatan usahannya, jenis usaha dalam permukiman transmigrasi dapat dibagi atas sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier. Sektor ekonomi primer adalah kegiatan pokok transmigran seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Sektor ekonomi sekunder dan tertier khususnya pada lokasi baru seperti industri pengolahan dan manufaktur di sektor sekunder dan perdagangan di sektor tersier yang lebih bersifat komplementer namun pada tahap pengembangan kegiatan usaha pokoknya bisa mencakup tidak hanya sektor primer namun juga sektor sekunder.

Terkait dengan kegiatan usaha pokoknya penyelenggaraan pembangunan transmigrasi memiliki beberapa pola yang disesuaikan dengan kegiatan usaha pokoknya seperti pola perkebunan, perikanan, pola hutan tanaman industri, peternakan dan lain-lain.

2.4. Tahapan Penyelenggaraan Transmigrasi

Secara garis besar penyelenggaraan transmigrasi adalah proses kegiatan pembangunan meliputi penyediaan sarana dan prasarana fisik/lingkungan, perpindahan penduduk dan pengembangan masyarakat sehingga terdapat beberapa tahapan penyelenggaraan. Tahapan awal ialah tahap penyiapan permukiman yang meliputi diantaranya penyiapan areal, penyiapan lahan usaha dan lahan pekarangan, sarana prasarana permukiman, pembangunan perumahan, drainase, sarana ibadah dll. Selanjutnya ialah tahap pengerahan dan penempatan yang meliputi kegiatan penyampaian informasi ketransmigrasian, pendaftaran dan seleksi, tahap pendidikan dan pelatihan, pelayanan penampungan dan pengangkutan.

Kemudian masuk dalam tahapan pembinaan yang dibagi menjadi : a) tahap penyesuaian, tahap penyesuaian adalah tahap adaptasi transmigran terhadap lingkungan barunya seperti jenis usaha tani, kondisi alam, musim, lingkungan masyarakat sekitar dan lain-lain. Secara umum sasaran yang harus dicapai pada akhir tahapan ini adalah transmigran mampu menguasai kegiatan produksi dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan barunya. b) Tahap pemantapan, tahapan ini adalah tahap dimana para transmigran telah bisa meningkatkan kemampuannya terutama dalam bidang usaha produksinya. Target dari akhir tahapan ini adalah terbentuknya kemandirian transmigran dalam usaha produksi sehingga tidak ada lagi subsidi atau bantuan yang diberikan. c) Tahap pengembangan, pada tahap ini masyarakat telah mampu melakukan intensifikasi dan diversifikasi kegiatan usaha pokoknya. Pembinaan yang dilakukan pemerintah atau mitra usaha lebih kepada pembinaan manajemen permukiman dan pengembangan sumber daya manusia. Target akhir dari tahapan ini adalah masyarakat transmigran telah mampu mencapai sasaran dari pembangunan transmigrasi itu sendiri yaitu tingkat kehidupan yang mandiri dalam arti mampu

mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna meningkatkan dan mengembangkan kehidupannya. Secara keseluruhan tahapan-tahapan ini direncanakan dalam jangka waktu lima tahun dimana pada tahap penyesuaian memakan waktu 1,5 tahun, tahap pemantapan 1,5 tahun dan tahap pengembangan selama 2 tahun. Tahapan terakhir adalah tahap penyerahan UPT, setelah lima tahun atau selesai masa pembinaan UPT kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan telah layak serah.

2.5. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tertinggal

Satuan Permukiman Transmigrasi atau UPT adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada umumnya dalam satu satuan/unit permukiman luasan lahannya dapat mencapai 500-2000 ha dengan daya tampung sebesar 300-500 KK. Proporsi lahan tersebut diperuntukkan untuk lahan usaha, lahan pekarangan, perumahan dan sarana sosial seperti rumah ibadah, puskesmas pembantu, sekolah, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan UPT tertinggal adalah permukiman transmigrasi dengan umur penempatan lebih dari lima tahun dan belum memenuhi kriteria pengakhiran status UPT atau dapat dikatakan belum mampu mandiri atau dikategorikan sebagai UPT yang belum layak serah. Layak serah disini merujuk pada peraturan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang isinya adalah bahwa “Penyerahan pembinaan permukiman transmigrasi transmigrasi untuk transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa berbantuan, dilaksanakan untuk setiap satuan permukiman, setelah memenuhi layak serah atau selambat-lambatnya lima tahun”. Kriteria layak serah merujuk pada kriteria pengakhiran status UPT bina yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyerasian Lingkungan, Kemenakertrans.

Tabel 2.1.

Kriteria Pengakhiran Status UPT Bina dan Kriteria UPT Tertinggal

No.	Kriteria Pengakhiran Status UPT Bina	Kriteria UPT Tertinggal
1	Batas Wilayah	
	<p>a. Mempunyai batas wilayah yang jelas ditandai dengan pemasangan pilar/patok batas UPT, dilengkapi dengan peta batas wilayah dengan koordinat yang baku;</p> <p>b. Mempunyai legalitas lahan yang jelas dari Gubernur atau Bupati, tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan dan peruntukan lain, serta tidak ada okupasi lahan/klaim dari pihak lain.</p>	<p>a. Tidak memiliki batas-batas fisik wilayah yang jelas</p> <p>b. Legalitas lahan tidak jelas, lahan diokupasi, dan atau tumpang tindih dengan kawasan hutan/peruntukan lain</p>
2.	Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Umum	
	<p>a. Jalan penghubung, jalan poros, jalan desa dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2 pada waktu musim hujan dan musim kemarau;</p> <p>b. Jembatan berfungsi dengan baik;</p> <p>c. Gorong-gorong berfungsi dengan baik;</p> <p>d. Dermaga berfungsi dengan baik;</p> <p>e. Sarana air bersih berfungsi dengan baik;</p> <p>f. Kantor KUPT, kantor Kepala Desa beserta perlengkapannya telah tersedia dan berfungsi dengan baik;</p> <p>g. Balai desa, pasar, rumah pos, gudang, rumah ibadah harus sudah tersedia dan berfungsi dengan baik;</p> <p>h. Pustu/balai pengobatan tiap UPT harus ada 1 unit Pustu/balai pengobatan dengan 4 orang tenaga medis yang dilengkapi kesehatan KB dan peralatan Pustu;</p> <p>i. Gedung sekolah: tiap UPT harus ada 1 unit bangunan Sekolah Dasar dengan 7 lokal dan 7 orang pengajar yang dilengkapi</p>	<p>a. Sarana, Prasarana, atau fasilitas umum tidak lengkap atau mengalami kerusakan</p>

(Sambungan tabel 2.1)

No.	Kriteria Pengakhiran Status UPT Bina	Kriteria UPT Tertinggal
	<p>peralatan/perlengkapan pendidikan;</p> <p>j. Tanah kuburan, lapangan olah raga telah tersedia dan layak di pakai;</p>	
3.	Tanah Kas Desa	
	Tersedia tanah kas desa seluas 10 ha yang telah disertifikatkan, dikembangkan dan berproduksi.	Khusus UPT yang akan menjadi desa baru : Tidak tersedia tanah kas desa, atau tanah kas desa belum disertifikasi atau belum dikembangkan
4.	Organisasi Pemerintahan Desa	
	<p>a. Perangkat Pemerintahan desa sudah definitif sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sudah terbentuk sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan berjalan lancar</p>	<p>a. Perangkat Pemerintahan desa belum definitif sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan desa belum tersusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan berjalan lancar</p>
5.	Jumlah Penduduk	
	<p>a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Bab II Pasal 2 (2a), pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk sekurang-kurangnya 200 KK untuk Kalimantan, NTB, NTT, Maluku dan Papua serta 300 KK bagi Jawa dan Bali;</p> <p>b. Penduduk yang kurang dari ketentuan tersebut diusulkan sebagai desa/dusun dan menginduk kepada desa terdekat.</p>	Khusus UPT yang akan menjadi desa baru: Jumlah penduduk sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Bab II Pasal 2 (2a), pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk sekurang-kurangnya 200 KK untuk Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua; serta 300 KK bagi Jawa dan Bali
6.	Lahan	
	Setiap Kepala Keluarga transmigran telah memiliki lahan pekarangan dan Lahan Usaha dengan sertifikat hak milik.	Seluruh atau sebagian Kepala Keluarga transmigran belum memiliki Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha dengan

(Sambungan tabel 2.1)

No.	Kriteria Pengakhiran Status UPT Bina	Kriteria UPT Tertinggal
		sertifikat hak milik
7.	Kelembagaan Ekonomi	
	Telah mempunyai koperasi/lembaga ekonomi/tempat pelayanan koperasi atau sejenisnya yang berbadan hukum dan berjalan dengan baik.	Belum mempunyai koperasi/lembaga ekonomi/tempat pelayanan koperasi atau sejenisnya yang berbadan hukum dan berjalan dengan baik
8.	Pendapatan Transmigran	
	Setiap kepala keluarga transmigran telah mempunyai pendapatan sekurang-kurangnya setara dengan 3.000 Kg beras atau minimal sama dengan upah minimum regional	Pendapatan rata-rata transmigran kurang dari 3.000 Kg beras atau kurang dari Upah Minimum Regional
9.	Kesesuaian Pola Usaha	
	Usaha yang dikembangkan saat ini sesuai dengan pola usaha yang direncanakan	Lahan mengalami permasalahan fisik sehingga tidak memenuhi kriteria layak usaha dan atau layak huni

Sumber : *Strategi Pemberdayaan UPT Binaan Tertinggal, Biro Perencanaan, Kemenakertrans, 2007*

Berdasarkan tabel di atas, kriteria UPT tertinggal adalah UPT yang belum memenuhi seluruh kriteria pengakhiran status UPT bina atau sebaliknya permukiman transmigrasi disebut sebagai UPT tertinggal apabila memenuhi salah satu kriteria UPT tertinggal di atas. Penanganan UPT tertinggal ini didasarkan pada pertimbangan yuridis maupun pertimbangan empiris yang terjadi pada lokasi tersebut. Pertimbangan yuridis diantaranya adalah Pasal 34 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yaitu “Setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya lima tahun sejak penempatan transmigran, pembinaan permukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan fakta empirisnya ialah keadaan yang terjadi dalam UPT tersebut yang harus segera ditangani. Upaya-upaya yang dilakukan hingga sekarang ini dalam menyelesaikan permasalahan UPT tertinggal ini adalah umumnya dengan melakukan rehabilitasi fisik/infratraktur baik ringan, sedang maupun berat sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam lokasi tersebut.

2.6. Teori *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimalkan ke dalam suatu proses sistematis.

AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif yang ada ketika beberapa kriteria harus dipertimbangkan, serta mengizinkan pengambil keputusan (*decision makers*) untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu bentuk hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi.

Pada dasarnya AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi.

AHP banyak digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hal perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber daya, penentuan kebutuhan, peramalan hasil, perencanaan hasil, perencanaan sistem, pengukuran performansi, optimasi, dan pemecahan konflik.

The Analytic Hierarchy Process adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya². Saaty menyebutkan bahwa *the analytic hierarchy process (AHP) is a theory of measurement*³.

Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Dengan menyusun hirarki suatu masalah

² Bambang Permadi S, "AHP", PAU-EK-UI, Jakarta, 1992

³ Disampaikan Prof. Saaty pada symposium PAU-EK-UI Jakarta bulan Desember 1989 (Dr. Iwan Jaya Azis, Laporan penelitian : pendekatan "multicriteria decision making" : analytic hierarchy process, PAU-EK-UI, 1990/1991)

yang kompleks dan tidak terstruktur kemudian dipecah ke dalam kelompok-kelompok untuk diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

Perbedaan AHP dengan model pengambilan keputusan yang lain adalah terletak pada jenis inputnya. Model yang sudah ada umumnya memakai input data kuantitatif atau data sekunder, sedang model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap “ekspert” sebagai input utamanya. Ekspert disini lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa *model AHP adalah suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif, karena dapat memperhitungkan hal-hal kuantitatif dan kualitatif sekaligus (Bambang, 1992).*

2.6.1. Prinsip-prinsip Pokok AHP .

Prinsip-prinsip pokok AHP terdiri atas 4 (empat) prinsip dasar, yaitu:

a. *Decomposition*

Setelah persoalan didefinisikan, tahapan yang perlu dilakukan adalah *decomposition* yaitu memecah persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya.

Melalui proses dekomposisi, persoalan yang utuh dipecah ke dalam unsur-unsur yang homogen hingga menjadi terpisah dan menghasilkan suatu hirarki. Jika hasil yang diperoleh ingin lebih akurat, maka pemecahan dilakukan sampai unsur-unsur tadi tidak mungkin dipecah lagi. Ada dua jenis hirarki yaitu lengkap dan tak lengkap. Disebut hirarki lengkap jika semua unsur ada pada tingkat berikutnya, jika tidak demikian, hirarki yang terbentuk dinamakan hirarki tidak lengkap.

b. *Comparative Judgement*

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan kriteria di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh dalam menentukan prioritas dari elemen-elemen yang ada

sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil dari penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

c. *Synthesis of Priority*

Dari setiap matriks *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) kemudian dicari *eigenvector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan untuk mendapatkan *local priority* karena matriks perbandingan berpasangan terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesis di antara *local priority*. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesis dinamakan *priority setting*. *Global priority* adalah prioritas/bobot subkriteria maupun alternatif terhadap tujuan hirarki secara keseluruhan/level tertinggi dalam hirarki. Cara mendapatkan *global priority* ini dengan cara mengalikan *local priority* subkriteria maupun alternatif dengan prioritas dari *parent criterion* (kriteria level di atasnya).

d. *Logical Consistency*

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Contohnya, anggur dan kelereng dapat dikelompokkan sesuai dengan himpunan yang seragam jika “bulat” merupakan kriterianya. Tetapi tidak dapat jika “rasa” sebagai kriterianya. Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Contohnya jika manis merupakan kriteria dan madu dinilai 5 kali lebih manis dibanding gula, dan gula 2 kali lebih manis dibanding sirup, maka seharusnya madu dinilai 10 kali lebih manis dibanding sirup. Jika madu dinilai 4 kali manisnya dibanding sirup, maka penilaian tidak konsisten dan proses harus diulang jika ingin memperoleh penilaian yang lebih tepat.

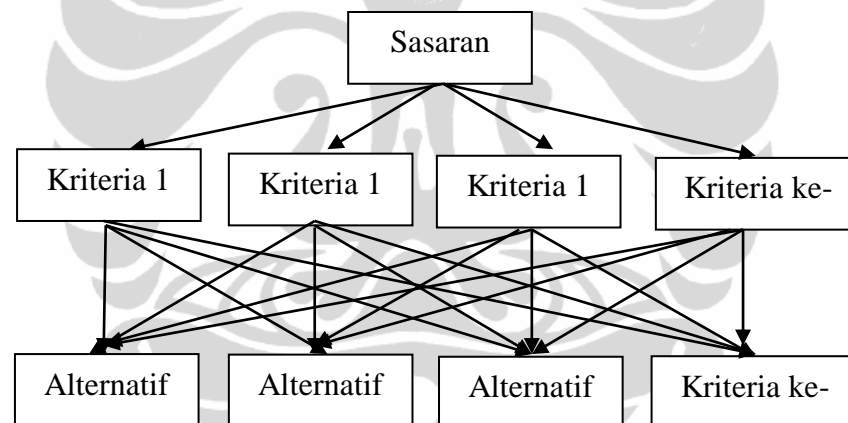
Dalam menggunakan keempat prinsip tersebut, AHP menyatukan dua aspek pengambilan keputusan yaitu :

- a. Secara kualitatif AHP mendefinisikan permasalahan dan penilaian untuk mendapatkan solusi permasalahan.
- b. Secara kuantitatif AHP melakukan perbandingan secara numerik dan penilaian untuk mendapatkan solusi permasalahan.

2.6.2. Tahapan Penggunaan AHP

a) Penyusunan Hirarki Permasalahan

Permasalahan yang kompleks dapat dipecahkan atau dengan mudah dipahami apabila kita mampu mengurai permasalahan tersebut menjadi elemen-elemen tertentu yang disusun menjadi sebuah struktur hirarki.



Gambar 2.1 Struktur Hirarki AHP

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994

Hirarki permasalahan disusun untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan seluruh elemen yang terdapat dalam susunan hirarki tersebut.

Pada tingkat tertinggi dalam suatu susunan hirarki ialah tujuan atau sasaran dimana tujuan ini merupakan solusi pemecahan masalah. Selanjutnya adalah elemen yang merupakan penjabaran dari sasaran tersebut. Sebuah elemen menjadi patokan dari elemen-elemen dibawahnya yang sejenis. Penyusunan hirarki tersebut dalam hal ini

elemen-elemen yang berda didalamnya disusun tergantung pada kemampuan pengguna dalam memahami permasalahan. Agar kriteria-kriteria yang dibentuk sesuai dengan tujuan permasalahan, maka kriteria-kriteria tersebut harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut:

1) Minimum

Jumlah kriteria diusahakan optimal atau tidak terlalu banyak untuk memudahkan analisis.

2) Independen

Setiap kriteria tidak saling tumpang tindih dan bukan merupakan suatu pengulangan kriteria untuk maksud yang sama.

3) Lengkap

Kriteria harus mencakup seluruh aspek penting dalam permasalahan.

4) Operasional

Kriteria harus dapat diukur dan dianalisis baik secara kuantitatif dan kualitatif.

b) Penentuan Prioritas

1) *Relative Measurement*

Dasar dari penghitungan model AHP dalam menetapkan prioritas dalam suatu pengambilan keputusan adalah dengan melakukan perbandingan terhadap dua hal berdasarkan kriteria yang sama dengan menggunakan skala rasio yang selanjutnya akan menjadi input dasar model ini. Batas skala yang dianggap mewakili persepsi manusia dalam model AHP adalah 1 sampai 9.

Dalam perbandingan berpasangan ini digunakan matriks untuk membantu perbandingan ini serta memberikan kerangka untuk menguji konsistensinya. Rancangan matriks ini mencerminkan dua segi prioritas yaitu mendominasi dan didominasi.

Apabila seseorang telah memasukkan persepsinya untuk setiap perbandingan antara elemen-elemen yang berada dalam satu level

atau yang dapat diperbandingkan, maka untuk mengetahui elemen mana yang paling disukai atau paling penting maka disusun sebuah matriks perbandingan (*pairwise comparison*).

Misalkan terdapat suatu subsistem hirarki dengan kriteria X dan sejumlah n subkriteria dibawahnya, A_i sampai A_n . Perbandingan antara subkriteria dalam sebuah bentuk hirarki itu dapat dibuat dalam bentuk matriks $n \times n$, seperti tabel dibawah ini

Tabel 2.2.
Matriks Perbandingan Berpasangan

X	A_1	A_2	A_3	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}		a_{1n}
A_2	A_{21}	A_{22}	A_{23}		A_{2n}
A_3	a_{13}	A_{23}	A_{33}		A_{3n}
.....				
A_n	a_{n1}	a_{n2}	a_{n3}	a_{nn}

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994

Nilai a_{11} adalah nilai perbandingan elemen A_1 (baris) terhadap A_1 (kolom) yang menyatakan hubungan :

- 1) Seberapa jauh tingkat kepentingan A_1 (baris) terhadap kriteria X dibandingkan dengan A_1 (kolom), atau
- 2) Seberapa jauh dominasi A_1 (baris) terhadap A_1 (kolom), atau
- 3) Seberapa banyak sifat kriterfia X terdapat pada A_1 (baris) dibandingkan dengan A_1 (kolom).

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh dari skala perbandingan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.
Skala Penilaian Perbandingan

Skala Tingkat Kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama Pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit Lebih Penting	Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Lebih Penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
7	Sangat Penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan pasangannya
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya pada tingkat keyakinan yang tertinggi
2,4,6,8	Nilai Tengah	Diberikan bila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan
Kebalikan	$A_{ij} = 1/A_{ji}$	Bila aktivitas i memperoleh suatu angka a_{ij} bila dibandingkan dengan aktivitas j , maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan i

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994

Setelah matriks perbandingan untuk sekelompok elemen terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mengukur bobot prioritas setiap elemen tersebut dengan dasar persepsi seorang ekspert yang telah dimasukkan dalam matrik tersebut. Perhitungan bobot dapat

dilakukan secara manual (apabila matriksnya berukuran 2 X 2) ataupun dengan cara operasi matematis berdasarkan operasi matriks dan vector yang dikenal dengan *eigenvector* dengan menggunakan suatu program komputer. Dalam penelitian ini software yang digunakan adalah expert choice windows.

2) *Eigenvector* dan *Eigenvalue*

Apabila seseorang yang sudah memasukkan persepsinya untuk setiap perbandingan antara kriteria-kriteria yang berada dalam satu level (tingkat) atau yang dapat diperbandingkan maka untuk mengetahui kriteria mana yang paling disukai atau yang paling penting disusun sebuah matriks perbandingan. Bentuk matrik ini adalah simetris atau biasa disebut matriks bujur sangkar dimana jumlah baris dan kolomnya tergantung pada banyaknya elemen dalam satu level. Sebagai contoh apabila ada tiga elemen yang dibandingkan dalam satu tingkat, maka matriks yang terbentuk adalah matrik 3 X 3.

Ciri utama matrik pada AHP ini adalah elemen diagonal dari kiri atas ke kanan bawah adalah satu, karena yang diperbandingkan adalah dua elemen yang sama. Selanjutnya matriks ini disesuaikan dengan logika manusia dimana apabila kriteria A lebih disukai dengan skala 3 dibandingkan kriteria B maka dengan sendirinya kriteria B lebih disukai dengan skala 1/3 dibandingkan A atau bersifat resiprokal.

Setelah matriks perbandingan untuk sekelompok kriteria perbandingan untuk sekelompok kriteria telah selesai dibentuk maka langkah berikutnya adalah mengukur bobot prioritas setiap kriteria tersebut dengan dasar persepsi seorang ahli yang telah dimasukkan dalam matriks tersebut. Hasil akhir perhitungan bobot prioritas tersebut merupakan suatu bilangan desimal dibawah satu dengan total prioritas untuk kriteria-kriteria dalam satu kelompok sama dengan satu. Dalam penghitungan bobot prioritas dipakai cara

yang paling akurat untuk matriks perbandingan yaitu operasi matematis berdasarkan operasi matriks dan *vector* yang dikenal dengan nama *eigenvector*.

Eigenvector adalah sebuah vektor yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks hasilnya adalah vektor itu sendiri dikalikan dengan sebuah bilangan skalar atau parameter yang tidak lain adalah *eigenvalue*. Vektor ini bersama-sama dengan suatu matriks digunakan dalam operasi matematis untuk mencari bobot prioritas yang lebih akurat pada suatu matriks perbandingan. Persamaan yang digunakan dalam operasi ini adalah:

$$A \cdot w = \lambda \cdot w \quad (3.1)$$

dimana :

A = Matrik *Pairwise Comparison*

λ = *Eigenvalue*

w = *Eigenvector*

Eigenvector ini biasa disebut sebagai vektor karakteristik dari sebuah matriks bujur sangkar, sedangkan *eigenvalue* merupakan akar karakteristik dari matriks tersebut. Metode inilah yang akhirnya dipakai sebagai alat pengukur bobot prioritas setiap matriks perbandingan dalam model AHP karena sifatnya yang lebih akurat dan memperhatikan semua interaksi antara elemen dan matriks. Kelemahan metode ini adalah sulit dikerjakan secara manual terutama apabila matriksnya terdiri dari tiga kriteria atau lebih sehingga memerlukan bantuan program komputer untuk memecahkannya.

3) Konsistensi

Salah satu asumsi utama model AHP yang membedakannya dengan model-model pengambilan keputusan yang lain adalah tidak

adanya syarat konsistensi mutlak. Hal ini dikarenakan dalam model AHP yang memakai persepsi manusia sebagai inputnya, maka ketidakkonsistenan itu mungkin terjadi karena manusia mempunyai keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten terutama kalau harus membandingkan banyak elemen.

Pengukuran konsistensi dalam model AHP dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah mengukur konsistensi setiap matriks perbandingan, dan tahap kedua mengukur konsistensi keseluruhan hirarki.

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan atas *eigenvalue* maksimum. Dengan *eigenvalue* maksimum, inkonsistensi yang biasa dihasilkan matriks perbandingan dapat diminimumkan.

Rumus dari indeks konsistensi (*Consistency Index/CI*) adalah :

$$CI = \frac{(\lambda \text{ maks} - n)}{(n - 1)} \quad (3.2)$$

dengan

CI	=	Indeks Konsistensi
λ maks	=	<i>eigenvalue</i> maksimum
n	=	Ukuran/orde matriks

Dengan λ merupakan *eigenvalue* dan n ukuran matriks, *eigenvalue* maksimum suatu matriks tidak akan lebih kecil dari nilai n sehingga tidak mungkin ada nilai CI negative. Makin dekat *eigenvalue* maksimum dengan besarnya matriks, makin konsisten matriks tersebut dan apabila sama besarnya maka matriks tersebut konsisten 100 persen atau inkonsisten 0 persen. Dalam pemakaian sehari-hari CI tersebut biasa disebut indeks inkonsistensi.

Indeks inkonsistensi di atas kemudian diubah ke dalam bentuk diubah ke dalam bentuk rasio inkonsistensi dengan cara membaginya dengan suatu indeks random. Indeks random menyatakan rata-rata konsistensi dari matriks mperbandingan berukuran 1 sampai 10 yang didapatkan dari suatu eksperimen oelh Oak Ridge National Laboratory dan kemudian dilanjutkan oleh Wharton School

Random Consistency Index (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

Sumber : *Thomas L. Saaty, 1994*

$$CR = CI/RI$$

$$CR = \text{Rasio Konsistensi}$$

$$RI = \text{Indeks Random (Random Consistency Index)}$$

Selanjutnya konsistensi responden dalam mengisi kuesioner diukur. Pengukuran konsistensi ini dimaksudkan untuk melihat ketidakkonsistenan respon yang diberikan. Jika $CR < 0,1$ maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan konsisten. Jika $CR > 0,1$ maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan tidak konsisten. Sehingga jika tidak konsisten, maka pengisian nilai-nilai pada matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif harus diulang.

4) Sintesis Prioritas

Untuk memperoleh perangkat prioritas yang menyeluruh bagi suatu persoalan keputusan, diperlukan suatu pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan suatu bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas suatu elemen.

Langkah yang pertama adalah menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom kemudian membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi. Normalisasi ini dilakukan untuk mempertimbangkan unit kriteria yang tidak sama. Yang terakhir adalah merata-ratakan sepanjang baris dengan menjumlahkan semua nilai dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi tersebut dan membaginya dengan banyak entri dari setiap baris sehingga sintesis ini menghasilkan persentase prioritas relatif yang menyeluruh.

2.6.3. Aksioma-Aksioma AHP

Dalam menggunakan model AHP perlu diperhatikan aksioma-aksioma yang dimiliki model ini. Pengertian aksioma sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah kebenarannya atau pasti terjadi. Ada empat buah aksioma yang harus diperhatikan dalam model AHP karena pelanggaran dari tiap aksioma berakibat tidak validnya model yang dipakai. Keempat aksioma tersebut adalah :

- a. *Reciprocal comparison*, pengambil keputusan harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensinya harus memenuhi syarat resiprokal yaitu kalau A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$;
- b. *Homogeneity*, preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemen dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogen dan harus dibentuk suatu *cluster* (kelompok elemen-elemen) yang baru;
- c. *Independence*, preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh pilihan obyektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah keatas, artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam suatu level dipengaruhi atau tergantung pada elemen-elemen dalam level di atasnya.

- d. *Expectations*, maksudnya adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau obyektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dapat dianggap lengkap.

Tidak terpenuhinya aksioma 1 menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk menyatakan preferensi dari sepasang elemen yang dibandingkan tidak tepat atau tidaki jelas. Aksioma 2 menjelaskan keterbatasan otak manusia dalam membuat perbandingan-perbandingan terutama untuk elemen-elemen yang kurang jelas hubungannya satu sama lain atau perbedaan yang terlalu besar. Pelanggaran terhadap aksioma 3 tidak seperti aksioma lainnya dimungkinkan dalam AHP dengan bentuk hirarki non linier. Dalam hirarki non linier ini mungkin terjadi hubungan timbal balik antara kriteria dan alternatif, sehingga mungkin saja pemilihan kriteria dipengaruhi oleh alternatif. Pemecahan masalah ini adalah dengan generalisasi model AHP dengan metode super matriks. Aksioma 4 menyiratkan ekspektasi dan persepsi manusia yang lebih menonjol dari rasionalitas dalam menyatakan preferensi

2.6.4. Kelebihan dan Kelemahan AHP

Kelebihan dari metode AHP dalam pemecahan persoalan dan pengambilan keputusan adalah:

a. Kesatuan

AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan tak terstruktur.

b. Kompleksitas

AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.

c. Saling ketergantungan

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.

d. Penyusunan hirarki

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

e. Pengukuran

AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan wujud suatu model untuk menetapkan prioritas.

f. Konsistensi

AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas.

g. Sintesis

AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

h. Tawar-menawar

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

i. Penilaian dan konsensus

AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda.

j. Pengulangan proses

AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Di samping kelebihan-kelebihan di atas, terdapat pula beberapa kesulitan dalam menerapkan metode AHP ini. Apabila kesulitan-kesulitan tersebut tidak dapat diatasi, maka dapat menjadi kelemahan dari metode AHP dalam pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan dalam menerapkan metode ini ialah :

- a. AHP tidak dapat diterapkan pada suatu perbedaan sudut pandang yang sangat tajam/ekstrim di kalangan responden.
- b. Metode ini mensyaratkan ketergantungan pada sekelompok ahli sesuai dengan jenis spesialis terkait dalam pengambilan keputusan.

- c. Responden yang dilibatkan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang permasalahan serta metode AHP.

Menurut Bambang (1992), kelebihan dan kelemahan metode AHP bisa dijelaskan apabila dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lain. Kelebihan dan kelemahan tersebut adalah :

- a. Kelebihan

1. Dapat mengolah hal-hal yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
2. Mampu memecahkan masalah yang multiobjectives dan multicriterias karena fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarkinya;
3. Bentuknya yang sederhana, cocok untuk para pengambil keputusan tingkat tinggi yang biasanya orang-orang sibuk, karena AHP dapat dengan cepat dimengerti dan mudah melakukan analisis sensitivitasnya;
4. Sifatnya demokratis karena masyarakat dimungkinkan turut serta dalam proses perencanaan yang dibangun dengan menggunakan model ini.

- b. Kelemahan

1. Hasil akhir model ini sangat tergantung kepada ekspert sedang kriteria yang jelas untuk seorang ekspert belum ada (subyektif);
2. Karena bentuknya terlalu sederhana, para pengambil keputusan yang terbiasa dengan model kuantitatif yang rumit menganggap model ini kurang cocok untuk pengambilan keputusan.

2.7. Pemilihan Metode AHP dalam Penelitian

Pemilihan metode AHP dalam penelitian ini didasarkan pada kegunaan dan kelebihan metode itu sendiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang kompleks dan dalam merumuskan kebijakan yang tepat berdasarkan skala prioritas/urgensi masalah.

Sebagaimana diketahui di dalam sebuah UPT tertinggal banyak permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak dari belum

terselesaikannya masalah yang sesungguhnya. Sebagai contoh ialah ketidakberhasilan usaha ekonomi, hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa aspek seperti kualitas lahan, ketersediaan sarana prasarana fisik, tidak bekerjanya kelembagaan ekonomi atau rendahnya produktivitas sumber daya manusianya sendiri seperti yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya dimana aspek-aspek tersebut memiliki skala dampak permasalahan yang berbeda. Disamping itu keterbatasan anggaran merupakan batasan lainnya yang mempengaruhi upaya penyelesaian permasalahan, oleh karena itu dibutuhkan perumusan kebijakan yang tepat yang didasarkan pada skala prioritas.

2.8. Studi Sejenis Sebelumnya

Beberapa studi terkait yang pernah dilakukan diantaranya :

1. Ria Fajarianti, dkk (2007), "*Analisis Permasalahan UPT*", Pusdatin Ketransmigrasian, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Kemenakertrans. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam UPT-UPT yang masih dibina dimana dilakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan metode AHP untuk menemukan permasalahan prioritas yang terjadi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Didalam metode penggunaan AHP ini disusun hirarki fungsional yang terdiri dari enam level yaitu, *level pertama* yang merupakan tujuan dari kegiatan ini, *level kedua*, merupakan level yang berisi elemen-elemen yang bukan merupakan kriteria atau dasar pertimbangan dari tujuan namun merupakan pengelompokan permasalahan berdasarkan kelompok permasalahan yang meliputi tiga kelompok yaitu Fisik, Sosial dan Ekonomi. *level ketiga*, merupakan level yang berisi elemen-elemen yang menerangkan jenis permasalahan dari level kedua, dengan rincian : 1) Kelompok Permasalahan Fisik dengan permasalahan berupa fasilitas permukiman, Transportasi dan Sarana Air Bersih 2) Kelompok permasalahan sosial dengan permasalahan pendidikan, kesehatan dan manajemen UPT dan 3) Kelompok permasalahan ekonomi, dengan jenis permasalahan usaha tani dan penempatan selanjutnya adalah *level keempat*

level ini merupakan level yang berisi elemen –elemen yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan, *level kelima*, merupakan level yang berisi elemen-elemen yang menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan pada level keempat selanjutnya *level kelima* merupakan level yang berisi alternatif dari penyelesaian permasalahan. Berdasarkan perhitungan bobot yang dilakukan dengan menggunakan metode AHP pada level kedua bobot tertinggi dari penilaian adalah pada kelompok permasalahan ekonomi sebesar 0.674. Pada level ketiga yang merupakan penjabaran jenis permasalahan dari level kedua, kelompok permasalahan ekonomi dengan jenis permasalahan usaha tani memperoleh bobot terbesar yaitu 0.833, kelompok fisik, jenis permasalahan yang memperoleh bobot tertinggi ialah jenis permasalahan transportasi sebesar 0.655 dan kelompok sosial, jenis permasalahan yang memperoleh bobot tertinggi ialah kesejahteraan. Pada level yang berisi dampak dari permasalahan yaitu level lima dampak yang memperoleh bobot terbesar ialah dampak produktivitas yang rendah sebesar 0.435 dan pada level enam yang berisi elemen alternative, alternative pemecahan permasalahan yaitu peningkatan pembinaan SDM dalam hal ini transmigran memperoleh bobot tertinggi sebesar 0.323.

2. Herwini Wahyu Susanti (2007), *“Penyusunan Indeks Keberhasilan Transmigrasi Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Transmigrasi (Studi Kasus Kaupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)*. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun indeks keberhasilan pembangunan transmigrasi dengan objek penelitian adalah UPT-UPT di lokasi Kab. Pesisir Selatan dimana proses pengolahannya dengan menggunakan metode AHP. Penentuan struktur atau criteria dalam hirarkinya diperoleh melalui berbagai literatur yang ada yang umum terkait dengan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan. Penggunaan metode AHP disini lebih kepada mencari ukuran mana yang paling berpengaruh dalam penilaian keberhasilan yang kemudian kriteria tersebut menjadi dasar yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah UPT melalui penyusunan sebuah indeks dengan membandingkan seluruh objek penelitian dalam hal ini UPT yang

dinamakan indeks keberhasilan transmigrasi (IKT). Hirarki dalam penyusunan indeks keberhasilan transmigrasi ini terdiri dari empat level yaitu level pertama IKT, level kedua berisi elemen kelompok pengukuran yang terbagi tiga yaitu kesejahteraan, pembangunan daerah dan integrasi nasional. Level ketiga adalah detil dari elemen kelompok pengukuran pada level kedua dan level terakhir berisi indikator-indikator pengukuran dalam kelompok pengukuran pada level ketiga. Dari pembobotan yang dilakukan dengan menggunakan metode AHP pada level kedua kriteria ukuran kesejahteraan memperoleh bobot tertinggi sebesar 0.681 dibandingkan dengan kriteria pengukuran pembangunan daerah dan integrasi nasional. Pada level ketiga yaitu sub kriteria ekonomi yang menjadi kelompok pengukuran kesejahteraan memperoleh bobot tertinggi dibandingkan sub kriteria pengukuran yang lain. Pada level terakhir yang masuk dalam sub kriteria ekonomi elemen pengukuran pendapatan perkapita memperoleh bobot tertinggi sebesar 0.833 dibandingkan elemen pengukuran gini ratio sebesar 0.167. Selanjutnya dirumuskan nilai intensitas dari masing-masing indikator bagi keseluruhan objek penelitian sebagai dasar penghitungan indeks keberhasilan transmigrasi (IKT). Berdasarkan hasil pengukuran indeks tersebut UPT Silaut II memiliki indeks keberhasilan tertinggi sebesar 0,76 dengan kategori berhasil dan terendah adalah UPT Inderapura sebesar 0,35 dengan kategori kurang berhasil.

3. Badan Penelitian dan Pengembangan Informasi, Kemenakertrans (2006), *Studi penanganan permasalahan UPT di kawasan PLG, Provinsi Kalimantan Tengah.*. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanganan permasalahan yang terjadi pada beberapa lokasi di kawasan yang menjadi objek penelitian melalui proses identifikasi potensi dan permasalahan berdasarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Kondisi faktual ini kemudian dikelompokkan menjadi kondisi fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan pada masing-masing lokasi. Dari hasil penelitian disusun strategi penanganan permasalahan secara umum berdasarkan keempat aspek tersebut fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan yang ada pada masing-

masing UPT. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lebih melihat kondisi permasalahan yang ada.

4. Biro Perencanaan Kemenakertrans (2007) *Studi Pemberdayaan UPT Binaan Tertinggal*. Studi ini bertujuan untuk menyusun panduan umum penyelesaian permasalahan UPT tertinggal. Identifikasi akar permasalahan atau perumusan urutan skala prioritas penanganan permasalahan didasarkan pada seberapa besar urgensi masalahnya. Pada prioritas pertama pengukurannya didasarkan pada tingkat kerawanan dampak yang terjadi apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani seperti jatuhnya korban jiwa, timbulnya wabah penyakit dan konflik sosial. Prioritas kedua adalah dampak permasalahan yang dalam jangka pendek diperkirakan akan menyebabkan munculnya permasalahan seperti wabah penyakit dan kerawanan pangan, Prioritas ketiga adalah permasalahan yang dalam jangka panjang apabila tidak ditangani akan muncul dan mengganggu aktifitas masyarakat seperti permasalahan prasarana permukiman seperti gedung sekolah, jalan penghubung dan lain-lain.
5. Eko Nurmianto dan Arman Hakim Nasution (2004), *Perumusan strategi kemitraan menggunakan metode AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT. INKA dengan Industri Kecil Menengah di Wilayah Karesidenan Madiun)* Program Pasca Sarjana, Program Studi Manajemen Industri, ITS, Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan model strategi kemitraan melalui penilaian kinerja yang dilakukan antara PT. INKA dan Industri Kecil Menengah dengan menggunakan metode AHP dan bantuan metode SWOT untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal BUMN dalam merumuskan strategi kemitraannya. Dari penelitian ini dirumuskan kriteria yaitu profesionalisme, pengawasan, kontrol, keuangan, potensi pengembangan, dan prosedur birokrasi dimana kriteria efektifitas memperoleh bobot yang paling tinggi 0,354. Dari hasil analisis situasi dengan menggunakan metode SWOT yang dilakukan diperoleh solusi membentuk badan baru yang mandiri dalam menjalankan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.

6. Ezatollah Karami (2005), *Appropriateness of farmers' adoption of irrigation methods: Application of AHP Model*, Department of agricultural extension, College of Agricultural, Shiraz University, Iran. Tujuan dari penelitian ini adalah pembahasan penggunaan AHP dalam menentukan model irigasi yang tepat. Sebuah sampel petani dipisahkan menjadi empat kelompok yaitu : *Small Young Farmers Group, Small Old Farmers Group, Medium Farmers Group, Large Farmers Group*. Dalam penggunaan metode AHP ini dirumuskan kriteria yakni *farm size, land slope, land fragmentation, altitude towards water saving, loan, knowledge of irrigation method, education, contact with information, soil texture* dengan alternatif yaitu *basin irrigation, border irrigation dan sprinkler irrigation*. Dari hasil pengolahan dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil atau alternatif yang berbeda terhadap setiap kelompok dalam penentuan model irigasi.
7. Christian B. Alphonse (1996), *Application of the Analytical Hierarchy Process in Agriculture in Developing Countries*, University College Dublin, Ireland. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model AHP pada lima macam kebijakan yang umum diambil dalam bidang pertanian di negara-negara berkembang. Kelima bidang keputusan tersebut adalah: 1) penentuan porsi lahan pertanian untuk dialokasikan pada masing-masing tanaman pangan, b) Alokasi sumber daya manusia dalam kegiatan pertanian, c) penentuan lokasi terbaik bagi toko desa untuk penjualan hasil produksi, d) pilihan antara subsisten dan industri pertanian, e) penentuan teknologi produksi tanaman, masing-masing tujuan dijabarkan dalam bentuk hirarki dan kriteria/faktornya masing-masing, menurut kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, metode pengambilan keputusan AHP dapat dipergunakan dengan baik dalam pengambilan keputusan pada lima bidang tujuan tersebut.
8. Joshua M. Duke dan Rhonda Aul-hide (2002), *Identifying Public Preferences for Land Preservation Using the Analytical Hierarchy Process*, Department of Food and Resource Economics, University of Delaware, USA. Penelitian ini bertujuan untuk melihat preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan lahan cadangan di area pinggiran kota yang hak pengelolaannya diperoleh melalui program pembelian hak pembangunan

oleh masyarakat. Objek penelitian adalah di kawasan Delaware dengan melakukan proses interview kepada sebanyak 129 penduduknya. Dari hasil penggunaan metode AHP dengan merumuskan empat kriteria yaitu lingkungan, lahan pertanian, kontrol pertumbuhan dan ruang terbuka, ternyata preferensi masrakat terbesar dalam penggunaan lahan ialah diperuntukkan untuk kelestarian lingkungan dan ketersediaan lahan pertanian.

9. Ali Ariapour, Fazel Amin, Ahmad Torknezad (2008), *Regional Model of Sustainable Utilization in Marginal Lands by AHP Method (Case Study: Kabude Olia in Kemanshah Province)* Department of Renewable Resource, Islamic Azad University, Iran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengelolaan lahan marjinal yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang diukur dalam pengelolaan lahan marjinal ini ada 16 faktor dimana diantaranya adalah tingkat erosi tanah, biomassa, jumlah tanaman, jumlah spesies, keragaman hayati, unsur-unsur hara, bahan organik, kehidupan liar, tanaman obat, lanskap dan moderasi cuaca. Dari 16 faktor tersebut 4 diantaranya yaitu konservasi air dan tanah, erosi elemen nutrisi, biomasa dan keragaman tanaman memiliki nilai yang paling tinggi bagi pengelolaan lahan marjinal agar dapat berkelanjutan.
10. J.E. de. Steiguer, Jennifer Duberstein, dan Vincente Lopes (2002) *The Analytic Hierarchy Process as a Means for Integrated Watershed Management*, School of Renewable Natural Resources, University of Arizona, Tucson. Tujuan penelitian ini adalah untuk memilih perencanaan terbaik bagi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dengan menggunakan model *integrated watershed management (IWM)* yang merupakan model yang banyak dipakai diseluruh dunia dalam perencanaan pengelolaan DAS. AHP disini digunakan untuk membantu pemilihan rencana tersebut. Didalam penelitian ini dibangun kriteria-kriteria yang menjadi ukuran dari alternative-alternatif rencana dimana kriteria tersebut adalah 1) kualitas air 2) produksi kayu 3) perlindungan tepian pantai dan 4) biaya dengan pilihan 3 alternatif perencanaan bagi masing-masing kriteria sesuai dengan metode IWM.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir Konseptual

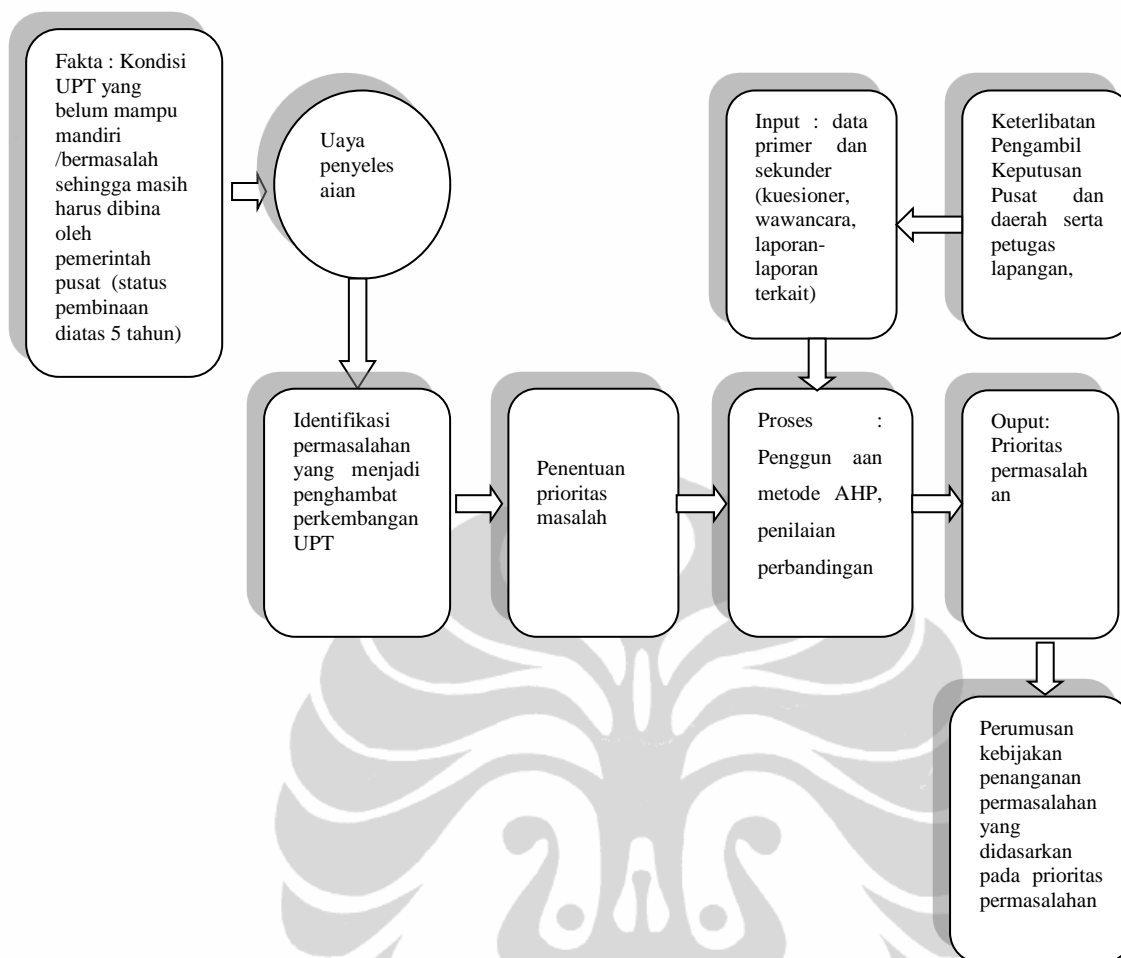
Studi-studi literatur yang pernah ada seperti studi penanganan permasalahan UPT yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Informasi Depnakertrans, 2006 maupun studi pemberdayaan UPT binaan tertinggal yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Depnakertrans, 2007 keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses penelitiannya. Pendekatan kualitatif ini umumnya dilakukan melalui proses observasi dan diskusi terfokus dengan para petugas, tokoh masyarakat dan transmigran. Sedangkan studi yang akan dilakukan ini adalah dengan menggabungkan kedua pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif dimana pendekatan kuantitatif dilakukan dengan membandingkan variable-varibel secara numerik dengan melibatkan bantuan persepsi para ahli dalam bidang tersebut.

Penelitian ini diawali dengan studi literatur terkait dengan studi-studi terdahulu yang pernah ada untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas terhadap penelitian yang akan dilakukan dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Proses penelitian selanjutnya melalui proses identifikasi permasalahan dengan melakukan observasi ke lapangan dan menggali informasi dari para petugas dan masyarakat setempat. Selanjutnya permasalahan-permasalahan dijadikan dasar dalam strategi penanganan permasalahannya yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar penanganan permasalahan melalui proses diskusi dengan para petugas lapangan, tokoh masyarakat dan transmigran itu sendiri.

Setelah dikelompokkan penanganan permasalahannya kemudian dilakukan pengukuran bobot dari penanganan permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan bantuan para ahli dengan menggunakan alat analisa *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diharapkan akan memperoleh rumusan penanganan permasalahan yang lebih akurat untuk menetapkan skala proiritas kebijakan penanganan permasalahannya.

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari kerangka berpikir dalam menyusun strategi pemberdayaan UPT tertinggal ini, antara lain :

1. Fakta bahwa kondisi UPT lokasi Gajah Mati SP. 6 masih belum bisa mandiri dan berkembang walaupun usia pembinaannya sudah lebih dari masa pembinaan yang dilakukan pemerintah;
 2. Dibutuhkan identifikasi permasalahan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi penghambat perkembangan UPT tersebut;
 3. Keterbatasan waktu dan anggaran menjadi kendala dalam sebuah pelaksanaan pembangunan sehingga dibutuhkan skala prioritas dalam penyelesaian permasalahan dalam UPT tersebut;
 4. Penyusunan skala prioritas harus didasarkan pada temuan empirik melalui pengkajian faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pembangunan UPT;
 5. Keberhasilan sebuah pembangunan tidak hanya diukur oleh keberhasilan pembangunan fisiknya namun juga keberhasilannya mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu kesejahteraan dan upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan UPT dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan kesejahteraan maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah harus mampu menjadi faktor pendorong bagi penyelesaian permasalahan kesejahteraan dan perkembangan wilayah sekitarnya
- Secara skematis alur pemikiran penyusunan strategi pemberdayaan UPT tertinggal adalah seperti Gambar dibawah ini.



Gambar 3.1
Alur Pikir Penelitian

3.2. Penyusunan Hirarki

Struktur hirarki dalam penelitian ini di susun melalui proses diskusi dan pengumpulan data lapangan yang di peroleh melalui beberapa laporan terkait dengan lokasi penelitian tersebut. Elemen-elemen dalam hirarki disusun selengkap mungkin untuk merepresentasikan kondisi permasalahan secara keseluruhan dari UPT tersebut.

3.2.1. Penjelasan Elemen-Elemen dalam Level-Level pada Hirarki

Dari hasil wawancara, studi literatur yang dilakukan, dan berbagai regulasi dan dokumen perencanaan yang terkait di lingkungan Kemenakertrans, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan, dan

Disnakertrans Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dapat dirumuskan beberapa kriteria, sub kriteria, dan sub sub kriteria yang dapat digunakan dalam pemilihan prioritas alternatif penanganan permasalahan pada UPT Gajah Mati SP. 6. Kriteria-kriteria tersebut adalah biaya, sumber daya manusia (SDM), regulasi, kepentingan dan dukungan pemerintah daerah (pemda). Kelima kriteria ini menjadi dasar pertimbangan yang disusun secara lebih makro dan saling terkait satu dengan lainnya dalam melakukan penanganan permasalahan atau pelaksanaan kegiatan bagi bermacam-macam skema program khususnya dalam hal ini terkait dengan program yang dilakukan pemerintah, penjelasan dari kelima kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya, menurut Supriyono (2000:185) biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Sebagaimana diketahui keterbatasan kemampuan pembiayaan atau anggaran merupakan kendala utama yang umum terjadi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan apapun bentuk kegiatan tersebut, hal ini menyebabkan tidak semua keinginan atau tujuan bisa terpenuhi. Oleh karena itu pemilihan prioritas pembiayaan menjadi bagian penting dalam perencanaan maupun pelaksanaan sebuah kegiatan.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM), seperti pada umumnya pelaksanaan dari sebuah program atau kegiatan, ketersediaan SDM yang sesuai menjadi bagian penting dalam proses implementasi kegiatan. Kebutuhan akan SDM ini harus disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang muncul dilapangan. Dalam upaya penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6. kebutuhan SDM ini bisa diperoleh baik dari kalangan transmigran sendiri maupun tenaga kerja dari luar lokasi.
- 3) Regulasi, dalam mendukung kelancaran sebuah pelaksanaan program atau kegiatan baik program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta baik pusat maupun daerah dukungan regulasi mutlak diperlukan sebagai dasar dari implementasi kegiatan. Kriteria regulasi ini adalah dukungan legalitas baik fisik maupun non fisik yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

- 4) Kepentingan, tingkat kepentingan atau manfaat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyelesaian permasalahan di lokasi ini. Penanganan permasalahan ini harus didasarkan pada penyelesaian permasalahan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat baik transmigran maupun masyarakat sekitar.
- 5) Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda), dukungan Pemda menjadi kriteria yang cukup penting dalam penanganan permasalahan di lokasi ini. Dukungan pemerintah daerah ini sangat diharapkan bagi upaya penanganan permasalahan maupun pemberdayaan bagi perkembangan lokasi tersebut selanjutnya. Dukungan Pemda ini dapat berupa dukungan fisik maupun non fisik baik pada masa pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan terlebih khusus pada masa pasca pembinaan atau UPT telah diserahkan kepada pemerintah daerah karena UPT ini nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setelah diserahkan. Dukungan Pemda ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang terjadi dilapangan.

Selanjutnya kriteria-kriteria ini diturunkan menjadi sub kriteria fisik dan non fisik bagi keseluruhan kriteria/faktor yang ada. Sub kriteria fisik dan non fisik ini merupakan pengelompokan permasalahan bagi masing-masing kriteria di atasnya. Selanjutnya sub kriteria ini diturunkan kembali secara lebih detil menjadi sub-sub kriteria yang berisi elemen kelompok permasalahan yang menjelaskan kelompok permasalahan di atasnya yang terdiri dari sub-sub kriteria prasarana dan sarana untuk sub kriteria fisik dan sub-sub kriteria/faktor sosial dan ekonomi untuk sub kriteria non fisik. Karena sus-sub kriteria ini masih bersifat abstrak maka selanjutnya sub-sub kriteria ini diturunkan ke level yang lebih rinci yang berisi permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungan UPT tersebut yang juga menjadi alternatif atau pilihan dalam menentukan prioritas penanganan permasalahan.

Untuk sub kriteria fisik dengan sub-sub kriteria prasarana, permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a) Pembagian dan sertifikasi lahan;
- b) Perbaikan jalan, jembatan penghubung/poros;
- c) Pembangunan drainase;

- d) Pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi;
- e) Perbaikan gedung sekolah;
- f) Perbaikan rumah ibadah;
- g) Perbaikan kantor desa;
- h) Perbaikan rumah Ka. UPT dan Transmigran

Untuk sub kriteria fisik dengan sub-sub kriteria sarana, permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan sarana air bersih;
- b) Penyediaan sarana listrik;
- c) Penyediaan sarana pertanian;
- d) Penyediaan sarana sekolah;
- e) Penyediaan sarana kesehatan

Untuk sub kriteria non fisik dengan sub-sub kriteria sosial dan ekonomi, sus-sus kriteria sosial permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a) Penambahan guru sekolah;
- b) Penyediaan tenaga kesehatan;
- c) Perbaikan administrasi pemerintahan UPT;
- d) Pembentukan organisasi kemasyarakatan UPT

Untuk sub kriteria non fisik dengan sub-sub kriteria ekonomi, rincian permasalahannya adalah sebagai berikut:

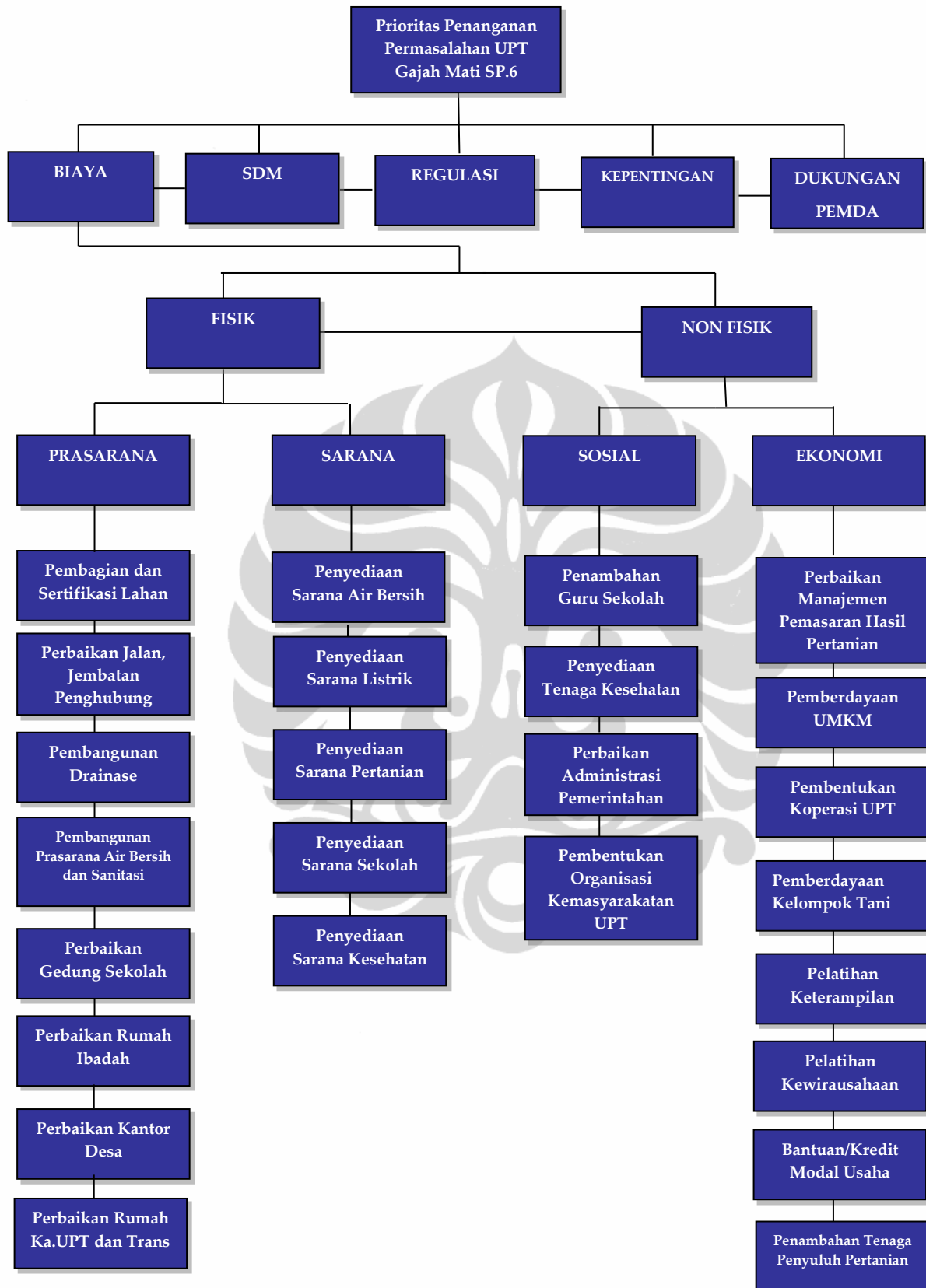
- a) Perbaikan manajemen pemasaran hasil pertanian;
- b) Pemberdayaan UMKM;
- c) Pembentukan koperasi UPT;
- d) Pemberdayaan kelompok tani;
- e) Pelatihan keterampilan;
- f) Pelatihan kewirausahaan;
- g) Bantuan/kredit modal usaha;
- h) Penambahan tenaga penyuluh pertanian.

Elemen-elemen permasalahan tersebut berlaku sama untuk tiap-tiap kriteria, sub kriteria dan sub-sub kriteria yang ada pada keseluruhan hirarki.

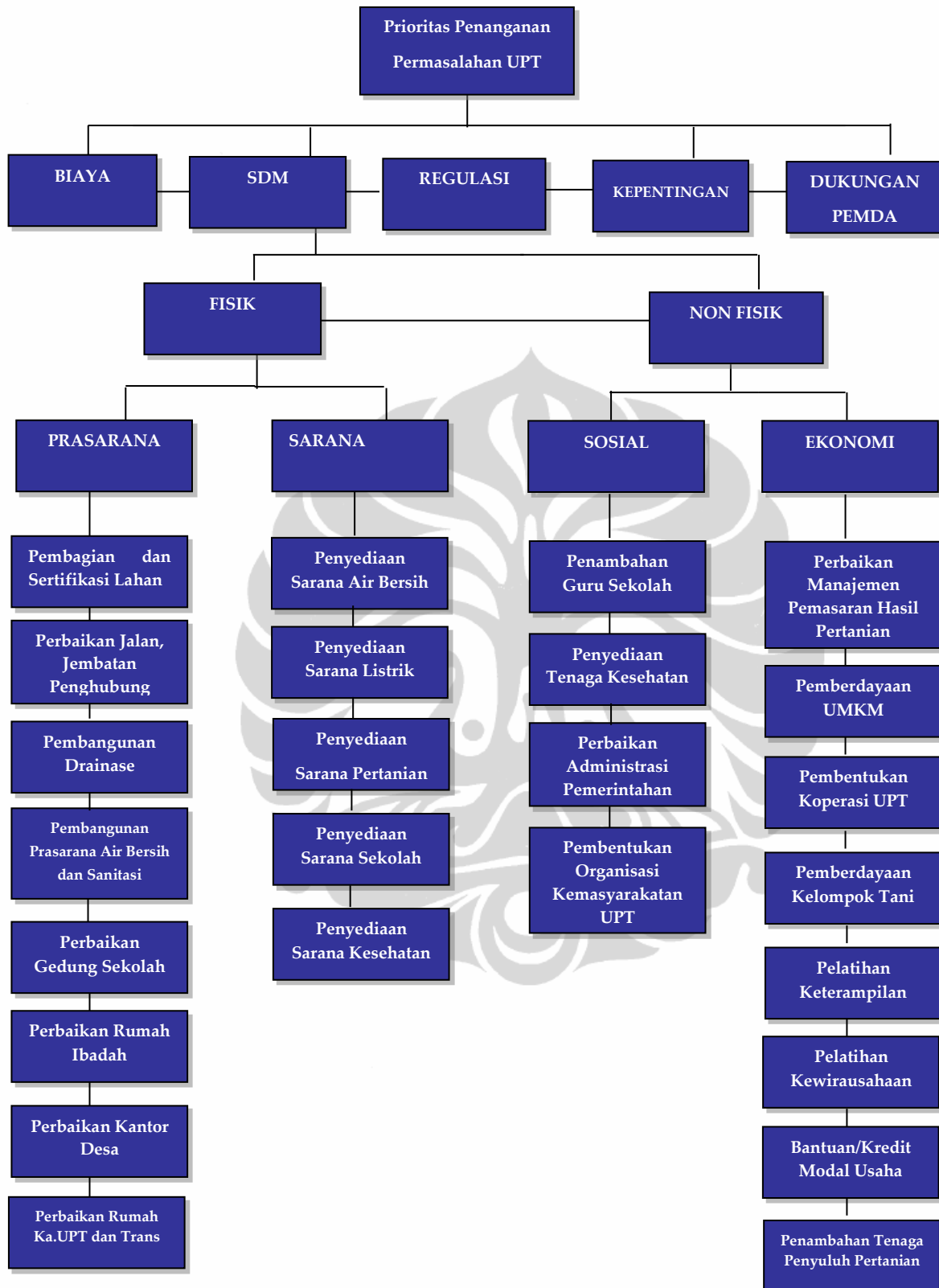
3.3. Hirarki Strategi Penanganan Permasalahan UPT Tertinggal Gajah Mati SP.6

Struktur hirarki dengan tujuan penentuan prioritas penanganan permasalahan sesuai dengan yang apa yang telah diuraikan diatas dapat dilihat pada gambar hirarki di bawah ini:

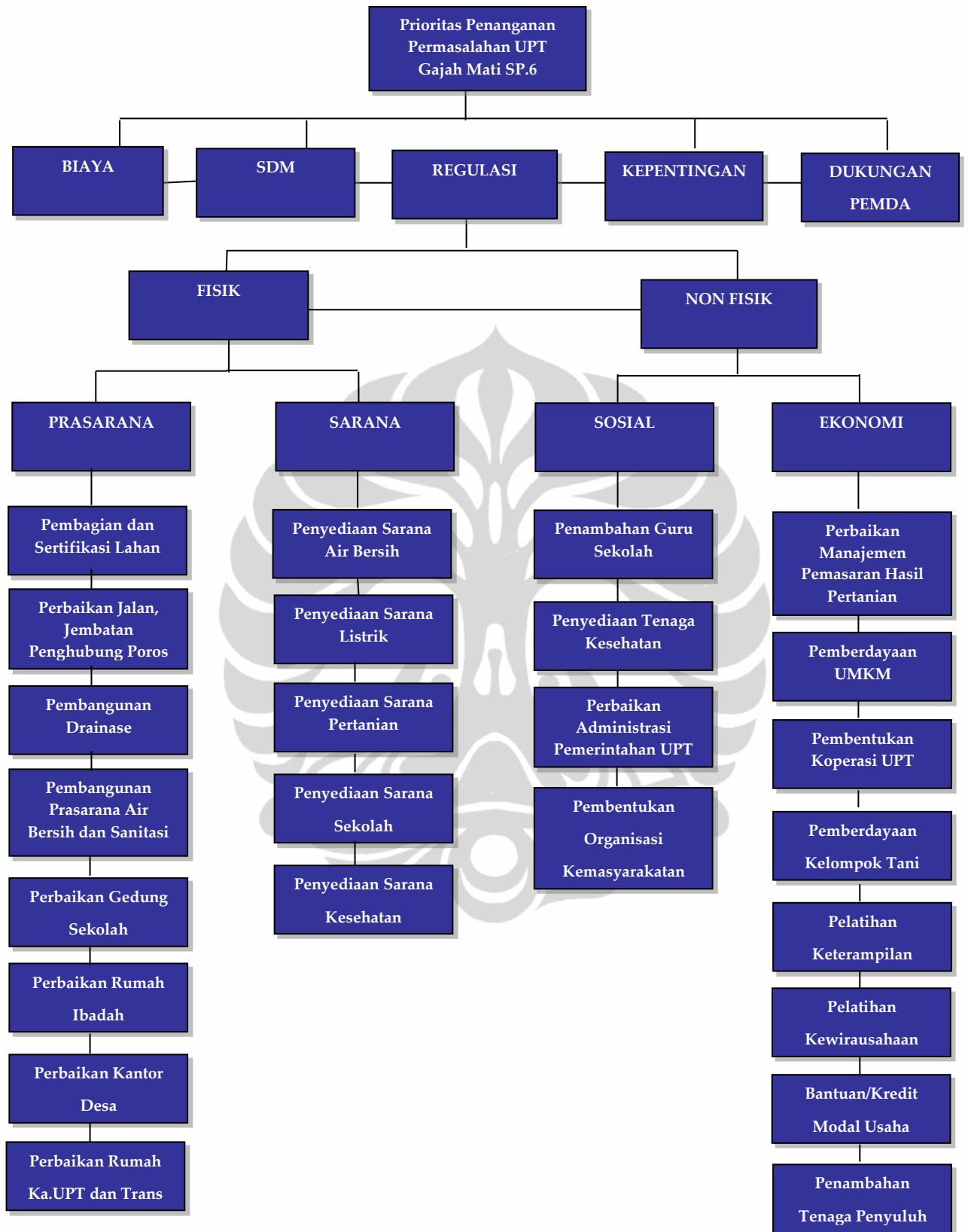




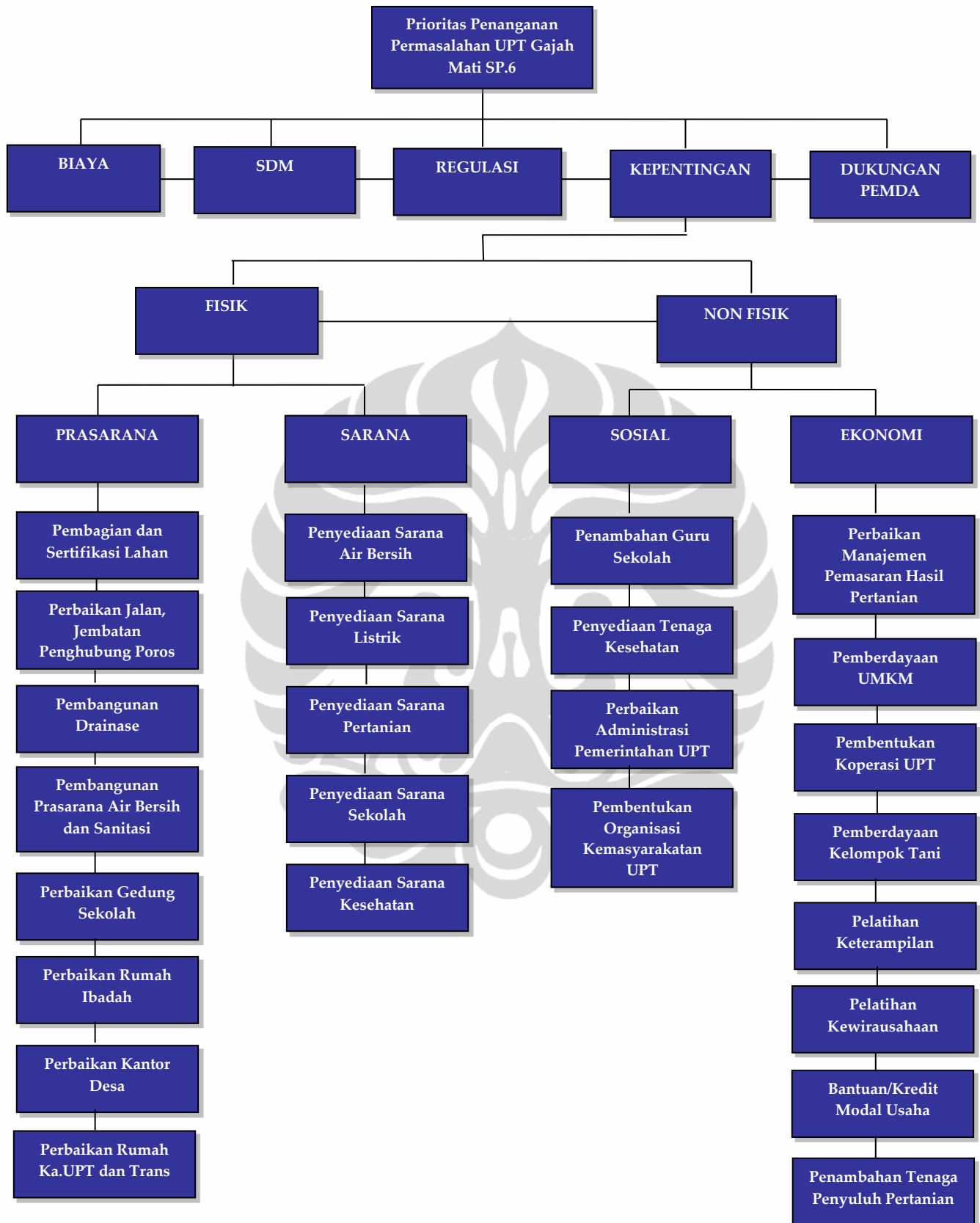
Gambar 3.2.
Struktur Hirarki Kriteria Biaya



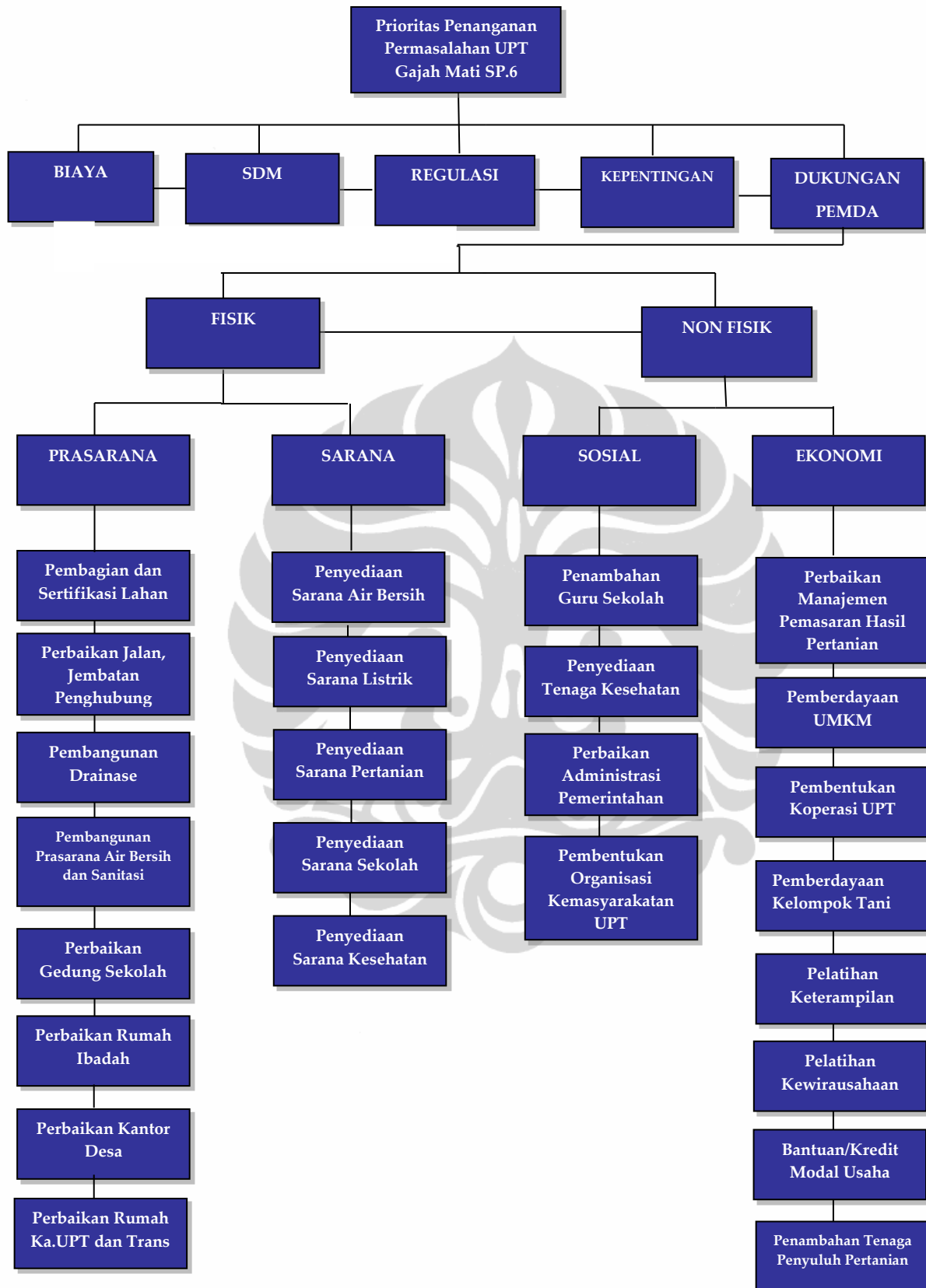
Gambar 3.3.
Struktur Hirarki Kriteria SDM



Gambar 3.4
Struktur Hirarki Kriteria Regulasi



Gambar 3.5
Struktur Hirarki Kriteria Kepentingan



Gambar 3.6.
Struktur Hirarki Kriteria Dukungan Pemda

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi pada studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*desk study*) dan studi lapang (observasi dengan menggunakan kuesioner). Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen-dokumen yang relevan, hasil-hasil penelitian, laporan pelaksanaan, dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data/informasi di lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terlibat dalam pembangunan transmigrasi di tingkat daerah melalui wawancara dan kegiatan survey dengan melibatkan para ekspert/ahli baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan petugas di lokasi itu sendiri.

3.4.1. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). Bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada contoh kuesioner dalam Saaty, 1994. Sedangkan item-item yang dibandingkan dalam kuesioner adalah kriteria dan sub kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas masalah. Kuesioner yang digunakan dapat dilihat dalam **Lampiran..**

3.4.2. Identifikasi *Stakeholders/Experts*

Identifikasi informan dilakukan dengan melihat pengetahuan terhadap lokasi penelitian, kapasitas dan kewenangan yang dimiliki calon informan, oleh karena itu responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan pengetahuan yang cukup khususnya terkait dengan lokasi ini dalam hal ini baik pejabat di lingkungan Kemnakerans Pusat dan Daerah
- 2) Para pelaksanaan lapangan dalam hal ini para petugas terkait di UPT.

Dalam penelitian ini para ahli yang dipergunakan adalah sebanyak tujuh orang dengan rincian sebagai berikut :

Expert 1 : Kepala Bidang Pembinaan Transmigrasi, Disnakertrans
Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan

- Expert 2* : Kepala Bidang Permukiman Transmigrasi, Disnakertrans Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan
- Expert 3* : Ketua Organisasi UPT
- Expert 4* : Staf UPT Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Mental Spiritual
- Expert 5* : Staf Program Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan
- Expert 6* : Kasubbag. Program Ditjen. P2MKT, Kemenakertrans
- Expert 7* : Kepala Bagian Perencanaan Umum, Biro Perencanaan, Kemnakertrans

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengumpulan kuesioner (Sekaran, 2006). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain (Sekaran, 2006). Data sekunder yang dikumpulkan antara lain terkait informasi lokasi, laporan-laporan dan berbagai literatur.

BAB 4

GAMBARAN UMUM WILAYAH UPT GAJAH MATI SP.6

4.1. Letak Geografis

Secara administratif lokasi studi terletak di desa Gajah Mati Kecamatan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Permukiman yang terdapat disekitar lokasi ini adalah permukiman Gajah Mati SP.1, SP.2, SP.3, SP.4 dan SP. 5. Dan permukiman transmigrasi yang masuk wilayah administrative Provinsi Lampung yaitu Mesuji Atas SP.5, SP.8, SP.9 dan SP.10 yang berada disebelah selatan lokasi studi yang dipisahkan oleh sungai Mesuji. Luas areal lokasi ini adalah 8.600 Ha dengan jumlah penempatan sekitar 325 KK. Di masa depan lokasi ini diharapkan menjadi sebuah desa definitif yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Menang. Jenis atau pola usaha adalah jenis Transmigrasi Umum (TU) dengan pola usaha Tanaman Pangan Lahan Basah (TP-LB).

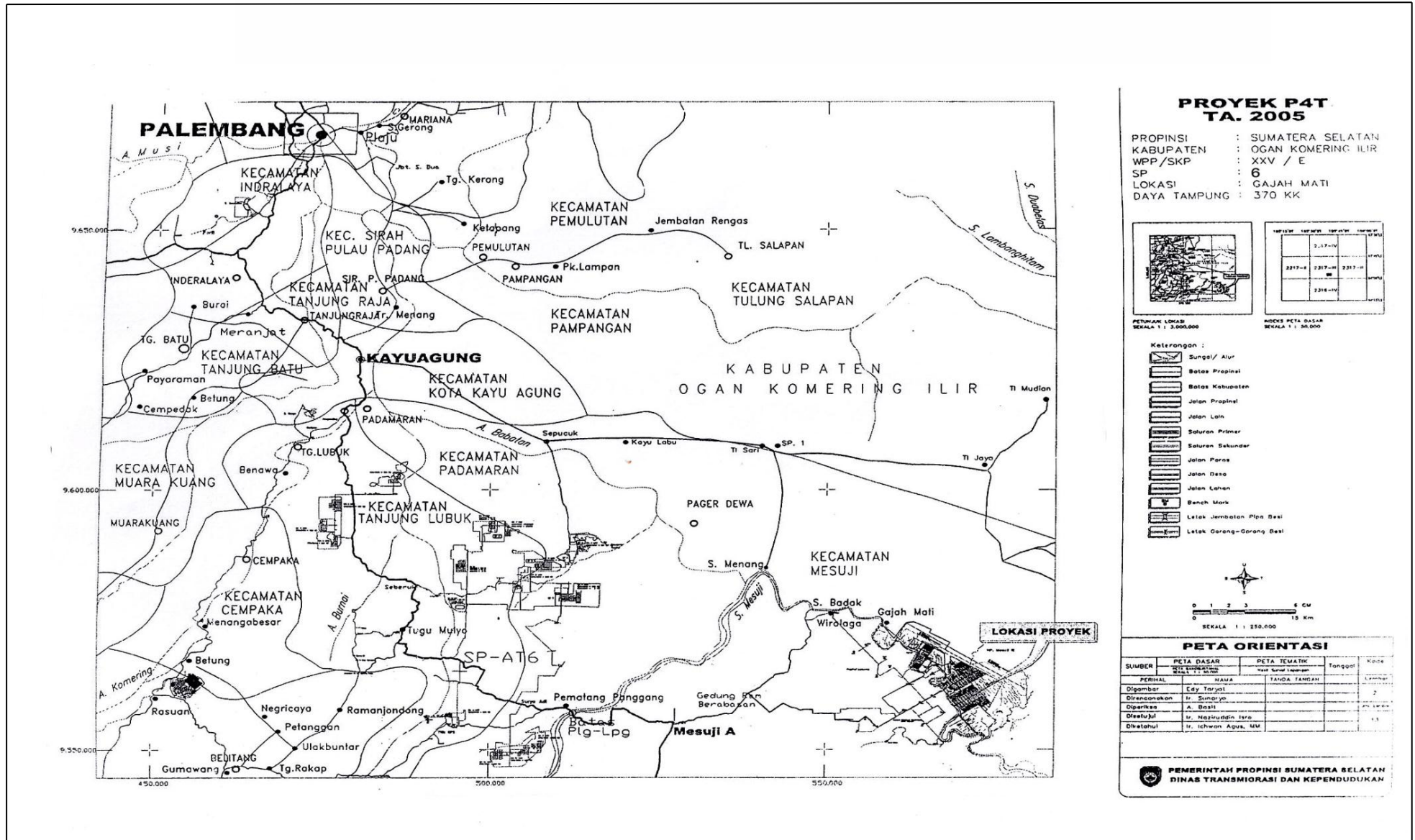
Luas areal lokasi satuan permukiman Gajah Mati SP.6 seluas 889.25 Ha yang terletak pada posisi geografis, yaitu :

- $03^{\circ} 57' 18,1'' - 03^{\circ} 58' 45,8''$ Lintang Selatan
- $105^{\circ} 37' 23,8'' - 105^{\circ} 39' 57,4''$ Bujur Timur

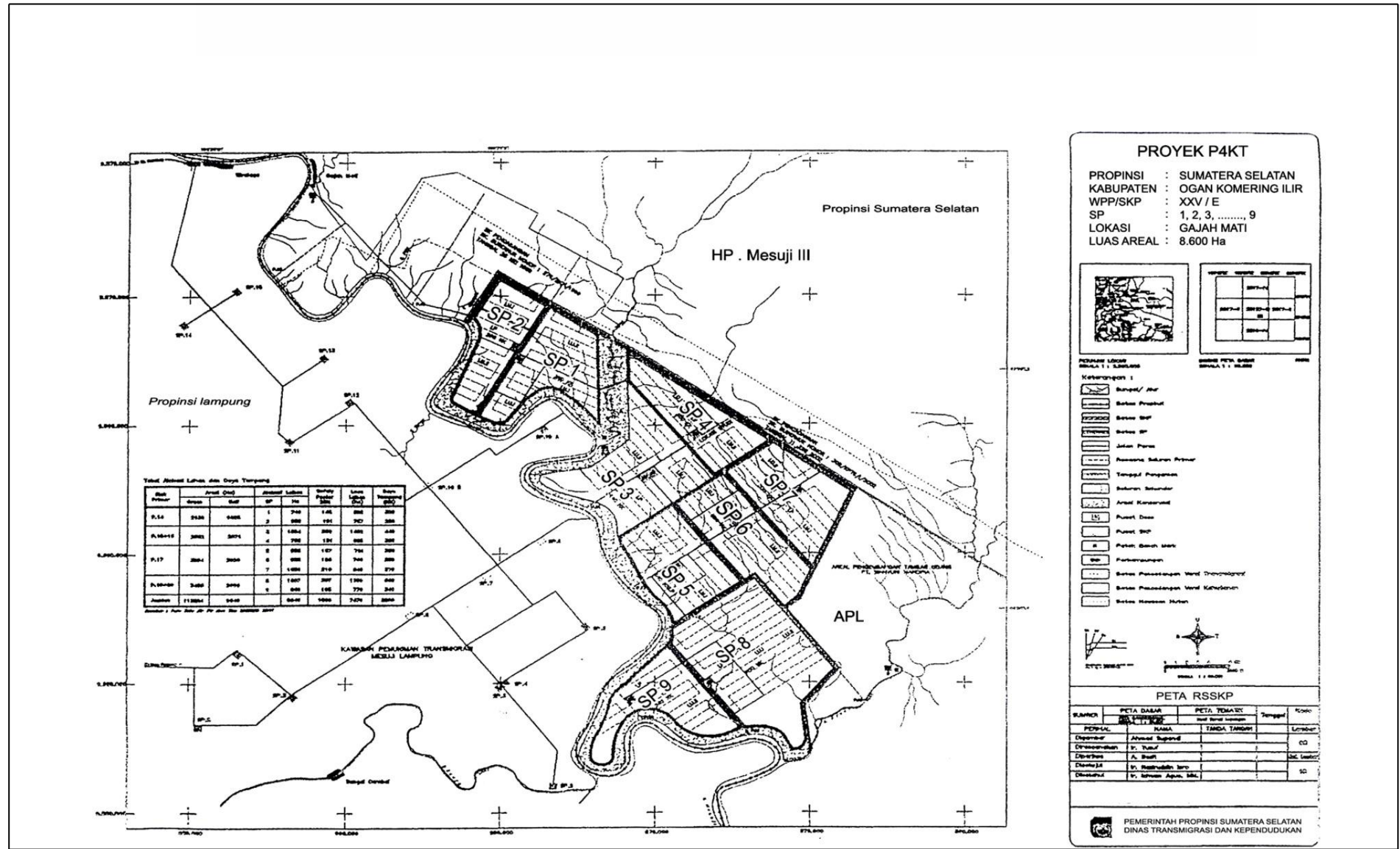
Lokasi ini berada pada dataran rendah lahan basah (pasang surut) dengan ketinggian 17-20 meter diatas permukaan laut dimana batas-batas fisik arealnya yaitu :

- Sebelah Timur : Calon Lokasi SP.8
- Sebelah Barat : Lokasi UPT Gajah Mati SP.3
- Sebelah Utara : Lokasi UPT Gajah Mati SP.7
- Sebelah Selatan : Lokasi UPT Gajah Mati SP.5

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta orientasi skala 1 : 250.000 pada **Gambar 4.1** dan **Gambar 4.2**.



Gambar 4.1
 Peta Wilayah



Gambar 4.2
 Peta Lokasi

4.2. Iklim

Informasi tentang kondisi iklim sangat dibutuhkan dalam merencanakan suatu permukiman khususnya yang berorientasi pertanian. Dengan mengetahui kondisi iklimnya dapat membantu proses pengolahan lahan usaha maupun pemenuhan kebutuhan manusia seperti curah hujan. Iklim merupakan suatu gejala atau peristiwa cuaca yang berulang terjadi dari tahun ke tahun seperti contoh tekanan udara, suhu, curah hujan dan lainnya. Hal ini dibutuhkan misalnya dalam hal memulai masa tanam. Dibawah ini adalah tabel kondisi iklim di lokasi Gajah Mati SP.6.

Tabel 4.1.
Kondisi Iklim di Areal Studi SP. 6 Gajah Mati

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Suhu Udara		Kelembaban Udara (%)	Kecepatan Angin (km/jam)	Penyinaran Matahari
			Minimum (°C)	Maksimum (°C)			
Januari	231,2	16	23,6	30,3	85,6	13,6	46,6
Februari	223,6	13	23,4	29,9	85,5	13,6	55,0
Maret	257,4	13	23,7	31,9	85,6	12,9	60,9
April	261,4	14	23,8	31,9	86,4	12,2	69,3
Mei	178,5	9	24,2	32,1	84,7	11,8	71,8
Juni	138,3	7	24,6	31,1	82,4	11,4	72,9
Juli	74,3	6	23,1	32,0	80,9	12,4	75,1
Agustus	112,3	5	23,1	32,3	80,3	12,8	74,4
September	69,7	6	23,3	32,6	79,7	13,0	64,4
Oktober	239,5	12	23,5	32,7	80,8	13,1	63,7
Nopember	296,7	13	23,5	31,8	84,2	13,3	57,2
Desember	241,7	14	23,6	30,8	86,0	13,1	51,6
Jumlah	2324,6	126	283,4	379,6	1002,1	153,2	762,9
Rata-rata	193,7	11	23,6	31,6	83,5	12,8	63,6

Sumber : Stasiun Meteorologi Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin dan Stasiun Klimatologi Kenten, Palembang (1991-2000), 2001

Khusus terkait dengan kelembaban udara dan curah hujan yang merupakan unsur terpenting dari kondisi iklim, kelembaban udara akan berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman dimana apabila tingkat kelembabannya tinggi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Kelembaban bulanan terendah pada lokasi ini sebesar 79,7 persen dicapai pada bulan September dan tertinggi pada bulan April sebesar 86,4 persen. Kelembaban udara bulanan yang rata-rata 83,5 masih cukup aman bagi pertumbuhan tanaman. Terkait dengan curah hujan, frekuensi curah hujan akan sangat berpengaruh terhadap jadwal dan pola tanam dan juga dapat menjadi petunjuk kuantitatif adanya ketersediaan air untuk tanaman. Berdasarkan standar CSR/FAO curah hujan tahunan yang sesuai untuk berbagai jenis tanaman berkisar antara 1500-2500 mm dalam hal ini areal Gajah Mati SP. 6 kondisi curah hujannya cukup baik dimana rata-rata curah hujan tahunannya sebesar 2.324,6 mm dengan rata-rata hujan pertahun sebesar 126,4 hari.

4.3. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai lokasi ke satuan permukiman baik dari wilayah luar maupun satuan-satuan permukiman yang ada yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan dari sebuah UPT. Lokasi Gajah Mati SP.6 ini memiliki kondisi aksesibilitas yang sebenarnya baik namun prasarana infrastrukturnya dalam kondisi yang tidak cukup baik. Pencapaian ke lokasi ini dari Palembang dapat ditempuh melalui jalur darat yang umumnya kondisi jalannya rusak dan juga melalaui sungai, namun untuk dapat mencapai lokasi ini lebih banyak menggunakan jalur air dari daerah terdekat yaitu melalaui sungai. Rute perjalanan menuju lokasi ini dapat dilihat pada table 1 dibawah ini:

Tabel 4.2.

Aksesibilitas Menuju Lokasi UPT Gajah Mati SP.6

No.	Rute	Jarak	Waktu	Kondisi Jalan	Sarana/ Kendaraan
1	Palembang-Batas Sumsel	± 175 Km	± 5 Jam	Rusak	Roda Empat
2	Batas Sumsel-Simpang Pematang	± 21 Km	± 1 Jam	Rusak	Roda Empat
	Alternatif 1				
3	Simpang Pematang-S. Badak	± 39 Km	± 2 Jam	Jalan Pasir Batu (Sirtu)	Roda Empat
4	S. Badak-Lokasi Gajah Mati SP.5		± 1 Jam	Jalan Air	Speed Boat
	Alternatif 2				
5	Simpang Pematang-Mesuji Atas SP.8	± 60 Km	± 3 Jam	Rusak	Roda Empat
6	Mesuji Atas SP.8-Lokasi UPT Gajah Mati SP.6	4 Km	20 mnt	Jalan Air	Kelotok

Sumber : Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (RTUPT), Disnakertrans Sumsel, 2003

Daerah studi Gajah Mati SP.6 dapat dicapai dari Ibu Kota Provinsi (Palembang) ke batas Sumsel melalui transportasi darat lewat jalan negara yang menuju Lampung sepanjang 175 Km dengan kondisi sebagian besar rusak berat, sedangkan dari batas Sumsel menuju Simpang Pematang melalui jalan darat sepanjang 21 Km dengan kondisi rusak berat. Dari Simpang Pematang ke calon lokasi Gajah Mati SP.6 dapat ditempuh dengan dua alternatif yaitu dari Simpang Pematang menuju S. Badak melalui jalan aspal sepanjang 39 Km dan sebagian kondisi sirtu, serta dari S. Badak menuju lokasi studi melalui jalan air selama 1 jam (dengan speedboat) atau dari Simpang Pematang ke Mesuji Atas SP.8 melalui jalan aspal dan sebagian sirtu sepanjang 60 Km dengan kondisi sangat rusak, serta dari Mesuji Atas SP.8 menyeberangi S. Mesuji dengan menggunakan kelotok ke lokasi UPT Gajah Mati SP.6.

Selanjutnya sebagai tambahan informasi dapat dilihat jarak tempuh ke lokasi-lokasi tertentu yang diperlihatkan pada **Tabel 4.3** di bawah ini:

Tabel 4.3.**Aksesibilitas Menuju Lokasi Pemerintahan dan Sarana Sosial**

No	Tujuan	Jarak (Km)
1.	Desa terdekat/Pasar	3
2.	Kota Kecamatan	20
3.	Kota Kabupaten	51
4.	Kota Provinsi	197
5.	SD 1 Unit	3
6.	SMP 1 Unit	3
7.	SLTA 1 Unit	20

Sumber : Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (RTUPT), Disnakertrans Sumsel, 2003

4.4. Kondisi Lahan

Kondisi lahan di lokasi Gajah Mati SP.6 ini sangat dipengaruhi oleh topografi daerah ini yang merupakan daerah rawa pasang surut sehingga tingkat kemasaman tanahnya tinggi. Berdasarkan laporan hasil penelitian tata ruang yang dilakukan oleh PT. Wahyu Setia (2003) sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH dengan ditunjukkan dengan konsentrasi Ion Hidrogen (H^+) di dalam tanah (nilai pH rendah) menunjukkan tanah semakin masam. Ini dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4**Kondisi pH Tanah dan Kejenuhan Alumunium di Lokasi Studi**

SPL	pH (H_2O)		Status		Kejenuhan AI (%)		Status	
	0-30	30-60	0-30	30-60	0-30	30-60	0-30	30-00
1	4,33	4,24	SM	SM	40,71	19,98	ST	S
2	4,48	4,22	SM	SM	33,69	38,69	T	T
3	4,53	4,38	M	SM	30,34	33,94	T	T

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium, 2003

Keterangan : M = Masam, SM = Sangat Masam, S = Sedang, T = Tinggi, ST = Sangat Tinggi

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanah di lokasi studi mempunyai pH berkisar antara 4,33 – 4,53 (sangat masam-masam) dilapisan atas dan 4,22 – 4,38 (sangat masam) di lapisan bawah. Sedangkan kejenuhan alumunium berkisar

antara 30,34 persen - 40,71 persen (tinggi - sangat tinggi) pada lapisan atas dan 19,98 persen - 38,69 persen (sedang – tinggi) pada lapisan bawah.

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh PT. Wahyu Setia yang didasarkan pada kesesuaian lahan untuk tiga kelompok komoditi tanaman yaitu padi sawah, tanaman pangan lahan kering (TPLK) dan tanaman tahunan/perkebunan, diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan lahan di lokasi studi dapat dikembangkan untuk pengembangan tanaman padi sawah, tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan dimana secara aktual berada pada tingkat kesesuaian Sesuai Bersyarat (S3). Kesuaian lahan aktual tersebut secara potensial dapat ditingkatkan menjadi sangat sesuai (S1) untuk tanaman padi sawah dan cukup sesuai (S2) untuk tanaman pangan lahan kering dan tanaman perkebunan. Oleh Karena itu, komoditi yang terpilih untuk dikembangkan yang diprioritaskan adalah tanaman padi sawah namun disisi lain menjadi permasalahan tersendiri bagi petani karena apabila yang dikembangkan adalah tanaman padi sawah maka pendapatannya hanya bersifat subsisten atau hanya sebatas memenuhi kebutuhan sendiri. Lahan pada lokasi ini diberikan masing-masing sebesar 0,25 untuk Lahan Pekarang, 0,75 hektar untuk Lahan Usaha I (LU I) dan sebesar 1 hektar untuk Lahan Usaha II (LU II).

4.5. Kondisi Tata Air

Lokasi studi termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Mesuji yang bermuara di laut Jawa, daerah ini merupakan daerah rawa pasang surut sehingga pengairannya dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung oleh gerakan pasang surutnya air laut (Arsyad, 1981).

Kondisi air dari sungai-sungai yang ada di lokasi secara fisik umumnya berwarna coklat keruh dimana pada saat musim kemarau air terasa asin dan musim penghujan air terasa payau.

Di lokasi ini banjir dapat terjadi apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi di DAS Mesuji dan juga dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut air laut karena memang lokasi ini topografinya merupakan daerah rendah dan berada di daerah pesisir.

Seperti halnya air sungai, air tanah dangkal di lokasi ini juga mempunyai rasa asin sehingga tidak dapat di konsumsi untuk diminum dan oleh sebab itu dibutuhkan perlakuan khusus dalam mengatasi permasalahan banjir dan kualitas air yang ada. Sumber air untuk keperluan keluarga berasal dari air hujan yang ditampung didalam gentong-gentong penampungan sedangkan sumber air untuk keperluan pertanian adalah air hujan dan air sungai. Permasalahan kondisi tata air ini membutuhkan perlakuan yang khusus dalam mengatasi kesulitan akan air bersih dan antisipasi banjir.

4.6. Ekonomi

Kondisi perekonomian di lokasi ini dan lokasi di wilayah Desa Gajah Mati pada umumnya relatif sama sebagaimana besar penduduk di lokasi ini mata pencahariaanya dari bertani dan hanya sedikit yang mempunyai mata pencaharian lain seperti berdagang, guru, petugas kesehatan dan lain-lain. Pendapatan penduduk bersumber dari hasil usaha tani yaitu tanaman padi sawah dan ladang seperti jagung, ubi kayu dan lainnya. Rata-rata tingkat pendapatan transmigran di lokasi ini walaupun tergolong masih bersifat subsisten memiliki pendapatan hampir mendekati UMR Provinsi yaitu antara Rp. 900.000 – Rp. 1.000.000 per bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh konsultan perencana pada proyek ini akan terjadi perbedaan tingkat pendapatan apabila petani hanya mengandalkan usaha tani dan palawija yang ada dibandingkan apabila mereka menanam jeruk dimana dapat terlihat pada **Tabel 4.5**. Namun hal ini belum bisa dilakukan karena terbentur dengan karakteristik lahan yang kurang sesuai sehingga dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk menyesuaikan kondisinya.

Tabel 4.5

Perkiraan Tingkat Pendapatan Keluarga per Tahun

No	Jenis Usaha	Pendapatan (Rp)
1.	Usaha Tani	
	Lahan Pekarangan	3.867.500,-
	Palawija	4.300.000,-
	Jeruk	10.000.000,-

(Sambungan Tabel 4.5)

No	Jenis Usaha	Pendapatan (Rp)
2.	Ternak	
	Ayam	100.000,-
	Ikan	50.000,-
3.	Jasa	500.000,-
Jumlah I (tanpa jeruk)		8.817.500,-
Jumlah II (dengan jeruk)		18.817.500,-

Sumber : Rencana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi (RTUPT), Disnakertrans Sumsel, 2003

Selanjutnya terkait dengan pemasaran hasil pertanian, pasar yang terdekat adalah pasar di lokasi transmigrasi SP. 3 Mesuji Atas dengan jarak \pm 20 Km, disamping itu juga terdapat pasar pekan setiap hari senin dan kamis di SP.6 Mesuji Atas dengan jarak 15 Km. Di lain pihak para petani di lokasi ini dapat menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak/tauke yang datang ke desa tersebut. Hingga saat ini lahan usaha II belum bisa dimanfaatkan karena ketiadaan modal untuk menggarap lahan tersebut disamping aspek legalitas lahan yang belum terselesaikan. Di lokasi ini juga sudah dibentuk Koperasi namun belum berjalan dengan baik.

4.7. Aspek Sosial

Aspek sosial dalam hal ini terkait dengan berbagai kondisi ketersediaan sarana prasarana yang ada baik pendidikan, kesehatan, manajemen UPT dan kelembagaan masyarakat. Sarana prasarana pendidikan di lokasi ini terdiri dari 1 unit gedung SD dengan 3 ruang kelas dengan jumlah siswa sebanyak 112 yang tersebar dari kelas I hingga VI SD dengan tenaga pengajar yang berada di lokasi ini sebanyak 6 orang yang berstatus tenaga honorer atau guru bantu. Kondisi gedung sekolah saat ini sedang mengalami kerusakan sehingga dibutuhkan rehab bagi ruang kelas yang ada.

Selanjutnya terkait dengan sarana prasarana kesehatan, di lokasi ini telah berdiri puskesmas pembantu (Pustu) dengan jumlah tenaga kesehatan yang berasal dari dinas kesehatan Kabupaten setempat yang terdiri dari dokter sebanyak 1 orang yang sifatnya kunjungan, tenaga sanitarian sebanyak 6 orang juga sifatnya kunjungan, perawat/mantri kesehatan sebanyak 1 orang dan bidan 1 orang.

Kondisi sarana kesehatan ini juga mengalami kesulitan dikarenakan minimnya ketersediaan obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya.

Terkait dengan manajemen UPT, petugas UPT di lokasi ini berjumlah 2 orang yang terdiri dari ketua organisasi UPT dan 1 orang staf UPT dimana semestinya minimal ada 3 orang petugas di lokasi. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan UPT ini adalah kurangnya tenaga dan sarana operasional UPT.

Selanjutnya dalam hal kelembagaan masyarakat, pada lokasi ini telah terbentuk RT dan RW yang terdiri dari 13 RT dan 3 RW dengan jumlah pengurus sebanyak kurang lebih 39 orang. Berbagai aktivitas kemasyarakatan juga sudah berlangsung di lokasi ini seperti kegiatan kesenian berupa kelompok rebana, kegiatan olah raga yang terdiri dari bulu tangkis, bola volley dan catur.

4.8. Kependudukan

Awal penempatan transmigran di lokasi ini adalah pada tahun 2006 dengan jumlah 118 KK atau 378 jiwa. Penempatan selanjutnya dilaksanakan pada bulan Desember 2006 dengan jumlah KK sebesar 113 dengan jumlah jiwa sebesar 474 dan penempatan terakhir dilakukan pada bulan Desember 2007 sehingga total keseluruhan berjumlah 325 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 1.250. Jumlah transmigran berdasarkan jenis kelamin pria 615 orang dan wanita 635 orang. Kondisi terakhir berdasarkan data monografi jumlah transmigran berkurang menjadi 316 KK dimana 10 KK meninggalkan lokasi. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel monografi kependudukan dibawah ini :

Tabel 4.6.

Monografi Kependudukan UPT Gajah Mati SP. 6

No.	Uraian	Satuan	Unit Permukiman Transmigrasi Gajah Mati SP.6
A	Komposisi Daerah Asal		
1	DKI	KK	137
2	Jawa Barat	KK	15
3	Jawa Timur	KK	10
4	APPDT/TPS	KK	163
	Jumlah	KK	325

(Sambungan Tabel 4.6)

No.	Uraian	Satuan	Unit Permukiman Transmigrasi Gajah Mati SP.6
B	Trans Laki-Laki		
1	DKI	Jiwa	230
2	Jawa Barat	Jiwa	30
3	Jawa Timur	Jiwa	12
4	APPDT/TPS	Jiwa	340
	Jumlah	Jiwa	620
C	Trans Perempuan		
1	DKI	Jiwa	248
2	Jawa Barat	Jiwa	33
3	Jawa Timur	Jiwa	15
4	APPDT/TPS	Jiwa	348
	Jumlah	Jiwa	630
D	Mutasi Penduduk		
1	Pernikahan		
	a. Sesama Transmigran	Pasang	2
	b. Dengan orang luar		4
	- Laki-laki	Jiwa	2
	- Perempuan	Jiwa	2
2	Kelahiran		
	a. Laki-laki	Jiwa	2
	b. Perempuan	Jiwa	4
3	Meninggalkan Lokasi		
	a. Jumlah KK	Jiwa	10
	b. Jumlah Laki-Laki	Jiwa	11
	c. Jumlah Perempuan	Jiwa	14
4	Kependudukan Periode Lalu		
	a. Jumlah KK	KK	325
	b. Jumlah Laki-Laki	Jiwa	615
	c. Jumlah Perempuan	Jiwa	635
		Jumlah	1.250
5	Kependudukan Periode Sekarang		
	a. Jumlah KK	KK	316
	b. Jumlah Laki-Laki	Jiwa	624
	c. Jumlah Perempuan	Jiwa	635
		Jumlah	1.256

Sumber : Monografi Lokasi Permukiman Transmigrasi Gajah Mati SP.6 ,Form Datin-05

Komposisi jumlah KK berdasarkan asal daerah terbesar adalah transmigran penduduk setempat diikuti oleh transmigran asal DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tingkat pendidikan transmigran di lokasi bervariasi antara SD – SMP dengan jumlah terbanyak berada pada tingkat SMP.



BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh melalui hasil kegiatan survey dan wawancara dengan menggunakan perangkat bantu *expert choice*. Setelah data diperoleh dilakukan analisis terhadap hasil dari pengolahan data tersebut.

5.1. Hasil Pembobotan untuk Setiap Level

Dalam studi ini, terdapat 5 (lima) level yang tersusun dalam struktur hirarki. Level kesatu merupakan tujuan dari analisis ini, yaitu menentukan prioritas penanganan permasalahan pada UPT Gajah Mati SP. 6. Bobot pada level ini akan selalu 1 karena merupakan hasil penjumlahan bobot dari level di bawahnya yaitu level kedua atau level kriteria. Sementara itu, level kelima adalah berupa alternatif kebijakan penanganan UPT Gajah Mati SP. 6. Oleh karena itu, analisis hasil pembobotan secara khusus dilakukan untuk level kedua, ketiga, dan keempat

5.1.1. Hasil Pembobotan untuk Level Kedua

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disebar setelah dilakukan perataan terhadap keseluruhan nilai dari responden kemudian data tersebut di input ke dalam perangkat *software Expert Choice*. Hasil dari input data pada level kedua dapat terlihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar. 5.1.
Hasil Pengolahan Data pada Level Kedua: Kriteria

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada level kriteria, kriteria yang mendapatkan nilai bobot tertinggi adalah tingkat kepentingan, yaitu jumlah pemanfaat, dengan bobot sebesar 0,319, yang disusul oleh bobot untuk biaya yang sebesar 0,262, dukungan pemerintah daerah sebesar 0,194, sumber daya manusia sebesar 0,148, dan regulasi sebesar 0,056. Indeks Inkonsistensi yang menunjukkan angka 0,04 menunjukkan bahwa perbandingan antar kriteria dalam level kedua cukup konsisten (dimana nilai maksimalnya untuk konsisten adalah sebesar 0,1 atau 10 persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemanfaat dari kebijakan yang diambil menjadi prioritas utama dalam penanganan UPT Gajah Mati SP. 6. Selain itu, biaya juga menjadi pertimbangan yang cukup besar bobotnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah pemanfaat mencerminkan dari tingkat kebutuhan yang cukup tinggi dan biaya mencerminkan keterbatasan anggaran yang dimiliki, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat di UPT Gajah Mati SP. 6 itu sendiri.

5.1.2. Hasil Pembobotan untuk Level Ketiga dan Keempat

a. Kriteria Biaya

Dalam kriteria biaya, hasil pembobotan untuk sub kriteria-nya secara lengkap dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini:



Gambar 5.2.

Hasil Pengolahan Data untuk Kriteria Biaya:

Sub Kriteria Fisik dan Non Fisik



Gambar 5.3.

Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Fisik:

Sub Sub Kriteria Prasarana dan Sarana



Gambar 5.4.
Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Non Fisik:
Sub Sub Kriteria Sosial dan Ekonomi

Pada kriteria biaya, sub kriteria non fisik memiliki nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan sub kriteria fisik. Hal ini menunjukkan bahwa untuk fisik, dibutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penanganan non fisik. Pada sub kriteria fisik, penanganan di bidang prasarana membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan penanganan bidang sarana. Sementara itu, pada sub kriteria non fisik, penanganan di bidang ekonomi membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan penanganan di bidang sosial. Sehingga, wajar bahwa dari sisi kriteria biaya, penanganan di bidang sarana dan bidang sosial lebih diutamakan karena membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penanganan di bidang prasarana dan bidang ekonomi.

b. Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam kriteria SDM, hasil pembobotannya juga secara rinci dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini:



Gambar 5.5
Hasil Pengolahan Data untuk Kriteria SDM:
Sub Kriteria Fisik dan Non Fisik



Gambar 5.6
Hasil Pengolahan Data Sub Krteria Fisik terkait SDM:
Sub Sub Kriteria Prasarana dan Sarana



Gambar 5.7
Hasil Pengolahan Data Sub Krteria Non Fisik terkait SDM:
Sub Sub Kriteria Sosial dan Ekonomi

Seperti pada kriteria biaya, dalam kriteria SDM, sub kriteria non fisik juga memiliki nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan sub kriteria fisik. Hal ini menunjukkan bahwa untuk fisik, dibutuhkan jumlah SDM yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penanganan non fisik. Pada sub kriteria fisik, penanganan di bidang prasarana membutuhkan jumlah SDM yang lebih besar dibandingkan dengan penanganan bidang sarana. Sementara itu, pada sub kriteria non fisik, penanganan di bidang ekonomi membutuhkan jumlah SDM yang sama dengan penanganan di bidang sosial. Sehingga, wajar bahwa dari sisi kriteria SDM, penanganan di bidang sarana lebih diutamakan karena membutuhkan jumlah SDM yang lebih rendah dibandingkan dengan penanganan di bidang prasarana, bidang ekonomi, dan bidang sosial.

c. Kriteria Regulasi

Dalam kriteria dukungan regulasi, hasil pembobotannya juga secara rinci dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini:



Gambar 5.8.

**Hasil Pengolahan Data untuk Kriteria Regulasi:
Sub Kriteria Fisik dan Non Fisik**



Gambar 5.9.

**Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Fisik terkait Regulasi:
Sub Sub Kriteria Prasarana dan Sarana**



Gambar 5.10.

**Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Non Fisik terkait Regulasi:
Sub Sub Kriteria Sosial dan Ekonomi**

Berbeda dengan kriteria biaya dan kriteria SDM, dalam kriteria regulasi, sub kriteria fisik memiliki nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan sub kriteria non fisik. Hal ini menunjukkan bahwa untuk fisik, dibutuhkan jumlah dukungan regulasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan penanganan non fisik. Pada sub kriteria fisik, penanganan di bidang prasarana membutuhkan dukungan regulasi yang sama dengan penanganan bidang sarana. Sementara itu, pada sub kriteria non fisik, penanganan di bidang ekonomi juga membutuhkan dukungan regulasi yang sama dengan penanganan di bidang sosial.

d. Kriteria Kepentingan

Dalam kriteria dukungan kepentingan (jumlah penerima manfaat), hasil pembobotannya juga secara rinci dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini:



Gambar 5.11.

Hasil Pengolahan Data untuk Kriteria Kepentingan: Sub Kriteria Fisik dan Non Fisik



Gambar 5.12.

Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Fisik terkait Kepentingan: Sub Sub Kriteria Prasarana dan Sarana



Gambar 5.13

Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Non Fisik terkait Kepentingan: Sub Sub Kriteria Sosial dan Ekonomi

Dalam kriteria kepentingan, sub kriteria fisik memiliki nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan sub kriteria non fisik. Hal ini sama dengan yang terjadi pada kriteria regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk fisik, tingkat manfaatnya dirasa lebih banyak dibandingkan dengan penanganan non fisik. Pada sub kriteria fisik, penanganan di bidang prasarana juga dirasa lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan penanganan bidang sarana. Sementara itu, pada

sub kriteria non fisik, penanganan di bidang ekonomi memberikan manfaat yang sama dengan penanganan di bidang sosial.

e. Kriteria Dukungan Pemda

Dalam kriteria dukungan Pemerintah Daerah (Pemda), hasil pembobotannya juga secara rinci dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut ini:



Gambar 5.14.

**Hasil Pengolahan Data untuk Kriteria Dukungan Pemda:
Sub Kriteria Fisik dan Non Fisik**



Gambar 5.15.

**Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Fisik terkait Dukungan Pemda:
Sub Sub Kriteria Prasarana dan Sarana**



Gambar 5.16.

**Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Non Fisik terkait Dukungan Pemda:
Sub Sub Kriteria Sosial dan Ekonomi**

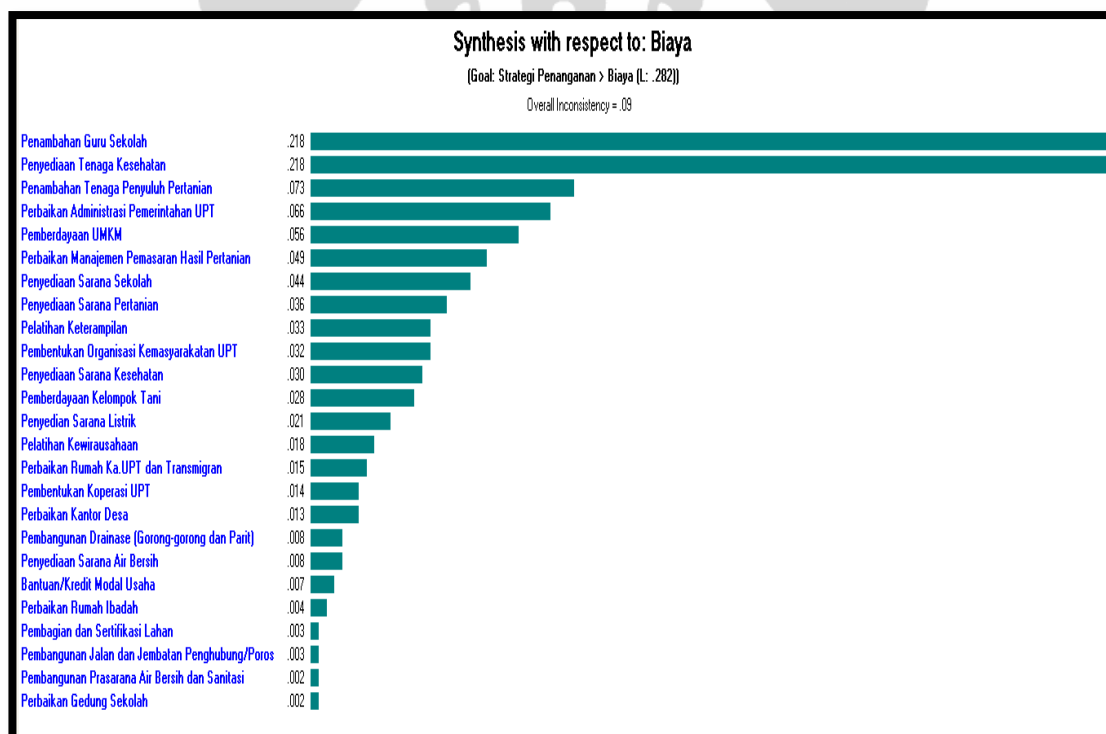
Pada kriteria dukungan Pemda, hasil pembobotannya mirip dengan yang terjadi pada kriteria kepentingan, dimana sub kriteria fisik memiliki nilai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan sub kriteria non fisik. Hal ini juga

menunjukkan bahwa untuk fisik, dukungan Pemda lebih banyak dibandingkan dengan penanganan non fisik. Pada sub kriteria fisik, penanganan di bidang prasarana juga dirasa lebih didukung oleh Pemda dibandingkan dengan penanganan bidang sarana. Sementara itu, pada sub kriteria non fisik, penanganan di bidang ekonomi memiliki dukungan dari Pemda yang sama besarnya dengan penanganan di bidang sosial.

5.2. Prioritas Penanganan Permasalahan untuk Setiap Kriteria

a. Kriteria Biaya

Dalam kriteria biaya, alternatif penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang paling prioritas adalah berupa penambahan guru sekolah dan penyediaan tenaga kesehatan. Bobot masing-masing kebijakan tersebut adalah sama, yaitu sebesar 0.28. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang paling murah dapat dilakukan untuk kedua kebijakan tersebut.



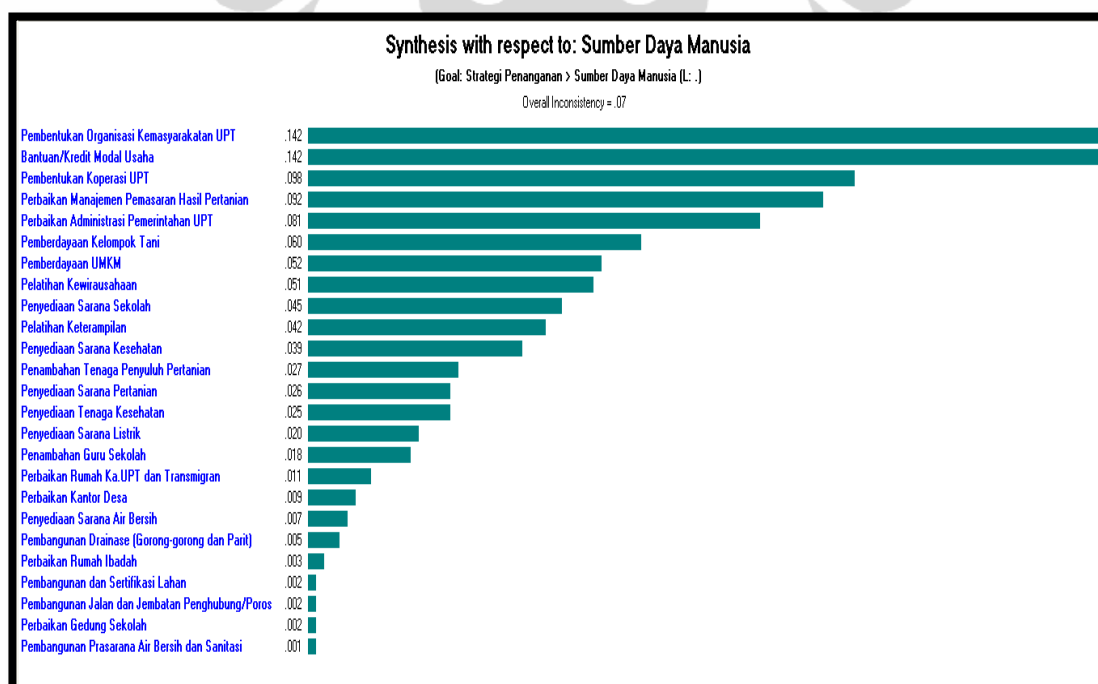
Gambar 5.17.

Prioritas Penanganan Permasalahan Menurut Kriteria Biaya

Apabila di balik sudut pandangnya, maka kebijakan perbaikan gedung sekolah, pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi serta pembangunan jalan dan jembatan penghubung/poros merupakan kebijakan yang membutuhkan biaya yang terbesar dari berbagai alternatif yang lain. Tentunya, kebijakan yang lebih diambil nantinya adalah kebijakan yang tidak membutuhkan biaya yang besar, dikarenakan terdapatnya keterbatasan dalam hal ketersediaan anggaran, baik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten OKI), dan masyarakat UPT Gajah Mati SP. 6 itu sendiri.

b. Kriteria SDM

Dalam kriteria SDM, alternatif penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang paling prioritas adalah berupa pembentukan organisasi kemasyarakatan UPT dan bantuan/kredit modal usaha. Bobot masing-masing kebijakan tersebut adalah sama, yaitu sebesar 0.142. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah SDM yang paling sedikit dibutuhkan adalah untuk melaksanakan kedua kebijakan tersebut.

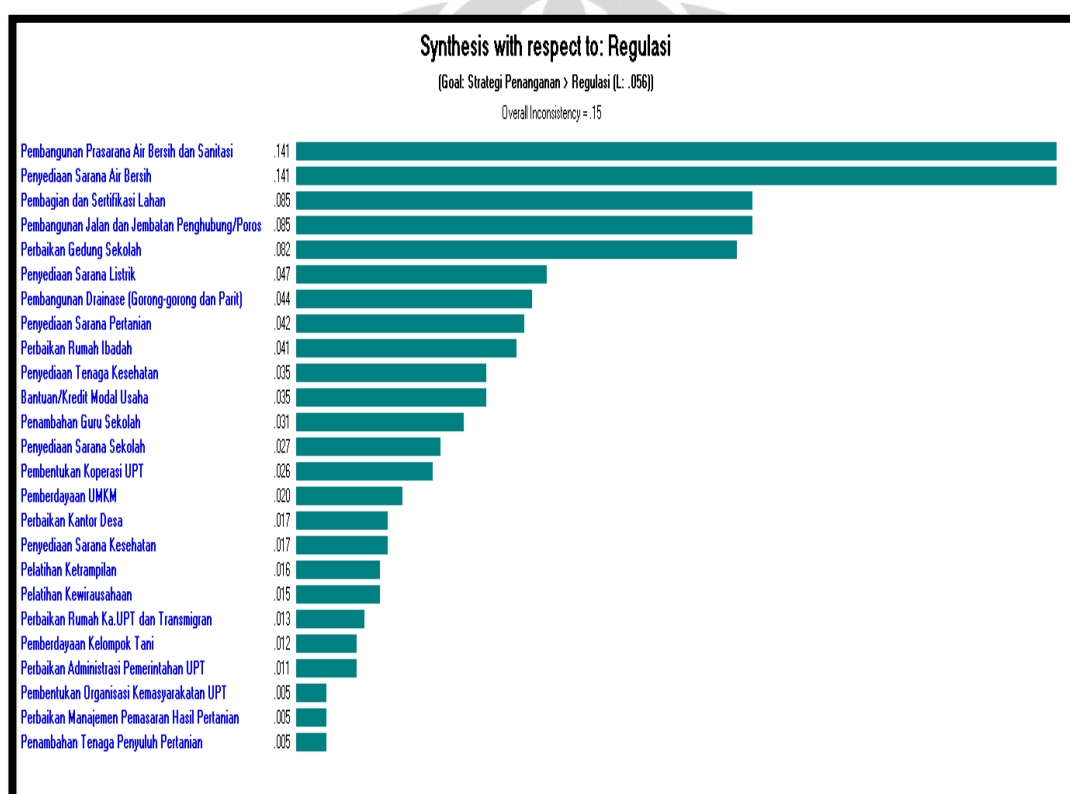


Gambar 5.18.

Prioritas Penanganan Permasalahan Menurut Kriteria SDM

c. Kriteria Regulasi

Berdasarkan kriteria dukungan regulasi, alternatif penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang paling prioritas adalah berupa pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi serta penyediaan sarana air bersih. Bobot masing-masing kebijakan tersebut adalah sama, yaitu sebesar 0.141. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan regulasi, baik berupa peraturan perundang-unangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, paling sedikit dibutuhkan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.



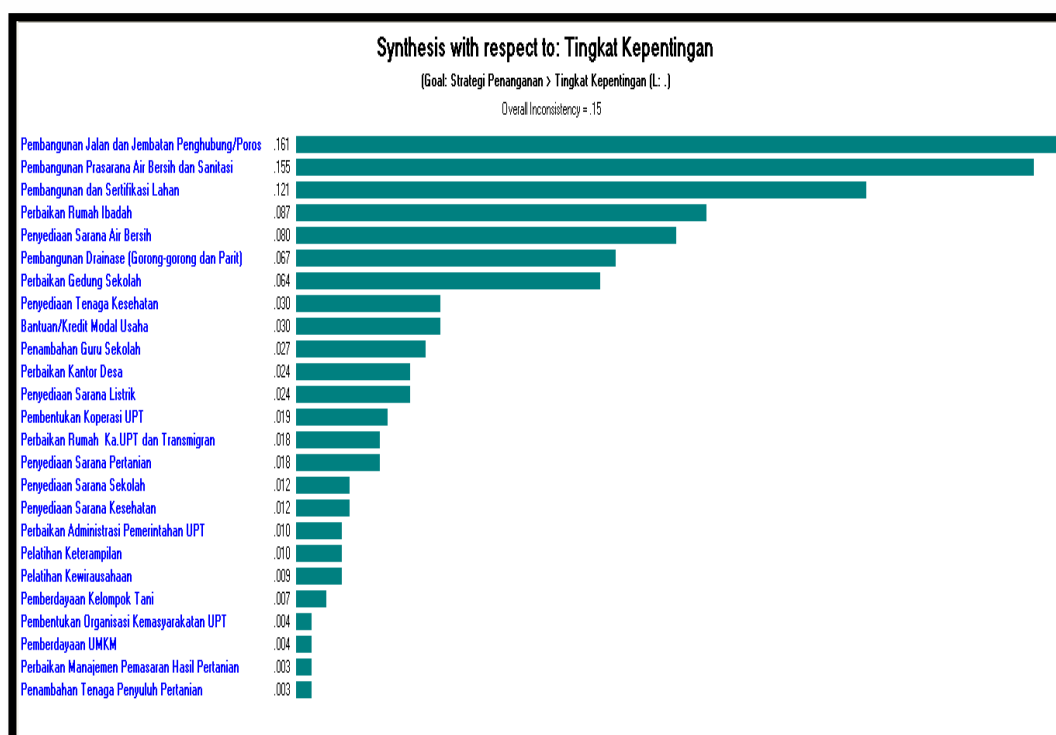
Gambar 5.19.

Prioritas Penanganan Permasalahan Menurut Kriteria Regulasi

d. Kriteria Tingkat Kepentingan

Hal yang berbeda dengan hasil yang sebelumnya (yaitu berdasarkan kriteria biaya, SDM, dan dukungan regulasi), untuk kriteria tingkat kepentingan dalam penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang paling prioritas adalah berupa pembangunan jalan dan jembatan penghubung/poros, yang

memiliki nilai bobot sebesar 0.161. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk membangun jalan dan jembatan penghubung/poros merupakan hal yang paling banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Kebijakan lain yang juga memberikan manfaat cukup banyak adalah penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi.

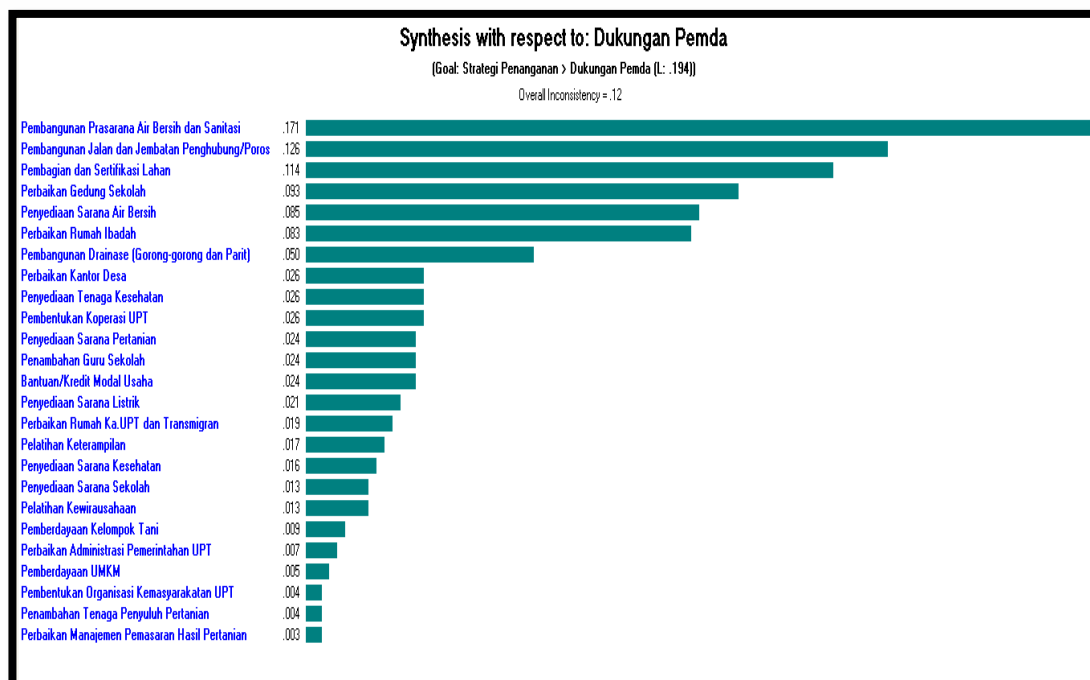


Gambar 5.20.

Prioritas Penanganan Permasalahan Menurut Kriteria Tingkat Kepentingan

e. Kriteria Dukungan Pemda

Dalam kriteria dukungan Pemda, beberapa alternatif penanganan permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6 yang menjadi prioritas adalah penanganan-penanganan yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Penanganan yang dimaksudkan adalah berupa pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi, pembangunan jalan dan jembatan penghubung/poros, dan pembagian dan sertifikasi lahan. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemda juga berharap dapat membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam UPT Gajah Mati SP. 6, terutama terkait dengan permasalahan pembiayaan.

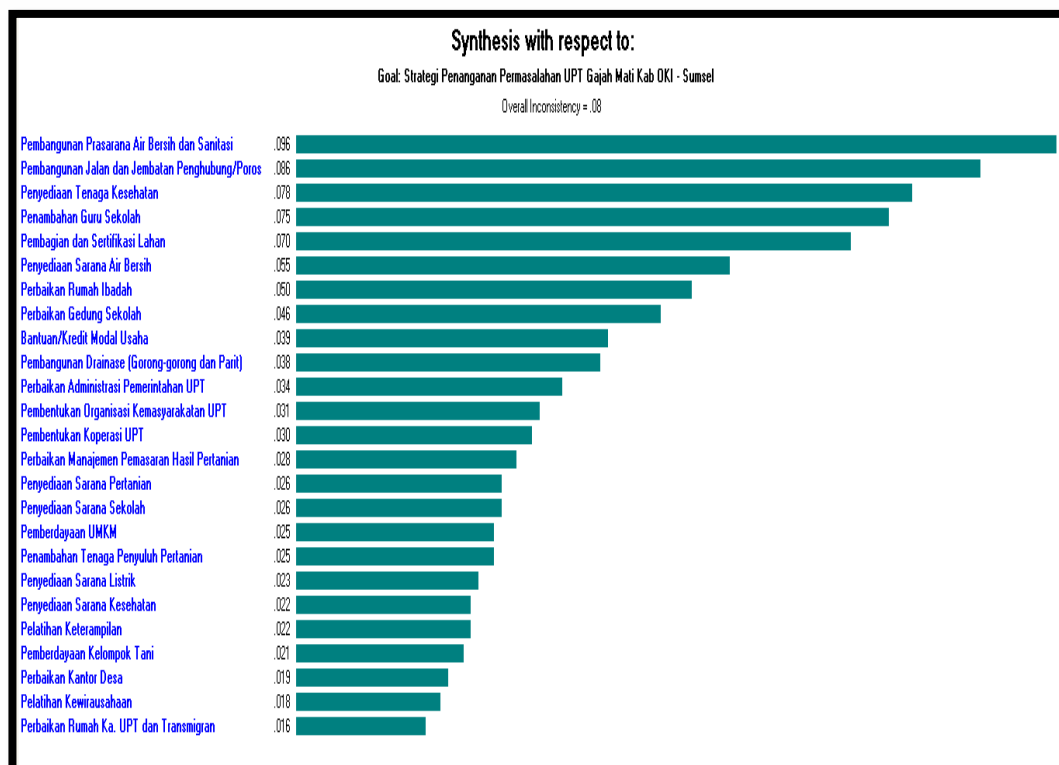


Gambar 5.21.
Prioritas Penanganan Menurut Kriteria Dukungan Pemda

5.3. Prioritas Global Penanganan Permasalahan

Dari hasil pembobotan pada level kedua sampai dengan kelima, maka selanjutnya dapat dicari prioritas final atau global dari keseluruhan kriteria dan sub kriteria. Dari hasil pengolahan data, diperoleh bahwa prioritas global penanganan permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6, dengan mempertimbangkan aspek biaya, jumlah SDM, tingkat kepentingan, dukungan regulasi, dan dukungan Pemda, yang tertinggi adalah berupa pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi. Selain itu, penanganan permasalahan yang lain adalah berupa pembangunan jalan dan jembatan penghubung/poros.

Kedua penanganan tersebut sangat layak menjadi prioritas dikarenakan akses masyarakat akan air bersih dan juga prasarana dan sarana transportasi masih sangat rendah di UPT Gajah Mati SP. 6. Kondisi air yang ada, dikarenakan lahan gambut, sangat buruk kualitasnya. Sementara itu, kondisi jalan yang berupa pasir dan batu (sirtu) dan belum beraspal juga sangat memprihatinkan.



Gambar 5.22.

Prioritas Penanganan Menurut Kriteria Penanganan Global

Bila diurutkan, prioritas dalam penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang masih masuk kategori tertinggal adalah sebagai berikut:

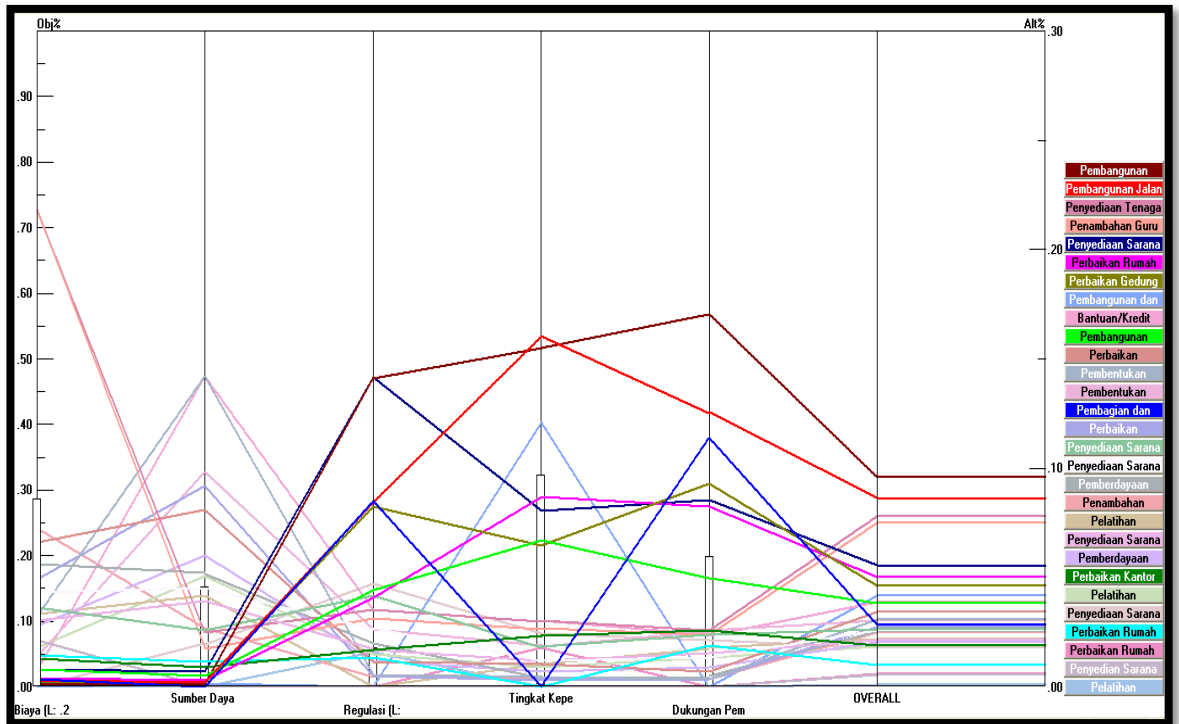
1. Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi (0.096)
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung/Poros (0.086)
3. Penyediaan Tenaga Kesehatan (0.078)
4. Penambahan Guru Sekolah (0.075)
5. Pembagian dan Sertifikasi Lahan (0.070)
6. Penyediaan Sarana Air Bersih (0.055)
7. Perbaikan Rumah Ibadah (0.050)
8. Perbaikan Gedung Sekolah (0.046)
9. Bantuan/Kredit Modal Usaha (0.039)
10. Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit) (0.038)
11. Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT (0.034)
12. Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan UPT (0.031)
13. Pembentukan Koperasi UPT (0.030)

14. Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian (0.028)
15. Penyediaan Sarana Pertanian (0.026)
16. Penyediaan Sarana Sekolah (0.026)
17. Pemberdayaan UMKM (0.025)
18. Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian (0.025)
19. Penyediaan Sarana Listrik (0.023)
20. Penyediaan Sarana Kesehatan (0.022)
21. Pelatihan Keterampilan (0.022)
22. Pemberdayaan Kelompok Tani (0.021)
23. Perbaikan Kantor Desa (0.019)
24. Pelatihan Kewirausahaan (0.018)
25. Perbaikan Rumah Ka.UPT dan Transmigran (0.010)

5.4. Analisis Sensitivitas

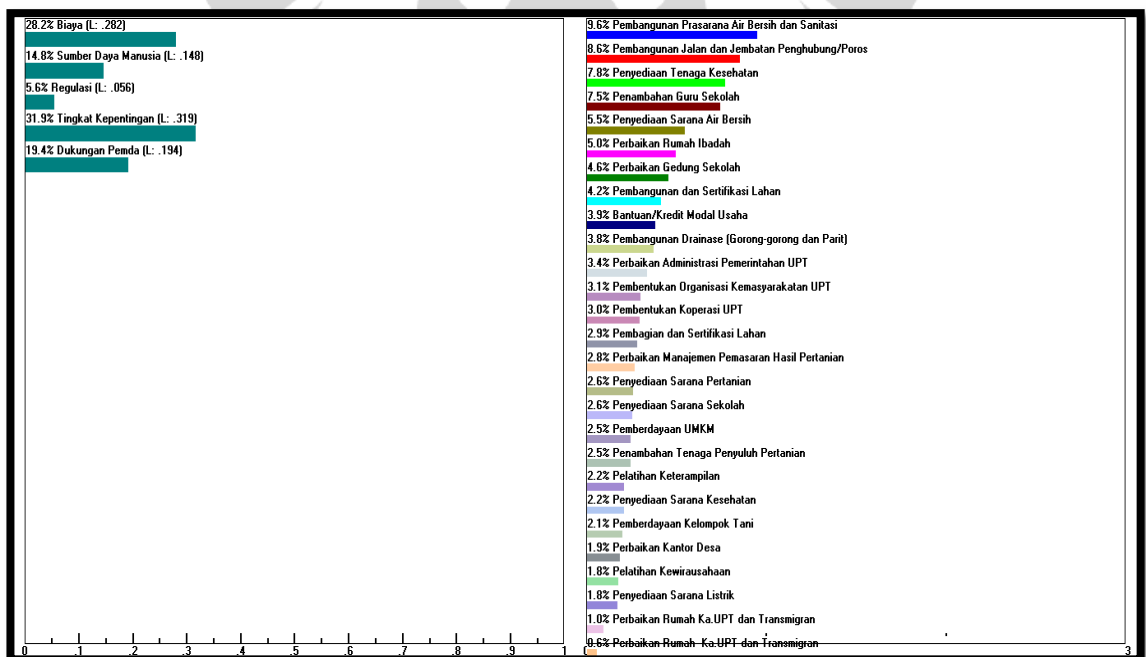
Dari hasil prioritas global yang diperoleh, maka selanjutnya dapat dianalisis terkait dengan permasalahan sensitivitas dari berbagai kriteria yang ada. Sensitivitas yang dimaksudkan adalah perubahan prioritas global akibat terjadinya perubahan pembobotan dalam suatu kriteria. Dengan asumsi tidak ada perubahan pembobotan pada level kriteria, maka hasil analisis sensitivitas untuk prioritas penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP.6 adalah seperti yang tergambar dalam **Gambar 5.23** dan **Gambar 5.24**. Dari gambar tersebut terlihat bahwa prioritas global yang tertinggi dalam penanganan permasalahan UPT Gajah Mati SP.6 adalah berupa pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi.

Apabila masing-masing kriteria dinaikkan pembobotannya sampai dengan 50 persen, maka analisis sensitifitasnya masing-masing dapat digambarkan dari **Gambar 5.25** sampai dengan **Gambar 5.29** berikut ini:



Gambar 5.23

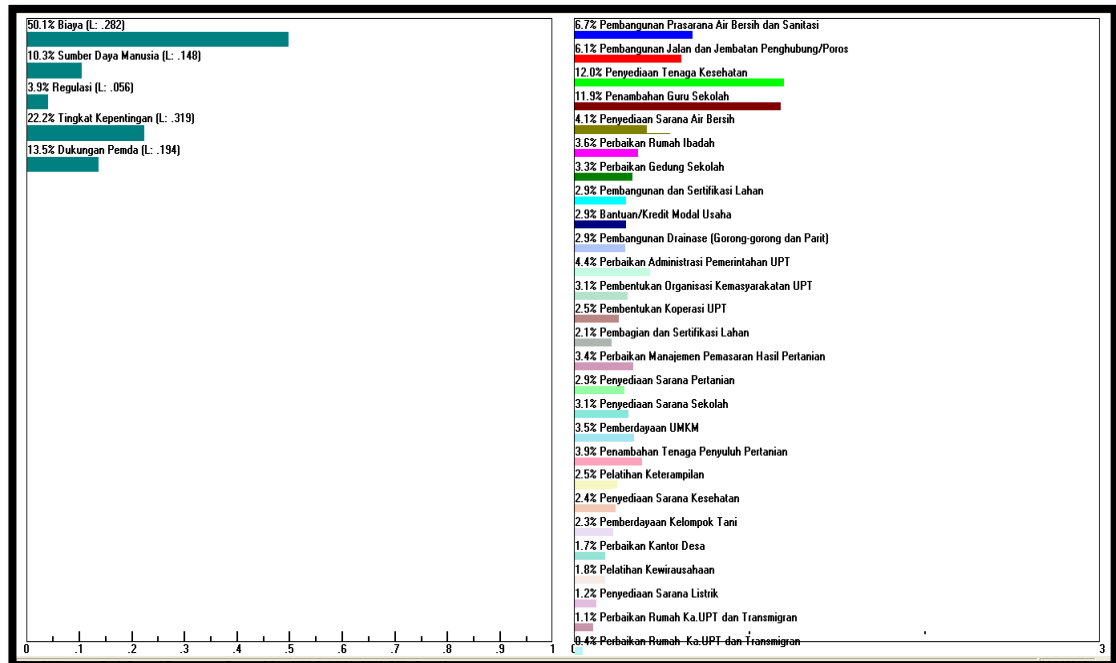
Analisis Sensitifitas Penanganan Permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6



Gambar 5.24

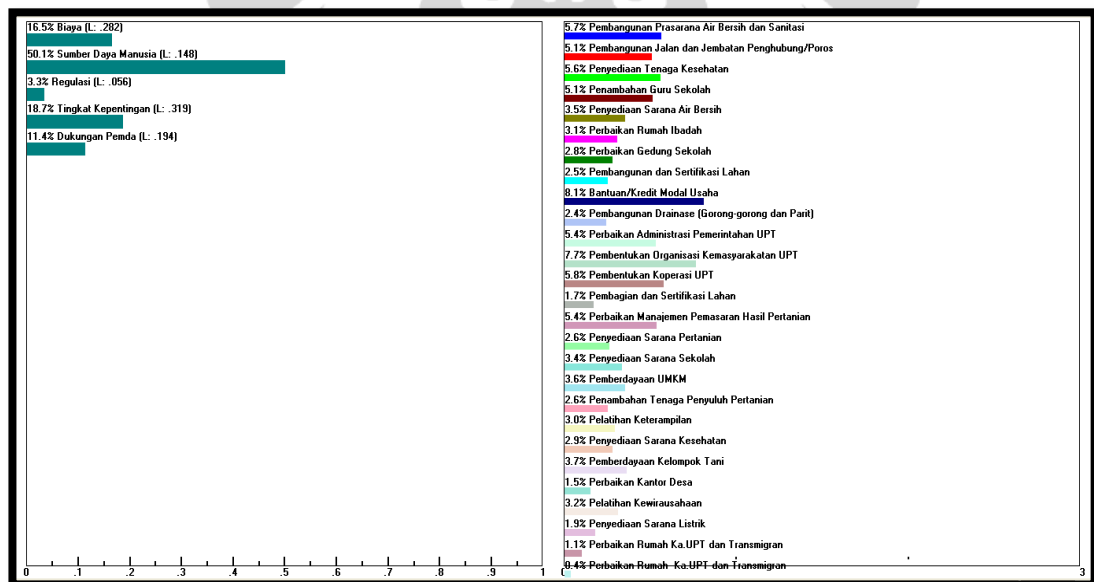
Analisis Sensitifitas Penanganan Permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6

Bila Tidak Terjadi Perubahan Pembobotan pada Kriteria



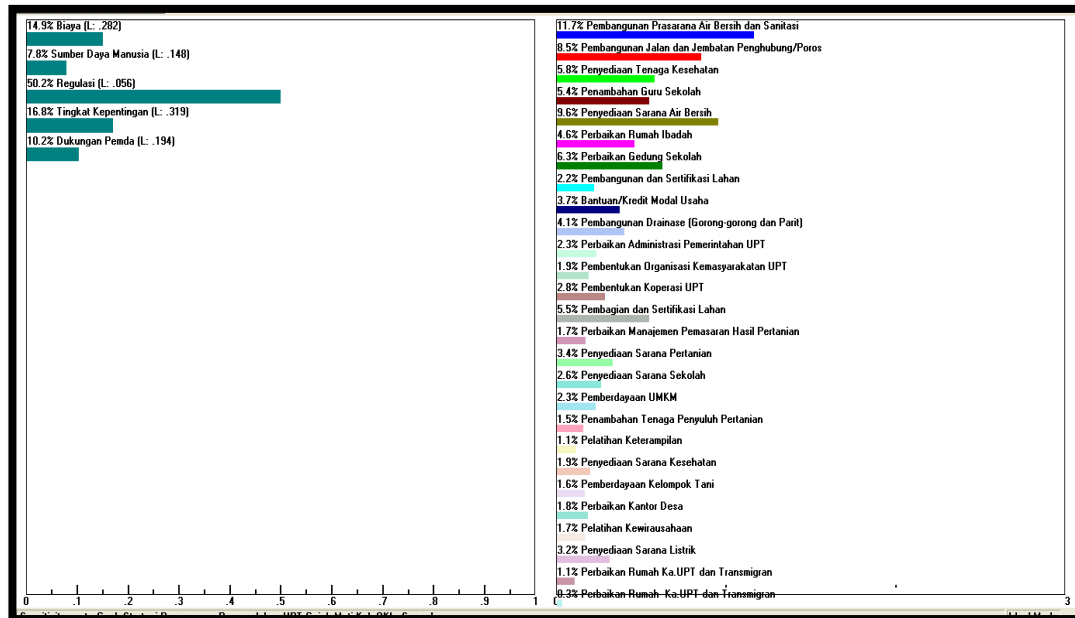
Gambar 5.25

Analisis Sensitifitas Penanganan Permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6 Bila Pembobotan pada Kriteria Biaya Dinaikan Sampai Dengan 50%



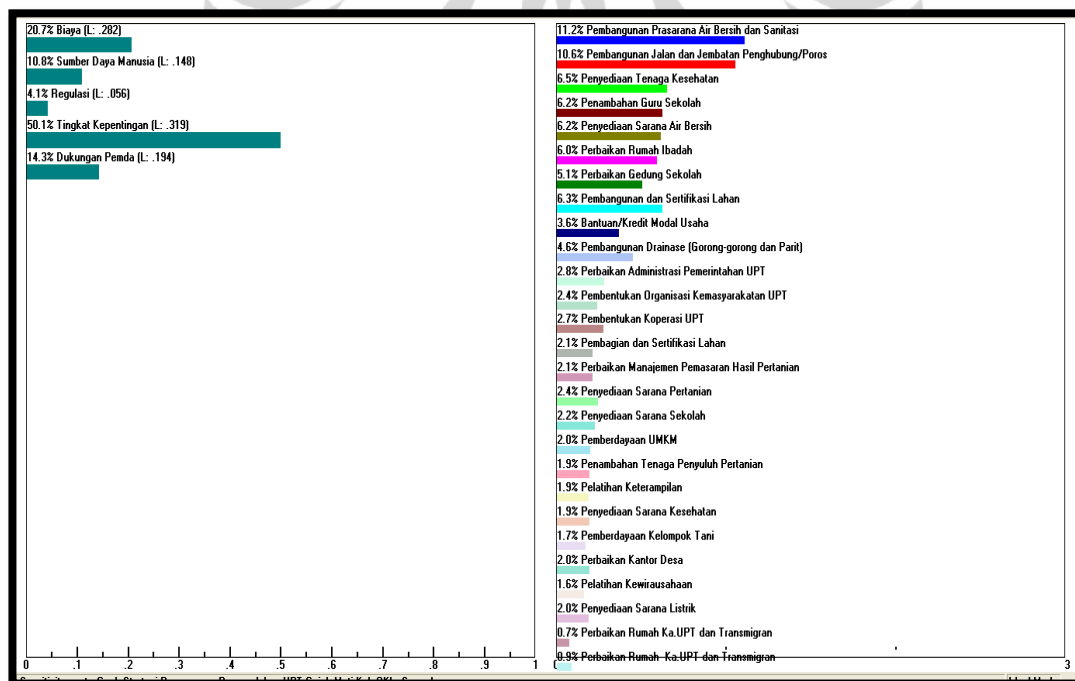
Gambar 5.26

Analisis Sensitifitas Penanganan Permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6 Bila Pembobotan pada Kriteria SDM Dinaikan Sampai Dengan 50%



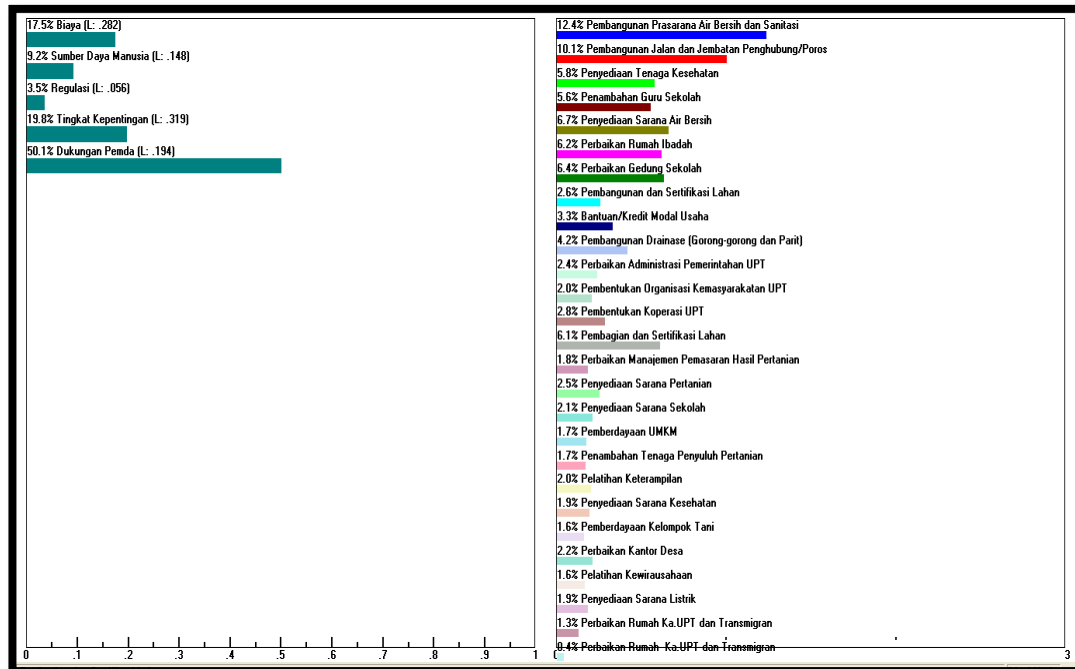
Gambar 5.27

**Analisis Sensitifitas Penanganan Permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6
Bila Pembobotan pada Kriteria Regulasi Dinaikan Sampai Dengan 50%**



Gambar 5.28

**Analisis Sensitifitas Penanganan Permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6
Bila Pembobotan pada Kriteria Kepentingan Dinaikan Sampai Dengan 50%**



Gambar 5.29

Analisis Sensitifitas Penanganan Permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6 Bila Pembobotan pada Kriteria Dukungan Pemda Dinaikan Sampai Dengan 50%

Dari **Gambar 5.25** sampai dengan **Gambar 5.29**, bila masing-masing kriteria dinaikkan menjadi 50 persen, dan yang lain diturunkan bobotnya secara proporsional, maka 2 (dua) prioritas tertinggi untuk penanganan permasalahan UPT Gajah Mati SP.6 adalah:

- Kriteria Biaya: Pengadaan Tenaga Kesehatan dan Penambahan Guru Sekolah;
- Kriteria SDM: Bantuan/Kredit Modal Kerja dan Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan UPT;
- Kriteria Regulasi: Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi dan Pembangunan Sarana Air Bersih;
- Kriteria Kepentingan: Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung/Poros; dan
- Kriteria Dukungan Pemda: Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung/Poros.

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan studi tentang penanganan permasalahan di UPT Tertinggal Gajah Mati SP.6 ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh antara lain:

- a. UPT Gajah Mati SP.6 masih masuk kategori UPT Tertinggal dikarenakan masih memiliki berbagai permasalahan yang ada dalam kriteria UPT Tertinggal, antara lain: i) tidak memiliki batas-batas fisik wilayah yang jelas; ii) legalitas lahan tidak jelas, lahan diokupasi, dan atau tumpang tindih dengan kawasan hutan/peruntukan lain; iii) sarana, prasarana, atau fasilitas umum tidak lengkap atau mengalami kerusakan, iv) perangkat pemerintahan desa belum definitif sesuai ketentuan yang berlaku; v) seluruh atau sebagian Kepala Keluarga transmigran belum memiliki lahan pekarangan dan lahan usaha dengan sertifikat hak milik; dan lain-lain;
- b. Terdapat 5 (lima) kriteria/aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP.6, yaitu aspek biaya, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), dukungan regulasi, tingkat kepentingan/manfaat, dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten);
- c. Masing-masing kriteria terbagi dalam 2 (dua) sub kriteria, yaitu fisik dan non fisik. Sub kriteria fisik mencakup bidang prasarana dan sarana, dan sub kriteria non fisik mencakup bidang ekonomi dan sosial;
- d. Dari keempat bidang dalam penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP.6, terdapat 29 jenis alternatif penanganan permasalahan, dimana dalam bidang prasarana terdapat 8 alternatif penanganan, dalam bidang sarana terdapat 5 alternatif penanganan, dalam bidang ekonomi terdapat 8 alternatif penanganan, dan dalam bidang sosial terdapat 4 alternatif penanganan;
- e. Dari lima kriteria yang dibangun, pertimbangan manfaat atau tingkat kepentingan adalah kriteria yang memiliki bobot tertinggi. Pertimbangan tingkat kepentingan atau manfaat disini adalah upaya penanganan

permasalahan yang dilakukan harus memberikan dampak manfaat yang paling besar bagi masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat baik warga transmigran maupun penduduk di sekitar wilayah permukiman;

- f. Dalam kriteria biaya, alternatif penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang paling prioritas adalah berupa penambahan guru sekolah dan penyediaan tenaga kesehatan;
- g. Dalam kriteria SDM, alternatif penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang paling prioritas adalah berupa pembentukan organisasi kemasyarakatan UPT dan bantuan/kredit modal usaha;
- h. Berdasarkan kriteria dukungan regulasi, alternatif penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang paling prioritas adalah berupa pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi serta penyediaan sarana air bersih;
- i. Hal yang berbeda dengan hasil yang sebelumnya (yaitu berdasarkan kriteria biaya, SDM, dan dukungan regulasi), untuk kriteria tingkat kepentingan dalam penanganan permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6 yang paling prioritas adalah berupa pembangunan jalan dan jembatan penghubung/poros;
- j. Dalam kriteria dukungan Pemda, beberapa alternatif penanganan permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6 yang menjadi prioritas adalah penanganan-penanganan yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Penanganan yang dimaksudkan adalah berupa pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi, pembangunan jalan dan jembatan penghubung/poros, dan pembagian dan sertifikasi lahan; dan
- k. Dari hasil pengolahan data secara keseluruhan, diperoleh bahwa prioritas global penanganan permasalahan UPT Gajah Mati SP. 6, dengan mempertimbangkan aspek biaya, jumlah SDM, tingkat kepentingan, dukungan regulasi, dan dukungan Pemda, yang tertinggi adalah berupa pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi. Selain itu, penanganan permasalahan yang lain adalah berupa pembangunan jalan dan jembatan penghubung/poros.

6.2. Saran/Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka saran/rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan penanganan permasalahan yang terjadi di UPT Gajah Mati SP. 6 adalah sebagai berikut:

1. Ke depan, ketersediaan anggaran yang ada dan diperuntukkan untuk proses pembangunan pada UPT Gajah Mati SP. 6 harus lebih diarahkan pada pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi, dalam hal ini berupa penyediaan prasarana pengolahan dan distribusi air bersih;
2. Dukungan Pemda perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di UPT Gajah Mati SP.6. Dukungan Pemda tersebut diperlukan dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kebutuhan pembiayaan yang cukup besar, seperti misalnya untuk pembangunan infrastruktur, baik berupa pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi maupun pembangunan jalan dan jembatan penghubung/poros;
3. Koordinasi baik antar instansi pusat (sektoral), antara pusat dan daerah, dan antar instansi daerah perlu ditingkatkan dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di UPT-UPT, khususnya UPT Gajah Mati SP.6, misalkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lainnya; dan
4. Perlunya melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari perencanaan sampai dengan pasca pelaksanaan pemebangunan, dalam rangka untuk percepatan penyelesaian permasalahan di UPT Gajah Mati SP. 6.

6.3. Keterbatasan Studi

Pelaksanaan studi ini tentunya belum sempurna dan ke depan perlu untuk selalu disempurnakan. Beberapa keterbatasan yang ada dalam studi ini antara lain: *pertama*, kelemahan dari metode AHP itu sendiri, dimana metode AHP memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap para ahli/*experts* yang digunakan, sedangkan kriteria yang pasti untuk para ahli tersebut belum ada. Namun kelemahan ini sudah dicoba ditutupi oleh penulis dengan pemilihan para ekspert yang selektif

dengan melibatkan para pengambil keputusan dan pelaksana lapangan yang mengetahui kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

Kedua, data pendukung akan profil wilayah UPT Gajah Mati SP.6 terbatas, dimana tidak tersedia data dengan *series* (waktu) yang cukup panjang dan juga masih tidak lengkapnya data-data untuk setiap aspek, khususnya ekonomi masyarakat yang tinggal di UPT Gajah Mati SP.6. Penulis juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk melengkapi data-data yang diperlukan, namun masih dirasa kurang sempurna. Hal ini dikarenakan pengadministrasian dan pencatatan statistik di daerah yang dijadikan wilayah studi ini masih belum baik juga. Oleh karena itu, ke depan penulis berharap studi ini akan dilanjutkan dengan studi-studi sejenis yang lain dan dengan berbagai penyempurnaan di sana-sini, terutama di UPT Gajah Mati SP. 6, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alphonse, Christian B. (1996), *Application of the Analytical Hierarchy Process in Agriculture in Developing Countries*, University College Dublin, Ireland
- Ariapour, Ali, Fazel Amin, Ahmad Torknezad (2008), *Regional Model of Sustainable Utilization in Marginal Lands by AHP Method (Case Study: Kabude Olia in Kemanshah Province)* Department of Renewable Resource, Islamic Azad University
- Badan Penelitian dan Pengembangan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2006), *Studi Penanganan Permasalahan UPT di Kawasan PLG, Provinsi Kalimantan Tengah*, Jakarta
- Balitfo, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2011), *Permasalahan Permukiman Transmigrasi Tahun 2011*, Jakarta
- Biro Perencanaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2007), *Studi Pemberdayaan UPT Binaan Tertinggal*, Jakarta
- Brodjonegoro, Bambang Permadi S. (1992), *Analitical Hierarchy Process*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi, UI, Jakarta
- Duke, Joshua M. dan Rhonda Aul-hide (2002), *Identifying Public Preferences for Land Preservation Using the Analytical Hierarchy Process*, Department of Food and Resource Economics, University of Delaware, USA
- Fajarianti Ria, dkk. (2007), *Analisis Permasalahan UPT*, Pusdatin Ketransmigrasian, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta
- Haryati, dkk (2002). *Studi Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Potensial Sebagai Kutub Pertumbuhan untuk Mendukung Pembangunan Daerah*, Puslitbang Ketransmigrasian, Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenaga Kerjaan dan Ketransmigrasian, Depnakertrans, Jakarta
- Husodo, Siswono Yudo (2003), *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan*, edisi revisi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta

- Karami, Ezatollah (2005), *Appropriateness of farmers' adoption of irrigation methods: Application of AHP Model*, Department of agricultural extension, College of Agricultural, Shiraz University, Iran
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010), *Menuju Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Sejahtera dan Bersaing*, Laporan Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta
- Najiati Sri dkk (2004). *Studi Penyusunan Indeks Pembangunan Transmigrasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah*, Puslitbang, Badan Penelitian dan Informasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta
- Nurmianto, Eko dan Arman Hakim Nasution (2004), *Perumusan strategi kemitraan menggunakan metode AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT. INKA dengan Industri Kecil Menengah di Wilayah Karesidenan Madiun)* Program Pasca Sarjana, Program Studi Manajemen Industri, ITS, Surabaya
- Saaty, Thomas L (1999), *Decision Making for Leaders*, University of Pittsburgh, USA
- Steiguer, J.E. de. Jennifer Duberstein, dan Vincente Lopes (2002) *The Analytic Hierarchy Process as a Means for Integrated Watershed Management*, School of Renewable Natural Resources, University of Arizona, Tucson
- Saleh, Herry Heriawan (2005), *Transmigrasi : Antara Kebutuhan Masyarakat dan Kepentingan Pemerintah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soegiharto, Saraswati (2008), *Transmigrasi, Belajar dari Kisah Sukses*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta
- Susanti, Herwini Wahyu (2006), *Penyusunan Indeks Keberhasilan Transmigrasi Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Transmigrasi (Studi Kasus: Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)*, MPKP, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Susanti Herwini Wahyu (2006), *Mengukur Keberhasilan Pembangunan Transmigrasi di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Pesisir Selatan)*, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Desember, Jakarta

LAMPIRAN

KUESIONER
Prioritas Penanganan Permasalahan UPT Gajah Mati SP.6
Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan

A. Identitas Informan Ahli	
Nama	:
Jabatan - Institusi	:
Alamat institusi	:
No.HP	:
Email	:

B. Petunjuk Pengisian

Contreng (√) kecenderungan yang Anda pilih

Alternatif A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Alternatif B
											√							

Lebih disukai alternatif A Lebih disukai alternatif B

Cara penilaian perbandingan berpasangan

- Bila kedua elemen **sama penting**, misalnya beri nilai 1, artinya bahwa kedua elemen tersebut (A dan B) mempunyai tingkat kepentingan yang sama.
- Bila elemen yang satu **sedikit lebih penting** dibanding yang lain dalam mempengaruhi elemen di atasnya, beri nilai 3, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman yang mendukung bahwa satu elemen dianggap sedikit lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap sedikit lebih penting, maka dikatakan A 3 kali lebih penting daripada B.
- Bila elemen **yang satu lebih penting dibanding yang lain**, beri nilai 5, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman bahwa satu elemen dianggap lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap lebih penting, maka dikatakan A 5 kali lebih penting daripada B.
- Bila elemen yang satu **jelas sangat penting dibanding yang lain**, beri nilai 7, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman

bahwa satu elemen dianggap jauh lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap jauh lebih penting, maka dikatakan A 7 kali lebih penting daripada B.

- e. Bila elemen yang satu **mutlak lebih penting** dibanding yang lain, beri nilai 9, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman bahwa satu elemen dianggap jauh lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap mutlak lebih penting, maka dikatakan A 9 kali lebih penting daripada B.

Ringkasan penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Skor	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7

C. Pertanyaan

1. Dalam lima kriteria/faktor yang menjadi penentu prioritas penanganan permasalahan unit pemukiman transmigrasi (UPT) Gajah Mati SP.6 Kab. OKI Provinsi Sumsel, kriteria mana yang Anda anggap paling penting:

Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Faktor Biaya																		Faktor SDM
Faktor Biaya																		Faktor Regulasi
Faktor Biaya																		Faktor Kepentingan
Faktor Biaya																		Faktor Dukungan Pemda
Faktor SDM																		Faktor Regulasi
Faktor SDM																		Faktor Kepentingan
Faktor SDM																		Faktor Dukungan Pemda

6. Dalam kriteria **Faktor Dukungan Pemerintah Daerah**, sub kriteria/sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Fisik																		Non Fisik

7. Dalam kriteria **Faktor Biaya dan Sub Kriteria Fisik**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Prasarana																		Sarana

8. Dalam kriteria **Faktor Biaya dan Sub Kriteria Non Fisik**, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sosial																		Ekonomi

9. Dalam kriteria **Faktor Sumber Daya Manusia dan Sub Kriteria Fisik**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Prasarana																		Sarana

10. Dalam kriteria **Faktor Sumber Daya Manusia dan Sub Kriteria Non Fisik**, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sosial																		Ekonomi

11. Dalam kriteria **Faktor Regulasi dan Sub Kriteria Fisik**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Prasarana																		Sarana

12. Dalam kriteria **Faktor Regulasi dan Sub Kriteria Non Fisik**, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sosial																		Ekonomi

13. Dalam kriteria **Faktor Tingkat Kepentingan dan Sub Kriteria Fisik**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Prasarana																		Sarana

14. Dalam kriteria Faktor Tingkat Kepentingan dan Sub Kriteria Non Fisik, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Sosial																		Ekonomi	

15. Dalam kriteria Faktor Dukungan Pemda dan Sub Kriteria Fisik, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Prasarana																		Sarana	

16. Dalam kriteria Faktor Dukungan Pemda dan Sub Kriteria Non Fisik, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Sosial																		Ekonomi	

17. Dalam kriteria Faktor Biaya dan Sub Kriteria Prasarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros	
Pembagian dan Sertifikasi																		Pembangunan Drainase (Gorong-	

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	
Lahan																	gorong dan Parit)
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																	Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																	Perbaikan Gedung Sekolah
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																	Perbaikan Rumah Ibadah
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																	Perbaikan Kantor Desa
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																	Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah Ibadah
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Kantor Desa
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9		
Perbaikan Rumah Ibadah																	Perbaikan Kantor Desa	
Perbaikan Rumah Ibadah																	Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran	
Perbaikan Kantor Desa																	Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran	

18. Dalam kriteria Faktor Biaya dan Sub Kriteria Sarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								1	Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6	7	8	9		
Penyediaan Sarana Air Bersih																	Penyediaan Sarana Listrik	
Penyediaan Sarana Air Bersih																	Penyediaan Sarana Pertanian	
Penyediaan Sarana Air Bersih																	Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Air Bersih																	Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Listrik																	Penyediaan Sarana Pertanian	
Penyediaan Sarana Listrik																	Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Listrik																	Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Pertanian																	Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Pertanian																	Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Sekolah																	Penyediaan Sarana Kesehatan	

19. Dalam kriteria Faktor Biaya dan Sub Kriteria Non Fisik Sosial, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting										Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Penambahan Guru Sekolah																		Penyediaan Tenaga Kesehatan		
Penambahan Guru Sekolah																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT		
Penambahan Guru Sekolah																		Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan UPT		
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT		
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan UPT		
Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT																		Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan UPT		

20. Dalam kriteria Faktor Biaya dan Sub Kriteria Non Fisik Ekonomi, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting										Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan UMKM		
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pembentukan Koperasi UPT		
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan Kelompok Tani		

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Keterampilan	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Kewirausahaan	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pemberdayaan UMKM																		Pembentukan Koperasi	
Pemberdayaan UMKM																		Pemberdayaan Kelompok Tani	
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Keterampilan	
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pemberdayaan UMKM																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Pemberdayaan UMKM																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pembentukan Koperasi UPT																		Pemberdayaan Kelompok Tani	
Pembentukan Koperasi UPT																		Pelatihan Keterampilan	
Pembentukan Koperasi UPT																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pembentukan Koperasi UPT																		Bantuan/Kredit Modal Kerja	
Pembentukan Koperasi UPT																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pemberdayaan Kelompok Tani (Gapoktan)																		Pelatihan Keterampilan	
Pemberdayaan Kelompok Tani (Gapoktan)																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
(Gapoktan)																		
Pemberdayaan Kelompok Tani (Gapoktan)																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pelatihan Keterampilan (Latihan Kerja)																		Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan Keterampilan (Latihan Kerja)																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pelatihan Keterampilan (Latihan Kerja)																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pelatihan Kewirausahaan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pelatihan Kewirausahaan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Bantuan/Kredit Modal Kerja																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian

21. Dalam kriteria Faktor Sumber Daya Manusia dan Sub Kriteria Prasarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Rumah Ibadah
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Kantor Desa
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Gedung Sekolah	
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Rumah Ibadah	
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Kantor Desa	
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran	
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Gedung Sekolah	
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah Ibadah	
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Kantor Desa	
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran	
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah Ibadah	
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Kantor Desa	
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran	
Perbaikan Rumah Ibadah																		Perbaikan Kantor Desa	
Perbaikan Rumah																		Perbaikan Rumah KA-	

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Ibadah																		UPT dan Transmigran
Perbaikan Kantor Desa																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran

22. Dalam kriteria Faktor Sumber Daya Manusia dan Sub Kriteria Sarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Listrik
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Pertanian
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Sekolah
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Kesehatan
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Pertanian
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Sekolah
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Kesehatan
Penyediaan Sarana Pertanian																		Penyediaan Sarana Sekolah
Penyediaan Sarana Pertanian																		Penyediaan Sarana Kesehatan
Penyediaan Sarana Sekolah																		Penyediaan Sarana Kesehatan

23. Dalam kriteria Faktor Sumber Daya Manusia dan Sub Kriteria Non Fisik Sosial, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting										Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Penambahan Guru Sekolah																		Penyediaan Tenaga Kesehatan		
Penambahan Guru Sekolah																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT		
Penambahan Guru Sekolah																		Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan UPT		
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT		
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan UPT		
Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT																		Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan UPT		

24. Dalam kriteria Faktor Sumber Daya Manusia dan Sub Kriteria Non Fisik Ekonomi, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting										Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan UMKM		
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pembentukan Koperasi		
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan Kelompok Tani		

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Keterampilan	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Kewirausahaan	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pemberdayaan UMKM																		Pembentukan Koperasi UPT	
Pemberdayaan UMKM																		Pemberdayaan Kelompok Tani	
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Keterampilan	
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pemberdayaan UMKM																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Pemberdayaan UMKM																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pembentukan Koperasi																		Pemberdayaan Kelompok Tani	
Pembentukan Koperasi																		Pelatihan Keterampilan	
Pembentukan Koperasi																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pembentukan Koperasi																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Pembentukan Koperasi																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Pelatihan Keterampilan	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Penambahan Tenaga	

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
																		Penyuluh Pertanian
Pelatihan Keterampilan																		Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan Keterampilan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pelatihan Keterampilan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pelatihan Kewirausahaan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pelatihan Kewirausahaan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Bantuan/Kredit Modal Usaha																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian

25. Dalam kriteria Faktor Regulasi dan Sub Kriteria Prasarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembagian dan																		Perbaikan Rumah Ibadah

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Sertifikasi Lahan																		
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Kantor Desa
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Drainase																		Perbaikan Rumah Ibadah

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
(Gorong-gorong dan Parit)																		
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah Ibadah
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Kantor Desa
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Rumah Ibadah																		Perbaikan Kantor Desa
Perbaikan Rumah Ibadah																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Kantor Desa																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran

26. Dalam kriteria Faktor Regulasi dan Sub Kriteria Sarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Listrik	
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Pertanian	
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Pertanian	
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Pertanian																		Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Pertanian																		Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Sekolah																		Penyediaan Sarana Kesehatan	

27. Dalam kriteria Faktor Regulasi dan Sub Kriteria Non Fisik Sosial, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Penambahan Guru Sekolah																		Penyediaan Tenaga Kesehatan	
Penambahan Guru Sekolah																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT	

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Penambahan Guru Sekolah																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT	
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT	
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT	
Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT	

28. Dalam kriteria Faktor Regulasi dan Sub Kriteria Non Fisik Ekonomi, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan UMKM	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pembentukan Koperasi	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan Kelompok Tani	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Keterampilan	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Kewirausahaan	
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Perbaikan																		Penambahan	

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pemberdayaan UMKM																		Pembentukan Koperasi	
Pemberdayaan UMKM																		Pemberdayaan Kelompok Tani	
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Keterampilan	
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pemberdayaan UMKM																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Pemberdayaan UMKM																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pembentukan Koperasi																		Pemberdayaan Kelompok Tani	
Pembentukan Koperasi																		Pelatihan Keterampilan	
Pembentukan Koperasi																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pembentukan Koperasi																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Pembentukan Koperasi																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Pelatihan Keterampilan	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pelatihan Keterampilan																		Pelatihan Kewirausahaan	
Pelatihan Keterampilan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	
Pelatihan Keterampilan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Pelatihan Kewirausahaan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha	

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pelatihan Kewirausahaan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	
Bantuan/Kredit Modal Usaha																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian	

29. Dalam kriteria **Faktor Tingkat Kepentingan/Penerima Manfaat dan Sub Kriteria Prasarana Fisik**, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Gedung Sekolah	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Rumah Ibadah	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Kantor Desa	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran	
Pembangunan Jalan dan																		Pembangunan Drainase	

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	
Jembatan Penghubung Poros																	(Gorong-gorong dan Parit)
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Parit)																		
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah Ibadah
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Kantor Desa
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Rumah Ibadah																		Perbaikan Kantor Desa
Perbaikan Rumah Ibadah																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Kantor Desa																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran

30. Dalam kriteria Faktor Tingkat Kepentingan/Penerima Manfaat dan Sub Kriteria Sarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Penyediaan																		Penyediaan

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Sarana Air Bersih																		Sarana Listrik	
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Pertanian	
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Pertanian	
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Pertanian																		Penyediaan Sarana Sekolah	
Penyediaan Sarana Pertanian																		Penyediaan Sarana Kesehatan	
Penyediaan Sarana Sekolah																		Penyediaan Sarana Kesehatan	

31. Dalam kriteria **Faktor Tingkat Kepentingan/Penerima Manfaat dan Sub Kriteria Non Fisik Sosial**, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Penambahan Guru Sekolah																		Penyediaan Tenaga Kesehatan	
Penambahan Guru Sekolah																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT	
Penambahan Guru Sekolah																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT	
Penyediaan																		Perbaikan	

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Tenaga Kesehatan																		Administrasi Pemerintahan UPT
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT
Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT

32. Dalam kriteria Faktor Tingkat Kepentingan/Penerima Manfaat dan Sub Kriteria Non Fisik Ekonomi, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan UMKM
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pembentukan Koperasi
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan Kelompok Tani
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Keterampilan
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Kewirausahaan
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pemberdayaan UMKM																		Pembentukan Koperasi

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Pemberdayaan UMKM																		Pemberdayaan Kelompok Tani
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Keterampilan
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Kewirausahaan
Pemberdayaan UMKM																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pemberdayaan UMKM																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pembentukan Koperasi																		Pemberdayaan Kelompok Tani
Pembentukan Koperasi																		Pelatihan Keterampilan
Pembentukan Koperasi																		Pelatihan Kewirausahaan
Pembentukan Koperasi																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pembentukan Koperasi																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Pelatihan Keterampilan
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Pelatihan Kewirausahaan
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pelatihan Keterampilan																		Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan Keterampilan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pelatihan Keterampilan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pelatihan Kewirausahaan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pelatihan Kewirausahaan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Bantuan/Kredit																		Penambahan

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Modal Usaha																		Tenaga Penyuluh Pertanian	

33. Dalam kriteria Faktor Dukungan Pemerintah Daerah dan Sub Kriteria Prasarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Gedung Sekolah	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Rumah Ibadah	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Kantor Desa	
Pembagian dan Sertifikasi Lahan																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran	
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																		Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)	
Pembangunan Jalan dan																		Pembangunan Prasarana Air	

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	
Jembatan Penghubung Poros																	Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Poros																	Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Perbaikan Gedung Sekolah
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Drainase (Gorong-gorong dan Parit)																	Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																	Perbaikan Gedung Sekolah

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah Ibadah
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Kantor Desa
Pembangunan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah Ibadah
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Kantor Desa
Perbaikan Gedung Sekolah																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Rumah Ibadah																		Perbaikan Kantor Desa
Perbaikan Rumah Ibadah																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran
Perbaikan Kantor Desa																		Perbaikan Rumah KA-UPT dan Transmigran

34. Dalam kriteria Faktor Dukungan Pemerintah Daerah dan Sub Kriteria Sarana Fisik, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Listrik
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Pertanian
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Sekolah

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Penyediaan Sarana Air Bersih																		Penyediaan Sarana Kesehatan
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Pertanian
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Sekolah
Penyediaan Sarana Listrik																		Penyediaan Sarana Kesehatan
Penyediaan Sarana Pertanian																		Penyediaan Sarana Sekolah
Penyediaan Sarana Pertanian																		Penyediaan Sarana Kesehatan
Penyediaan Sarana Sekolah																		Penyediaan Sarana Kesehatan

35. Dalam kriteria Faktor Dukungan Pemerintah Daerah dan Sub Kriteria Non Fisik Sosial, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Penambahan Guru Sekolah																		Penyediaan Tenaga Kesehatan
Penambahan Guru Sekolah																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT
Penambahan Guru Sekolah																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT
Penyediaan Tenaga Kesehatan																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Perbaikan Administrasi Pemerintahan UPT																		Pembentukan Organisasi Masyarakat UPT

36. Dalam kriteria Faktor Dukungan Pemerintah Daerah dan Sub Kriteria Non Fisik Ekonomi, jenis penanganan permasalahan apa yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Sub Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan UMKM
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pembentukan Koperasi
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pemberdayaan Kelompok Tani
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Keterampilan
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Pelatihan Kewirausahaan
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Perbaikan Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pemberdayaan UMKM																		Pembentukan Koperasi
Pemberdayaan UMKM																		Pemberdayaan Kelompok Tani
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Keterampilan
Pemberdayaan UMKM																		Pelatihan Kewirausahaan

Sub Kriteria	← Lebih Penting									Lebih Penting →								Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pemberdayaan UMKM																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pemberdayaan UMKM																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pembentukan Koperasi																		Pemberdayaan Kelompok Tani
Pembentukan Koperasi																		Pelatihan Keterampilan
Pembentukan Koperasi																		Pelatihan Kewirausahaan
Pembentukan Koperasi																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pembentukan Koperasi																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Pelatihan Keterampilan
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Pelatihan Kewirausahaan
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pemberdayaan Kelompok Tani																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pelatihan Keterampilan																		Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan Keterampilan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pelatihan Keterampilan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Pelatihan Kewirausahaan																		Bantuan/Kredit Modal Usaha
Pelatihan Kewirausahaan																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian
Bantuan/Kredit Modal Usaha																		Penambahan Tenaga Penyuluh Pertanian

----- TERIMA KASIH -----